

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**PERAN BINTARA PEMBINA DESA DALAM PERUMUSAN  
KEBIJAKAN PUBLIK  
(Studi Pada Wilayah Kodim 1606/Lombok Barat)**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**WARIS ARI NUGROHO**

**NIM. 016354177**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA**

**2013**

**ABSTRACT****THE ROLE OF NCO IN MAKES POLICY PUBLIC  
(STUDY OF 1606 MILITARY DISTRICT WEST LOMBOK)**

**WARIS ARI NUGROHO**  
(email : waris.ari@gmail.com)  
Indonesia Open University

**Key word** : Making the public policy, the role of Babinsa.

The purpose of this research is to provide description on the role of Babinsa (NCO assigned to monitor an area, one or more villages) and to find it's supporting factors and obstacles especially under the 1606/Military District West Lombok in making public policy. This research become important because there are indications that publics organizations make their policy without coordination with the other organizations as source of information.

This research use qualitative method. Data use in this research is qualitative data which are primary data. Analysis performed in accordance with analyzing skill based on facts.

The research found that Babinsa performing their duties based on direct order from Danramil (Sub-District Commander), coordination with village administrators and direct interaction with the society in order to perform national resilience function, inveterizing and maintaining natural resources, Human resources and Man-made resources and other activites to identify other potentials in its area. Babinsa routinely submit report to Danramil as part of their responsibility. Babinsa in 1606/Military District Command of West Lombok have great potential regarding source of information, strengthening policy implementation and evaluating the policy itself. The task of Babinsa in secure or normal condition is identical to research function and as counterpart of the society, it need working environment , knowledge and skill in using it. Those are some of the obstacles , but the main one in regards of making the public policy is the unwillingness of public organizations to work across the department.

Suggestion that could be made after the research is public organizations in making their public policy on one or more villages consult Babinsa, but in broader area should also involve Danramil because informations from Babinsa are also given to their superior.

**ABSTRAK****PERAN BINTARA PEMBINA DESA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN  
PUBLIK (Studi Pada Wilayah Kodim 1606/Lombok Barat)****WARIS ARI NUGROHO**

(email : waris.ari@gmail.com)

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

**Kata kunci :** Perumusan Kebijakan Publik, Peran Babinsa

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran peran Babinsa dan menemukan faktor pendukung dan penghambat peran Babinsa Kodim 1606/ Lombok Barat dalam perumusan kebijakan publik. Penelitian ini penting, karena ada indikasi organisasi publik dalam merumuskan kebijakan tidak melakukan koordinasi dengan organisasi lain yang mempunyai sumber informasi.

Desa riset yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, umumnya berupa data primer. Kajian dilakukan dengan mengandalkan kemampuan analisis sesuai dengan fakta yang ditemukan.

Temuan yang diperoleh adalah Babinsa dalam pelaksanaan tugas berkaitan dengan pengarahan langsung yang diberikan oleh Danramil, ragam koordinasi dengan aparat di desa dan secara langsung bersosialisasi dengan masyarakat guna menjalankan fungsi ketahanan nasional, inventarisasi dan pemeliharaan SDA, SDM dan SDB serta ragam kegiatan lain untuk lebih mengenal potensi yang ada di wilayah binaan. Babinsa memberikan laporan secara rutin pada Danramil sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas. Babinsa di wilayah Kodim 1606/Lombok Barat mempunyai potensi yang besar terkait dengan sumber informasi, penguatan implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan yang ada di wilayah binaan. Tugas Babinsa dalam kondisi ketahanan yang aman atau normal akan lebih edintik sebagai fungsi riset dan sekaligus sebagai pendamping di masyarakat, sehingga diperlukan bantuan media kerja dan sekaligus pengetahuan serta keterampilan dalam penggunaannya. Faktor tersebut muncul sebagai penghambat, tetapi penghambat utama dalam hubungan dengan perumusan kebijakan publik adalah keengganan organisasi publik untuk bekerja lintas departemen.

Saran dalam penelitian ini adalah organisasi publik hendak merumuskan kebijakan pada satu desa atau kelurahan, maka sangat penting melibatkan Babinsa, tetapi jika dalam wilayah yang lebih luas dapat melibatkan Danramil, karena ragam informasi dari para Babinsa telah diberikan pada atasannya.

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

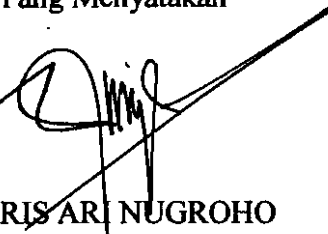
**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul PERAN BINTARA PEMBINA DESA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI PADA WILAYAH KODIM 1606/LOMBOK BARAT) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Mataram, September 2013  
Yang Menyatakan



  
WARIS ARI NUGROHO  
NIM 016 354177

## LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : PERAN BINTARA PEMBINA DESA DALAM PERUMUSAN  
KEBIJAKAN PUBLIK ( STUDI PADA WILAYAH KODIM  
1606/LOMBOK BARAT )

Penyusun TAPM : Waris Ari Nugroho

NIM : 016 354177

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari / Tanggal : Sabtu / 20 Juli 2013

Menyetujui:

Pembimbing I,


  
DR. Sofjan Aripin, M.Si.  
NIP 19660619 199203 1 002

Pembimbing II,

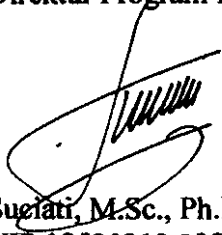
  
DR. Endar Pituringsih, M.Si. Ak.

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada  
Program Pascasarjana,

  
Florentina Ratih Wulandari, S.Ip. M.Si.  
NIP 19710609 199802 2 001

Direktur Program Pascasarjana,

  
Suzati, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Waris Ari Nugroho  
 NIM : 016 354177  
 Program Studi : Magister Administrasi Publik  
 Judul TAPM : PERAN BINTARA PEMBINA DESA DALAM PERUMUSAN  
 KEBIJAKAN PUBLIK ( STUDI PADA WILAYAH KODIM  
 1606/LOMBOK BARAT )

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana,  
 Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Sabtu / 20 Juli 2013  
 Waktu : 14.45 s.d 15.45 WITA

Dan telah dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TAPM**


Ketua Komisi Penguji  
 Drs.R.Alam Malau,M.Si

  
 .....

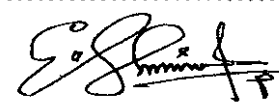
Penguji Ahli  
 Prof.Dr.Azhar Kasim,M.P.A

  
 .....

Pembimbing I  
 DR. Sofjan Aripin, M. Si

  
 .....

Pembimbing II  
 DR. Endar Pituringsih, M. Si. Ak.

  
 .....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke khadirat Allah SWT, atas segala limpahan karuniaNya, sehingga tesis yang berjudul “Peran Bintara Pembina Desa Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Studi Pada Wilayah Kodim 1606/Lombok Barat)” dapat diselesaikan tepat waktu. Hasil riset ini diharapkan memberikan informasi dan sekaligus keterbukaan atas kondisi faktual yang ada mengenai potensi Babinsa dalam hal pemilikan informasi sebagai dasar perumusan kebijakan publik.

Dalam penyusunan TAPM ini telah banyak diperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga TAPM ini dapat memenuhi syarat akademis. Dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Direktur Pascasarjana UT, Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D yang telah banyak memberikan arahan dan saran saran.
2. Bpk. DR.Sofjan Aripin MSi sebagai Pembimbing I, terima kasih atas pembelajaran yang diberikan selama proses penyusunan TAPM ini.
3. Ibu DR Endar Pituringsih, M.Si. Ak , sebagai Dosen Pembimbing II, terima kasih atas masukan dan saran perbaikan yang diberikan pada proses bimbingan.
4. Bapak Kepala UPBJJ-UT Mataram, dan Dosen akademis Pascasarjana Universitas Terbuka, khususnya pada UPBJJ-UT Mataram.
5. Dosen dan staf akademis Pascasarjana Universitas Terbuka, terima kasih atas pembelajarannya, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam penulisan tesis ini.
6. Babinsa, aparaturnya desa dan responden lain di wilayah Kodim 1606/Lombok Barat atas keluangannya waktu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan selama riset.
7. Kedua orang tua dan keluargaku, terima kasih atas segala dukungan selama proses pendidikan di Magister Administrasi Universitas Publik UPBJJ-UT Mataram.
8. Rekan-rekan mahasiswa dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

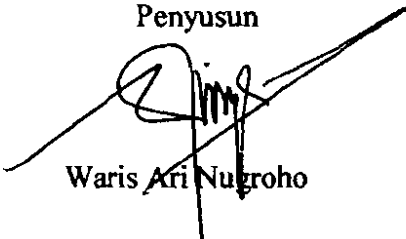
TAPM ini telah melalui proses akademis yang ditentukan oleh pihak akademis Universitas Terbuka sehingga diharapkan memenuhi syarat akademis dan praktek.

Diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat praktek, terutama dalam peningkatan peran Babinsa pada setiap perumusan kebijakan publik di wilayah binaannya. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermakna bagi rekan mahasiswa atau peneliti lain yang tertarik untuk melakukan kajian yang sama.

Akhirnya, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga bantuan dari semua pihak menjadi amal di sisi Allah SWT Amin ya rabbal alamin.

Mataram, September 2013

Penyusun



Waris Ari Nugroho

UNIVERSITAS TERBUKA



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRACT</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
 <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	11
1. Penelitian Terdahulu .....	11
2. Konsep Kebijakan Publik .....	23
3. Model Kebijakan Publik .....	30
4. Pentingnya Kebijakan Publik.....	37
5. Implementasi Kebijakan Publik.....	39
6. Potensi Babinsa.....	42
B. Kerangka Berpikir .....	44
 <b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	48
B. Informan Penelitian .....	48
C. Instrumen Penelitian .....	49
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	50
E. Metode Analisis Data.....	52

**BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Profile Wilayah Penelitian.....	54
B. Deskripsi Tugas Babinsa di Kodim 1606/Lombok Barat.....	59
1. Informan Babinsa.....	59
2. Bentuk Hasil Kerja Babinsa di Wilayah Kodim 1606/ Lombok Barat.....	83
3. Pengenalan Hambatan dan Pendukung Pelaksanaan Tugas Hubungan dengan Kebijakan Publik .....	86
4. Pelaksanaan Tugas Babinsa dalam Hubungan dengan Perumusan Kebijakan Publik .....	90
5. Informan Mitra Kerja Aparatur Kelurahan/Desa.....	93
6. Informan Atasan Babinsa –Danramil Terkait Tugas.....	101
C. Pembahasan.....	107

**BAB V. SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	118
B. Saran .....	119

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Hal</b>
2.1. Kerangka Berpikir.....	46

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Hal</b>
3.1. Indikator dan Instrumen Penelitian.....	49
4.1. Potensi Ekonomi Tiga Daerah di Wilayah Kerja Kodim 1606/ Lombok Barat Tahun 2011 .....	55
4.2. Hambatan dan Pendukung Pelaksanaan Tugas Babinsa di Wilayah Kodim 1606 / Lombok Barat Terkait Perumusan Kebijakan Publik Tahun 2012 .....	87
4.3. Matrik hasil Wawancara .....	106

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Angket
2. Informan (Babinsa) di Kodim 1606/ Lombok Barat tahun 2012
3. Hambatan dan Pendukung dalam Pelaksanaan Tugas Babinsa Berhubungan dengan Inventaris Potensi Wilayah Binaan dan Aspek Non Hankamnas di Kodim 1606/Lombok Barat.
4. Pengalaman dalam Hubungan dengan Instansi Lain pada Babinsa di Kodim 1606/ Lombok Barat

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintahan Indonesia telah memilih sistem desentralisasi dengan terapan otonomi daerah, dengan berbagai pertimbangan yang akan berdampak pada percepatan pewujudan kesejahteraan rakyat. Salah satu pertimbangannya adalah pemerintah daerah yang lebih mengenal potensi dan permasalahan masyarakat serta birokrasi yang lebih sederhana, sehingga bias implementasi kebijakan pemerintah semakin rendah. Terapannya, terlihat seluruhnya mulai dari awal, baik pada aspek ekonomi, sosial, dan politik.

Suatu era dalam pemerintahan hendaknya tidak mulai dari awal, tetapi melanjutkan pemerintahan sebelumnya dengan melakukan kajian evaluasi yang obyektif. Era orde baru unggul dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dicapai mempunyai makna terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Penggunaan potensi aparatur negara, bahkan TNI untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa, yang dikenal dengan istilah AMD (ABRI Masuk Desa), sekarang TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa). Implementasi yang dinilai tidak identik dengan era reformasi hanya atas dasar bermakna atau tidaknya terhadap penciptaan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi, lebih demokratis serta rendah biaya (Wasistiono, 2003:25).

Ego pemerintahan dalam menggunakan keunggulan dari pemerintahan atau suatu rezim tidak dapat dibenarkan, karena pada dasarnya memulai sesuatu yang baru akan dilakukan perkenalan pada masyarakat, serta proses lain yang memakan waktu dan biaya

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintahan Indonesia telah memilih sistem desentralisasi dengan terapan otonomi daerah, dengan berbagai pertimbangan yang akan berdampak pada percepatan pewujudan kesejahteraan rakyat. Salah satu pertimbangannya adalah pemerintah daerah yang lebih mengenal potensi dan permasalahan masyarakat serta birokrasi yang lebih sederhana, sehingga bias implementasi kebijakan pemerintah semakin rendah. Terapannya, terlihat seluruhnya mulai dari awal, baik pada aspek ekonomi, sosial, dan politik.

Suatu era dalam pemerintahan hendaknya tidak mulai dari awal, tetapi melanjutkan pemerintahan sebelumnya dengan melakukan kajian evaluasi yang obyektif. Era orde baru unggul dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dicapai mempunyai makna terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Penggunaan potensi aparatur negara, bahkan TNI untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa, yang dikenal dengan istilah AMD (ABRI Masuk Desa), sekarang TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa). Implementasi yang dinilai tidak identik dengan era reformasi hanya atas dasar bermakna atau tidaknya terhadap penciptaan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi, lebih demokratis serta rendah biaya (Wasistiono, 2003:25).

Ego pemerintahan dalam menggunakan keunggulan dari pemerintahan atau suatu rezim tidak dapat dibenarkan, karena pada dasarnya memulai sesuatu yang baru akan dilakukan perkenalan pada masyarakat, serta proses lain yang memakan waktu dan biaya

yang tinggi. Penggunaan nama baru untuk suatu kegiatan juga relatif tidak diperlukan, karena masyarakat tidak familiar dengan istilah baru, sebagai ujungnya adalah kerja pengenalan yang seluruhnya bermuara pada pemborosan anggaran. Satu sisi efektivitas dalam pemecahan masalah perlu mendapatkan pengkajian dari awal, evaluasi dan perbaikan, sehingga permasalahan masyarakat jauh dari kondisi terpecahkan.

Permasalahan masyarakat dapat terentaskan, salah satunya jika informasi yang digunakan sebagai sumber untuk perumusan kebijakan valid. Informasi terkait dengan potensi sumber daya dan permasalahan yang ada, sehingga pengelolaan sumber daya dan alokasinya akan tepat sasaran (Dunn, 2003:106). Informasi sebagai salah satu faktor yang diperhatikan dalam perumusan dan implementasi suatu kebijakan tidak saja ditegaskan oleh Dunn (2003), tetapi juga Edward III (1980), bahkan Mcleod dan Shell (2001:3) menjadikannya sebagai salah satu faktor produksi. Informasi mempunyai peran penting dalam segala aspek, suatu perusahaan dapat menguasai pasar karena penguasaan informasi, begitu juga dengan pemimpin dalam organisasi, karena sebagai sumber informasi. Pengelolaan informasi yang tepat akan memberikan implikasi positif dalam berbagai aspek, termasuk dalam perumusan kebijakan.

Kebijakan publik didefinisikan oleh Anderson dalam Nugroho (2004:54) sebagai “tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah”. Masalah dalam definisi kebijakan publik meliputi aspek yang luas, terkait bias kebutuhan dan kondisi aktual yang ada dalam sektor ekonomi, sosial, politik dan ideologi. Dalam penelitian ini masalah yang



dimaksud lebih fokus pada masalah ekonomi dan sosial, sehingga dapat dilakukan analisis yang spesifik.

Kebijakan publik dapat dipastikan ada pemerintah sebagai pihak yang merumuskan kebijakan dan melaksanakannya dengan fokus untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang dihadapi masyarakat (*public concern*). Persoalan masyarakat tersebut menyangkut perolehan keadilan sosial, melibatkan kepentingan banyak orang dan dilakukan dengan cara yang substansial (Yustika, 2005:9). Mengacu pada makna ini, maka kebijakan publik atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus jauh dari keputusan yang berdampak pada kesengsaran, bias keadilan sosial dan lainnya. Salah satu faktor penting yang diperlukan dalam perumusan kebijakan publik adalah informasi yang tepat.

Pemecahan masalah masyarakat dalam pendekatan pemerintahan modern, harus mempunyai konsep atau pandangan masa depan (jangka panjang), fokus pada masyarakat dan multi usaha dan seluruh sektor yang ada dalam pemerintahan (Kwon dan Matheson, 2003:12). Maknanya adalah pemecahan masalah tidak bersifat *in case*, tetapi pemecahan masalah sampai akar permasalahan, sehingga tidak muncul permasalahan yang sama pada periode yang akan datang. Pemerintah sebagai pelaku kebijakan publik perlu menggali sumber informasi yang mendalam dari berbagai fungsi aparatur yang telah dimiliki. Informasi yang diperlukan mempunyai sifat terus menerus, bukan penggalian pada waktu tertentu, sehingga timbul bias pada saat tidak dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data sebagai sumber informasi untuk mendukung kebijakan publik banyak dilakukan oleh

dinas yang mempunyai fungsi khusus, seperti Badan Pusat Statistik. Fakta kerja yang dijalankan adalah menggunakan data sekunder dari berbagai dinas yang ada.

Aparatur negara yang mempunyai fungsi pengumpulan data yang sifatnya terus menerus adalah Babinsa yang berada dalam ranah kerja pertahanan keamanan negara dengan badan TNI AD. Hal ini sesuai dengan tugas Babinsa yang dimuat dalam Peraturan Kasad No. Perkasad/19/IV/2008 tanggal 8 April 2008, sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan teritorial sesuai petunjuk Danramil.
2. Melaksanakan pengumpulan dan pemeliharaan data geografi, demografi, kondisi sosial dan potensi nasional meliputi SDM, SDA/SDB serta sarana prasarana di wilayahnya.
3. Memberikan informasi tentang situasi dan kondisi wilayah bagi pasukan yang bertugas di daerahnya
4. Melaporkan perkembangan situasi kepada Danramil pada kesempatan pertama.
5. Babinsa dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Danramil.

Fungsi Babinsa untuk kepentingan kebijakan publik sangat vital, karena menjadi tugas pokoknya dalam mengumpulkan dan pemeliharaan data menyangkut aspek geografi, demografi, sosial, dan potensi yang ada di daerah. Lingkup kerja Babinsa adalah tingkat pemerintahan terendah, yaitu desa dan kelurahan. Fungsi dan keberadaannya secara kuantitas pada setiap desa merupakan suatu potensi untuk digerakkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga hal yang perlu dijalankan oleh pembuat kebijakan adalah melakukan koordinasi, bukan melakukan kegiatan pengumpulan data dari awal, karena akan lamban, bias dan pemborosan serta menandakan koordinasi yang rendah antar fungsi yang ada dalam pemerintahan.

Uraian ini memaknai bahwa pendekatan dalam pemerintahan modern adalah terciptanya integrasi baik secara vertikal dan horisontal, multi usaha dari berbagai fungsi atau departemen (Kwon dan Matheson, 2003:12). Para aparaturnegara, dari berbagai level pemerintah tentu menyadari aspek penting yang perlu dikedepankan dalam merumuskan setiap kebijakan publik, yaitu kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Kepentingan politik, kekuatan lainnya harus dibangun atas kemampuan dalam mewujudkan tujuan bernegara, diimplementasikan dari setiap kebijakan publik.

Potensi Babinsa bukan saja pada penggunaan fungsinya sebagai sumber informasi untuk perumusan kebijakan publik, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk tahap implementasi kebijakan publik. Fungsi ini tergolong penting dalam rangka memberikan peningkatan penggunaan sumber daya dalam mendukung kebijakan publik, sehingga akhirnya permasalahan masyarakat dapat terpecahkan dengan lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat pada salah satu butir dari delapan wajib TNI. Wujud tugas tersebut dapat dilaksanakan secara perorangan ataupun melalui kerja bersama (satuan TNI) dalam suatu wilayah teritorial.

Seluruh aparaturnegara yang dimiliki pada dasarnya memberikan dukungan untuk penciptaan masyarakat yang lebih sejahtera, baik melalui kerja langsung atau tidak langsung. Kontribusi kerja yang dijalankan harus dioptimalkan lembaga terkait atau pemanfaatannya oleh pengambil kebijakan publik. Pada wilayah kerja Kodim 16.06 Lombok Barat mempunyai wilayah kerja yang cukup luas, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Utara. Jumlah Babinsa yang ada pada wilayah

kerja tersebut sebanyak 171 orang, merupakan potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan secara maksimal, baik sebagai sumber informasi untuk perumusan kebijakan publik ataupun pada tahap implementasi, bahkan juga pada tahap evaluasi dan perumusan kebijakan publik untuk mempercepat penyelesaian masalah masyarakat.

Potensi Babinsa yang ada di wilayah kerja Kodim 16.06 Lombok Barat meliputi jumlah dan kualifikasi yang berhubungan dengan fungsinya. Kerja dalam pemerintahan modern (*modernising government*) bukan hanya dimanfaatkan oleh organisasi vertikalnya, tetapi oleh seluruh organisasi lintas sektoral yang ada dalam pemerintahan Indonesia. Kebijakan publik yang diambil oleh suatu organisasi publik tidak hanya mengandalkan sumber informasinya, bahkan sumber daya yang dikelola, tetapi dilakukan dengan memperhatikan sumber informasi lainnya, sehingga kebijakan yang diambil dapat bersifat saling menguatkan dalam memecahkan permasalahan masyarakat.

Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih mempunyai permasalahan yang relatif sama pada aspek pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Kota Mataram mempunyai indeks pembangunan manusia (IPM) berada pada peringkat ke 196 dengan nilai 70,7; Kabupaten Lombok Barat pada peringkat 444 dengan nilai 59,3; dan KLU sebesar 58,70. Perhitungan IPM menggunakan tiga aspek sentral, yaitu: aspek pendidikan (lama sekolah), aspek kesehatan (angka harapan hidup), dan aspek ekonomi (rata-rata tingkat pendapatan). Nilai IPM yang rendah memberikan indikasi yang jelas, bahwa kondisi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masih sangat

rendah, dipastikan ada pengangguran yang tinggi dan permasalahan sosial lain di daerah terkait (BPS NTB, 2011).

Peran pemerintah sebagai perumus kebijakan publik (terapan pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan) yang tepat sasaran, sehingga terjadi percepatan dalam peningkatan IPM, selanjutnya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan dalam makna yang luas. Konteks kebijakan publik tersebut, bukan saja dalam lingkup regional, tetapi juga secara nasional. Seluruh kebijakan tersebut akan tepat sasaran tergantung pada tepat atau tidaknya informasi, terkait dengan permasalahan yang perlu dipecahkan serta potensi wilayah yang dapat digerakkan.

Aparatur negara yang terdekat dengan sumber informasi, bekerja secara terus menerus, bukan pengumpul data secara *accidental* atau periode tertentu adalah Babinsa. Dapat dinyatakan fungsi yang dimiliki sangat penting untuk informasi yang terkait dengan pengenalan potensi wilayah, permasalahan dan kebutuhan masyarakat. TNI membuka diri atas kerja organisasi publik, termasuk juga pada tahap implementasi, karena TNI mempunyai fokus dalam memberikan bantuan sesuai dengan orientasi pembangunannya. Tahap implementasi nyata dari TNI pada era orde baru adalah ABRI masuk desa, fokus pada kerja fisik dan non fisik. Fakta yang ada, masyarakat sangat mengharapkan implementasi kerja tersebut, baik sebagai kerja tunggal TNI ataupun sebagai hasil koordinasi untuk mengimplementasikan suatu kebijakan oleh organisasi publik lainnya. Banyak hal yang telah berubah dalam koordinasi kerja TNI dengan organisasi publik lain dalam kebijakan publik, mulai dari tahap perumusan sampai tahap evaluasi.

Penelitian ini diarahkan pada penggunaan potensi Babinsa oleh organisasi publik dalam merumuskan kebijakan publik. Penggunaan potensi dimaknai lebih lanjut dalam perannya dalam memberikan dukungan atas organisasi publik dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik. Organisasi publik yang dimaksud adalah organisasi publik yang berfungsi pada tiga aspek dasar, yaitu: aspek pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini bukan dalam konteks organisasi vertikal dari Babinsa, karena keberadaannya bukan pada perumus kebijakan di tiga aspek tersebut, tetapi hanya terkait dengan keamanan dan kesatuan negara (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Babinsa di wilayah kerja Kodim 1606/ Lombok Barat dalam perumusan kebijakan publik?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat peran Babinsa di Kodim 1606/Lombok Barat dalam perumusan kebijakan publik?
3. Bagaimanakah peran Babinsa di wilayah kerja Kodim 1606/Lombok Barat dalam implementasi kebijakan publik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran dan menganalisa peran Babinsa di wilayah kerja Kodim 1606/ Lombok Barat dalam perumusan kebijakan publik.
2. Untuk menemukan dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat peran Babinsa Kodim 1606/ Lombok Barat dalam perumusan kebijakan publik.
3. Untuk memberikan gambaran dan menganalisis peran Babinsa di wilayah kerja Kodim 1606/Lombok Barat dalam implementasi kebijakan publik.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Mengarahkan keberadaan seluruh organisasi di Pemerintahan Indonesia, termasuk Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat memerankan peranan penting dalam mendukung ragam kebijakan publik yang berdampak pada pembangunan yang tepat sasaran. Peran tersebut bersifat langsung dan tidak langsung, termasuk wujud koordinasi antar organisasi publik lainnya.
2. Secara teoritis untuk melakukan pembelajaran secara mendalam atas kebijakan publik, terutama dalam perumusan dan implementasinya dalam pemanfaatan sumber informasi atau koordinasi antar organisasi publik. Kebijakan publik tersebut dapat berada pada pemerintahan tingkat regional dan pusat.

Penelitian ini difokuskan pada perumusan kebijakan publik, maka digunakan teori yang relevan. Model perumusan kebijakan publik dipaparkan dalam tinjauan

pustaka, sementara yang dijadikan acuan adalah model yang diajukan oleh Santoso (2010), dengan mengambil tahapan pengenalan masalah, implementasi dan evaluasi. Penelitian ini *bukan* Babinsa sebagai perumus kebijakan, tetapi bagaimana organisasi publik lain memanfaatkan potensi informasi yang dimiliki, sehingga kebijakan yang dirumuskan tepat sasaran. Dapat dipastikan, jika bias informasi pada tahap perumusan kebijakan terjadi, maka seluruh proses kebijakan publik tersebut akan gagal, termasuk dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat sebagai tujuan dari kebijakan publik.

3. Secara praktek dijadikan sebagai salah satu masukan bagi organisasi publik di daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan publik.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Penelitian Terdahulu

Kebijakan publik dalam berbagai pendekatan, seperti perumusan, analisis kebijakan, dan evaluasi telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan obyek yang beragam. Kebijakan publik yang tepat sasaran dalam memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan peran dari bagian tertentu aparatur negara, khususnya Babinsa relatif tidak ditemukan. Penelitian terdahulu ditampilkan dengan obyek penelitian yang berbeda mengenai kebijakan publik.

Iqbal (2008) melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus". Penelitian terdahulu ini ditampilkan tidak fokus pada bagaimana hasil yang dicapai dari perumusan kebijakan BLT, tetapi bagaimana BLT muncul sebagai kebijakan untuk mengatasi kemiskinan. Kebijakan BLT muncul sebagai suatu alternatif pilihan dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat harus dipastikan sebagai alternatif kebijakan yang paling tepat atau mempunyai bias yang paling kecil dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau setidaknya memberikan bantuan pemecahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat pada periode terkait.

Faktor penghambat dalam penerapan BLT (Iqbal, 2008) adalah adanya kecemburuan di antara peneriman BLT, disebabkan kondisi ekonomi yang relatif sama.

Masyarakat mempunyai persepsi kondisi ekonomi sosial yang sama dengan penerima, sehingga menimbulkan kekecewaan pada masyarakat. Kerja yang dijalankan oleh pemerintah desa dan kelurahan adalah melakukan rebug untuk menentukan masyarakat yang mendapatkan BLT, tetapi fakta di lapangan tetap menyebabkan kecemburuan.

Konteks di atas menjadi perhatian dalam penelitian ini, karena kurangnya informasi atas kondisi dari masyarakat yang akan dijadikan sebagai subyek dari penerima program BLT. Program BLT dalam implementasinya tidak tepat sasaran dan dapat berdampak pada pembentukan perilaku yang tidak produktif. Konteks ini yang menjadi dasar kajian penggunaan potensi yang dimiliki negara dalam merumuskan setiap kebijakan publik.

Penelitian di atas dijadikan dasar untuk melakukan kajian dalam penelitian ini, yaitu bagaimana perumusan kebijakan dengan menggunakan potensi aparatur negara dalam perumusan kebijakan publik. Ketepatan dalam mendapatkan informasi kondisi sosial ekonomi suatu wilayah, potensi wilayah dan lainnya menjadi faktor penentu ketepatan dalam perumusan kebijakan publik. Perumusan kebijakan yang kurang tepat berdampak pada alokasi anggaran yang tidak efektif, bahkan cenderung aplikasi di lapangan sebagai pemunculan *rush*.

Fakta bahwa kebijakan BLT yang dirumuskan oleh negara dinyatakan tidak efektif dalam memecahkan masalah. Hal ini memberikan pembuktian bahwa informasi awal, pengelolaan aspek-aspek yang terkait sehingga muncul implementasi kebijakan ini pada dasarnya tidak valid. Informasi yang tepat dan luas dibutuhkan sebelum merumuskan suatu kebijakan, termasuk sasaran dari kebijakan tersebut. Data penduduk miskin dan lainnya

tidak dimiliki sebagai dasar pemberian BLT, sehingga muncul kecemburuan sosial di dalam masyarakat. Kondisi ini yang akan dihindari, jika dalam perumusan kebijakan oleh negara menggunakan sumber informasi yang tepat, berdekatan dengan akar permasalahan dan mempunyai fungsi aktual berupa pengumpulan dan pemeliharaan data, SDA, SDM, dan SDB di wilayah kerjanya.

Bappeda dan Undip (2007) melakukan penelitian dengan judul "Kebijakan Publik Bagi PKL di Lokasi Strategis di Kota Semarang". Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan publik dan evaluasi dalam mengatur pertumbuhan PKL di Kota Semarang. Keberadaan PKL tidak dapat dikontekskan sebagai suatu yang negatif, tetapi juga memberikan kontribusi positif atas penyediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.

Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan kebijakan dan peraturan yang mendukung kebijakan pengelolaan kegiatan PKL. Fakta yang ada masih terjadi pelanggaran oleh masyarakat, untuk itu perlu dilakukan kajian mengenai perumusan kebijakan publik yang tepat. Analisis dengan menggunakan Aparatur dan dinas yang terkait dengan pengelolaan PKL di Kota Semarang adalah UPD PPKL, Bagian Perekonomian, Tata Usaha Pemerintahan Umum, Satpol PP, Pemkot Semarang, Dinas PU, PPJP, Kecamatan dan Kelurahan.

Analisis data dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa lokasi PKL yang ada sekarang telah bersesuaian dengan peraturan, kecuali ada

kepentingan lain akan dilakukan tindak lanjut. Aplikasi lebih lanjutnya adalah pemerintah berkewajiban melakukan :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang kota
3. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat
4. Menyediakan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial
6. Pengendalian lingkungan hidup

Penelitian di atas, menunjukkan keberadaan Babinsa sebagai aparatur yang mempunyai fungsi pendataan potensi wilayah dan aspek lain yang berhubungan dengan kondisi ekonomi, sosial masyarakat tidak dilibatkan dalam pengelolaan tata kota, termasuk dalam penyusunan perda. Hal ini memberikan fakta bahwa tidak semua potensi aparatur digunakan, sehingga selalu melakukan kerja ulang dengan membutuhkan dana dan waktu yang lebih banyak, serta kemungkinan bias informasi karena dilakukan pengumpulan data dalam waktu yang terbatas

Kayana (2011) melakukan penelitian dengan judul "Pengorganisasian Perencanaan Desa: Kajian Desa Kolongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Kolongsawah yang banyak tidak terserap dalam Musrenbangdes. Tujuan kajian ini adalah :

1. Untuk memperoleh pengetahuan faktual berupa penjelasan pengorganisasian mengenai pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes (TPM), pembentukan Tim Pemandu Musyawarah Desa oleh TPM, dan Persiapan teknis pelaksanaan Musyawarah Desa di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
2. Untuk memberikan informasi yang objektif tentang kajian desa secara partisipatif dan dialogis di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Penelitian didesain sebagai penelitian kualitatif, dengan cara melakukan pengamatan yang mendalam serta melakukan desain pemikiran untuk menghubungkan satu temuan dengan temuan lain serta didukung dengan konsep teori yang ada. Simpulan yang dirumuskan penelitian ini adalah :

1. Pengorganisasian Musrenbang desa mulai dari pembentukan TPM Desa, Tim Pemandu/Kelompok Kerja, persiapan teknis pelaksanaan musyawarah dan kajian desa secara partisipatif dan dialogis tidak dilaksanakan secara optimal.
2. Dokumen yang dihasilkan Musrenbangdes 2010 merupakan rekayasa ulang dari data sebelumnya, dalam arti tidak diadakan musrenbangpun laporan dapat dibuat.

Permasalahan pertama di atas menjadi cikal bakal permasalahan dalam proses lanjutan Musrenbangdes. Seringkali kerja yang pada dasarnya berasal dari temuan kondisi faktual di masyarakat dikaburkan dengan rencana kerja yang telah dipersiapkan oleh pemerintah desa. Akhir dari kesalahan dalam seluruh proses ini adalah Musrenbangdes muncul sebagai rutinitas, tidak memberikan nilai yang bermakna, karena hanya mengulang hasil pada periode sebelumnya.

Temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kayana (2011) bahwa peran Babinsa tidak terlihat dalam Musrenbangdes. Peneliti tidak menjadikannya sebagai responden, begitu juga dengan keterlibatannya dalam Musrenbangdes tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa potensi aparaturnya yang mengetahui kondisi sumberdaya dan permasalahan yang ada di wilayah terkait tidak dilibatkan. Kondisi ini secara otomatis menyebabkan hasil dari Musrenbangdes tidak bersifat menyentuh akar permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Tiga penelitian terdahulu di atas mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu bagaimana merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, dalam makna dapat menyentuh permasalahan ekonomi dan sosial dengan tepat. Kebijakan bukan sebatas kemampuan berpikir, tetapi diperlukan relevansi antara kebutuhan masyarakat, potensi dan permasalahan sosial yang ada di masyarakat, sehingga kebijakan yang dirumuskan akan dapat mengatasi permasalahan dasar masyarakat. Masyarakat tidak secara terus menerus berada pada permasalahan yang sama pada setiap periode. Penggunaan potensi aparatur negara yang mengetahui informasi, mempunyai data potensi dan permasalahan ekonomi dan sosial dari suatu wilayah sangat diperlukan. Uraian spesifikasi penelitian ini diberikan pada setiap pembahasan hasil penelitian terdahulu yang memberikan gambaran perbedaan dan persamaan riset yang akan dilakukan.

Penelitian Iqbal (2008) memberikan temuan bahwa ada bias sasaran dari kebijakan BLT. Temuan ini memberikan pertimbangan yang lebih mendukung bahwa dalam perumusan kebijakan publik sangat diperlukan pengelolaan informasi. Fakta yang ada dalam setiap kebijakan selalu dilakukan pengumpulan data ulang, lebih pada kegiatan insidental, satu sisi ada aparatur negara yang mempunyai fungsi dalam pengelolaan informasi di setiap desa, yaitu Babinsa. Kajian ini fokus pada analisis peran Babinsa dalam memberikan informasi atau peran aktif dari organisasi publik lain dalam menggunakan hasil kerjanya pada setiap perumusan kebijakan publik.

Penelitian Kayana (2011) juga memberikan pembuktian bahwa informasi sangat dibutuhkan pada perumusan kebijakan, terutama informasi mengenai kebutuhan

masyarakat pada setiap bentuk pembangunan. Penelitian yang akan dilakukan memberikan salah satu alternatif pemecahan masalah terkait dengan pentingnya informasi pada setiap kebijakan publik. Babinsa mempunyai fungsi dalam suatu desa untuk menghimpun informasi SDM, SDA, SDB, permasalahan sosial, ekonomi dan aspek lain yang ada di suatu desa. Pengkajian bagaimana menggunakan peran Babinsa oleh setiap organisasi publik, termasuk pada saat Musrenbang menjadi sangat penting. Konteks ini juga memberikan dasar kerja koordinasi antar fungsi yang ada dalam sistem pemerintahan, bukan bekerja hanya untuk kepentingan organisasi secara vertikal.

Kebiasaan dalam kerja organisasi publik di Indonesia adalah kebijakan publik dikaji, dirumuskan dan diimplementasikan hanya dalam internal organisasi dan lintas organisasi secara vertikal. Penting untuk mengetahui adanya organisasi publik lain atau fungsi aparatur tertentu yang mempunyai pekerjaan khusus, terkait dengan informasi yang ada pada suatu wilayah. Pekerjaan rutinitas dari aparatur dalam menghimpun informasi akan jauh lebih banyak dan lengkap, jika dikaitkan dengan kerja pengumpulan data potensi dan permasalahan pada suatu wilayah dengan kerja insidental. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pembuktian bahwa Babinsa menjalankan salah satu fungsinya atau tidak dalam menghimpun informasi, bagaimana kerja aktual dalam pemanfaatannya sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan publik, khususnya terkait dengan kebijakan untuk memecahkan permasalahan mendasar, berupa ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai dasar pembuktian bahwa informasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik sangat dibutuhkan agar bersifat tepat sasaran, baik

pada bentuk kebijakan dan subyek penerima kebijakan. Penelitian terdahulu yang ditampilkan menjadi dasar yang kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan yang fokus pada pengelolaan informasi dalam pengambilan kebijakan publik oleh organisasi publik.

Penelitian Iqbal (2008) fokus pada implementasi kebijakan publik, kebijakan telah dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis kemanfaatan dari kebijakan BLT dalam memecahkan permasalahan kemiskinan. Penelitian yang akan dilakukan bukan pada implementasi kebijakan, tetapi bagaimana organisasi publik di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara dalam menggunakan informasi yang dimiliki Babinsa sebagai personal yang mempunyai fungsi pengelolaan informasi potensi ekonomi (SDM, SDA dan SDB) serta ragam permasalahan ekonomi dan sosial yang ada di tingkat terbawah masyarakat. Babinsa dalam pelaksanaan tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga dapat dinyatakan sebagai kantong informasi kebutuhan masyarakat.

Penelitian Kayana (2011) mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu pentingnya informasi dalam pembangunan. Perbedaannya terletak pada telaah sumber informasi. Penelitian yang akan dilakukan fokus pada peran dari Babinsa sebagai personal yang memiliki informasi dan bagaimana organisasi publik memanfaatkannya. Arah kajian ini bukan hanya pada saat Musrenbang, tetapi dalam seluruh proses kerja yang dijalankan organisasi publik di wilayah penelitian melibatkan personal yang memiliki informasi, baik saat perumusan kebijakan, selanjutnya implementasi hasil, pendampingan dan evaluasi kebijakan.



Organisasi publik perlu mulai berbenah, koordinasi sangat perlu dijalankan antar organisasi publik yang ada, tidak ada lagi konsep bahwa keberhasilan satu aspek menjadi keberhasilan satu organisasi publik. Penegasan ini diperlukan, untuk menghindari biaya mahal dalam setiap proses perumusan kebijakan, bias informasi dan akhirnya masyarakat tetap terkungkung dalam permasalahan kemiskinan, rendah pendidikan dan rendah kesehatan.

Adanya permasalahan implementasi kebijakan perlu ditampilkan penelitian terdahulu yang melakukan kajian mengenai implementasi kebijakan publik. Triyuni (2008) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Jembrana Bali”. Penelitian ini mengkaji terapan komponen-komponen yang ada dalam model Edward III pada implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Jembrana Bali. Komponen yang ada dalam model Edward III, terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Temuan dalam penelitian ini bahwa masih belum optimalnya peran faktor komunikasi dan sumber daya, khususnya menyangkut aspek peran birokrasi dalam mengkomunikasikan program-program pendidikan kepada masyarakat, walaupun keberhasilan program ini bukan hanya ditunjang oleh peran pemerintah tetapi perlu partisipasi masyarakat. Komponen tersebut lebih dibutuhkan pada program-program yang bersifat jangka panjang, karena memerlukan pemahaman lebih mendalam oleh aparat birokrasi dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan layanan pendidikan.

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan publik oleh Babinsa, bukan dari kerja kesatuannya (TNI), tetapi bagaimana Babinsa dilibatkan dalam implementasi kebijakan publik (organisasi publik lain, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan dinas lain yang berhubungan dengan kerja yang dilakukan Babinsa pada wilayah teritorialnya). Penelitian yang akan dilakukan dipastikan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tryuni (2008), karena organisasi yang dikaji adalah organisasi terkait yang merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Berbeda dengan penelitian ini, bagaimana Babinsa dilibatkan oleh organisasi publik lain dalam implementasi kebijakan publik sama dengan kajian untuk perumusan kebijakan publik, terkait dengan pelibatangannya melalui potensi informasi yang dimilikinya.

Penelitian yang akan dilakukan pada dasarnya lebih banyak pada perumusan kebijakan publik, sementara implementasi kebijakan hanya sebagai tambahan untuk melihat keterlibatan Babinsa dalam pelaksanaan kebijakan publik di desa atau kelurahan. Konteks ini tetap pada konsep pelibatan, bukan sebagai wujud dari kebijakan publik satuan kerjanya sendiri (satuan kerja TNI). Perumusan kebijakan dapat dinyatakan sebagai aspek penting dari kebijakan publik, karena akan menentukan hasil atau capaian dari kebijakan publik tersebut. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian Susilawaty (2007) yang berjudul "Analisis Kebijakan Publik dalam Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Tasikmalaya".

Penelitian di atas memberikan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja di Kota Tasikmalaya belum bersifat menyeluruh,

karena belum dirumuskan dalam kebijakan pemerintah. Implementasi yang dijalankan hanya berupa pelaksanaan program Jamsostek, sementara kebutuhan atas keselamatan dan kesehatan kerja sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Perumusan kebijakan publik menjadi acuan dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan, sehingga penelitian ini fokus pada pelibatan semua potensi dalam merumuskan kebijakan publik. Dalam perumusan kebijakan publik tidak hanya melibatkan internal organisasi publik, tetapi seluruh potensi yang ada.

Fakta yang ada, perumusan kebijakan publik oleh organisasi publik seringkali hanya memperhatikan potensi atau sumber daya internal, sehingga implementasi kebijakan yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak tepat sasaran. Kebijakan publik yang berjalan di masyarakat tidak saling menimbulkan pelipatan makna (*multiflier effect*), bahkan dapat saling membiaskan. Koordinasi antar organisasi publik sangat diperlukan, guna mempercepat penuntasan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan juga akan memberikan perhatian pada sikap dari Babinsa (bagian dari sumber daya TNI) dalam memberikan bantuan, baik pada tahap perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pada organisasi publik yang mempunyai sasaran kebijakan publik di desa pada wilayah kerja Kodim 1606/Lombok Barat.

Penelitian yang berupaya untuk menemukan model yang tepat pada implementasi kebijakan dilakukan oleh Muhdi (2012), dengan judul “Model Implementasi Kebijakan Pendidikan Kota Semarang pada Era Otonomi Daerah”. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan model implementasi kebijakan pendidikan di era otonomi daerah di Kota Semarang. Konsep penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang

menggunakan acuan model tertentu secara teori, dengan upaya untuk menemukan komponen dalam model (teori) telah dijalankan atau tidak.

Temuan dalam penelitian ini adalah model yang dapat diterapkan untuk mempercepat penuntasan masalah pendidikan di Kota Mataram berupa model implementasi interaktif, partisipatif, fungsi manajemen dan *good governance*. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan perlunya penyerapan dari ragam model yang ada, bukan hanya dengan menggunakan satu model. Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa upaya untuk menggunakan sumber daya dari organisasi publik lain sangat diperlukan, bukan hanya menggunakan sumber internal. Model Edward III hanya menjelaskan sumber daya internal sebagai pendukung kebijakan publik yang akan dilaksanakan. Seyogyanya, perhatian pada sumber daya organisasi publik lain diperlukan, sehingga kebijakan publik yang diarahkan pada masyarakat mempunyai manfaat berganda, dari adanya kebijakan publik yang telah ada di masyarakat tersebut dari organisasi publik lainnya.

Ragam penelitian terdahulu di atas dapat dipastikan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, karena fokus kajian pada peran Babinsa dalam perumusan kebijakan publik serta implementasi dan evaluasi. Peran tersebut sebagai wujud pelibatan oleh organisasi publik lainnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya hanya memberikan perhatian pada pengelolaan sumber daya untuk perumusan dan implementasi kebijakan pada internal organisasi publik lainnya.

## 2. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan secara umum mempunyai makna lebih operasional dari strategi, setidaknya dilihat dari pengertian yang diberikan Supriyono (1996:274), sebagai penjabaran strategi induk dan substrategi pada tindakan yang akan diambil, tentu dengan dasar pertimbangan atau analisis yang mendalam. Analisis yang biasa dilakukan adalah analisis potensi internal dan kelemahannya, serta kondisi eksternal berdampak pada pembentukan keuntungan atau kerugian. Dalam konteks pemerintahan dapat dimaknai sebagai kondisi yang menstimulus tindakan yang dipilih dapat lebih diperlancar atau sebaliknya dihambat dari realisasi tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan sesuai uraian tersebut tidak lepas dengan kondisi internal perumus (badan) dan kondisi eksternal atau dapat dinyatakan sebagai hasil penyesuaian kondisi internal dan eksternal badan. Makna ini sejalan dengan pengertian yang diberikan Fiedrick dalam Kismartini dkk. (2005:1) sebagai “serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Kebijakan dapat dipastikan untuk memecahkan permasalahan atau untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka pendek ataupun jangka panjang.

Kebijakan (*policy*), jika dihubungkan dengan proses perencanaan dan pengendalian, maka dapat dikategorikan sebagai tahap perumusan program, anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam konteks ini lebih mendekati bagaimana proses perumusan kebijakan,

pelaksanaan, dan evaluasi dijalankan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Konsep ini mengacu pada pengertian kebijakan yang diberikan Laswell dan Abraham dalam Kismartini dkk. (2005:1), yaitu “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik yang terarah”. Dapat dipastikan dalam setiap kebijakan terdapat program yang akan dijalankan, biaya yang dianggarkan serta adanya tujuan yang ditetapkan.

Robinson dan Pearce (1997:20) memposisikan kebijakan sama dengan strategi operasional atau strategi yang dilaksanakan oleh setiap fungsi atau departemen sebagai wujud implementasi dari perencanaan strategis. Konsep ini perlu diberikan agar kebijakan tidak disamakan dengan strategi secara umum atau dapat lebih memahami definisi yang diberikan Amara dalam Kismartini dkk. (2005:1) dengan memasukkan kata strategi, lengkapnya definisi kebijakan yang diberikan adalah “suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan”. Strategi dalam definisi tersebut bukan dalam makna luas, tetapi dalam makna strategi operasional.

Suharto (2005:7) mendefinisikan kebijakan sebagai “cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan dalam pengambilan keputusan”. Kebijakan dapat dijadikan sebagai pedoman operasional dari pemerintah atau rekanan atas penyelesaian atau pengerjaan suatu aspek untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan tertentu.

Guna mempermudah memaknai kebijakan, Kismartini dkk. (2005:1) membuat simpulan dari beberapa definisi yang yang dirumuskan para ahli, bahwa dalam makna kebijakan terdapat makna atau komponen sebagai berikut :

1. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

2. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Rancangan yang dihasilkan telah berupa program dan proyek-proyek.
3. Usulan tindakan dapat berasal dari perorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan.
4. Terdapat penyediaan input, berupa sumber daya manusia maupun bukan manusia.

Konteks terakhir tersebut memberikan penegasan dalam kebijakan juga terdapat anggaran dana untuk dapat memperoleh sumber daya yang memadai dalam melaksanakan program agar hasil kerja yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Uraian ini telah cukup untuk memahami kebijakan, selanjutnya adalah makna publik.

Publik mempunyai makna masyarakat umum, kepentingan orang banyak, berpihak pada masyarakat dan makna lain yang lebih fokus pada masyarakat luas. Negara bukan mempunyai makna publik, karena dalam perkembangan seringkali tidak terjadi sinkronisasi antara apa yang dijalankan oleh negara bersesuaian dengan pemenuhan keinginan masyarakat. Implikasi dari konsep publik adalah tidak ada konsep dan tindakan diskriminasi, sehingga kegiatan aktual, pelayanan yang diterima masyarakat berjalan dengan konsep keadilan dan pemecahan masalah secara terus menerus sehingga tercipta kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik.

Makna kebijakan dan publik telah diberikan, selanjutnya perlu diberikan definisi mengenai kebijakan publik. Kebijakan publik dalam persepsi yang dibangun dalam penelitian ini adalah berupa program kerja yang mendapatkan perhatian aktual dari pemerintah untuk dilakukan dengan wujud alokasi anggaran dan alokasi sumber daya lainnya (sumber daya manusia/SDM, sumber daya alam/SDA dan sumber daya buatan/SDB) untuk memecahkan permasalahan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan

masyarakat secara umum dalam aspek ekonomi dan sosial. Persepsi peneliti terlebih dahulu diungkapkan, selanjutnya diberikan dasar penetapan sesuai dengan konsep yang dibangun oleh para pakar.

Kebijakan publik dapat didefinisikan dari pendapat Lindblom dalam Wahab (2004:2) sebagai :

*An extreme complex, analitical and political process to which there is no beginning or end, and boudaries of which are most certain, somehow a complex set af forces that we call policy making all taken together, produces effects called policies* (suatu proses yang sangat kompleks yang bersifat analitis dan politis yang tidak mempunyai awal dan akhir dan batas-batas dari proses tersebut pada umumnya tidak pasti, kadangkala rangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks yang disebut pembuatan kebijakan yang menghasilkan suatu akibat dinamakan juga kebijakan).

Definisi kebijakan publik ini memberikan kondisi faktual dari suatu kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah dengan prosedur dan sistem yang kompleks. Pada pemerintahan Indonesia, baik di pemerintahan daerah atau pusat, perumus kebijakan (pemerintah) harus melakukan koordinasi dengan DPR/DPRD sebagai kumpulan konteks politik. Suatu program anggaran yang tepat dan berimplikasi pada pemecahan masalah terkadang menjadi buntu, karena kekuatan lain dalam konteks politik. Hal ini yang menyebabkan kebijakan publik menjadi kompleks, rumit, dan birokratis.

Muatan intelektualitas dalam prakteknya melekat dalam kebijakan (termasuk kebijakan publik) seperti pernyataan Dunn (2003:1) terkadang bias dengan adanya kekuatan lain, seperti yang dimaksud dalam definisi tersebut. Kebijakan publik yang dirumuskan dengan cepat oleh pejabat negara, untuk mengatasi permasalahan yang sifatnya mendesak, terkadang mendapatkan tantangan dari kekuatan yang ada dalam sistem.



Kebijakan publik oleh Dye dalam Kismartini dkk. (2005:1) relatif mempunyai makna yang sama, yaitu :

Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundangan atau dalam pernyataan kebijakan (*policy statement*) yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik serta pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Berdasarkan definisi tersebut, maka kebijakan publik muncul sebagai alternatif dari suatu tindakan aktual, bahkan termasuk tidak melakukan suatu tindakan. Artinya adalah memilih dari suatu kegiatan, dengan tidak memilih kegiatan tertentu dan alternatif lain yang dikerjakan merupakan suatu kebijakan. Konteks tersebut sangat berisiko untuk dinyatakan kebijakan, tanpa ada alokasi dari sumber daya atau nilai guna untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi.

Smith (2003:8) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “

*A proposed course of action of a person, group or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose* (sebuah usulan kegiatan atau aksi yang diusulkan individu (aparatur negara atau kelompok atau pemerintah) dalam lingkungan yang meliputi hambatan dan kesempatan, melalui penggunaan nilai dan hasil yang diusahakan untuk memecahkan masalah dan pencapaian tujuan).

Zheng Wu *et al.* (2005:1) menegaskan bahwa usulan kegiatan dan aksi tersebut harus mengalami perubahan secara terus menerus, karena adanya perubahan kondisi, baik perubahan tuntutan dari masyarakat serta kondisi lingkungan eksternal yang melingkupinya. Artinya kebijakan publik yang baik dalam suatu pemerintahan yang berbeda perlu dilakukan penyesuaian, agar dapat lebih efektif dalam mewujudkan tujuan.

Rasheed (2000:1) memberikan penegasan bahwa perhatian atau kebutuhan masyarakat menjadi penting dalam perumusan kebijakan publik. Praktek yang terarah dari kebijakan publik sangat penting, karena semakin sadar masyarakat atas haknya, maka tuntutan atas kualitas kebijakan publik menjadi semakin besar. Definisi kebijakan publik menurut Kismartini dkk. (2003:9) menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat” perlu mendapatkan telaah lebih lanjut. Definisi tersebut hanya dapat berlaku dalam pemerintah yang otoriter atau tidak menerapkan demokrasi dengan baik. Peningkatan nilai dalam kebijakan publik harus dapat diterima oleh masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung.

Kebijakan publik untuk lebih jelasnya perlu diberikan informasi mengenai pendekatan peningkatan konsep, selanjutnya memberikan penjelasan mengenai kondisi lingkungan, fokus perhatian, dan tantangan, berikut penjelasan yang diberikan Kwon dan Matheson (2003:12) :

1. *Environtmental; hight uncertainty and risk, partnership among government, business, civil society, globalisation, pressure for credibility and predictability.*
2. *Main focus; governance arrangement, policy focus, incentives for effectiveness, joined up, citizens focus, integration, coordination (vertical, horizontal), outcomes focus, longer term focus, mulyt purpose ministry, cross-cutting issues, risk managemen and innovation.*
3. *Challenges; how to balance different approaches/values, capacity-building for adaftation to emerging challenges, creating new partnership among stakeholders*

Kebijakan publik dalam pendekatan pengembangan, ternyata perlu dibina kerjasama bukan hanya antar organisasi publik (termasuk personal atau aparatur negaranya), tetapi

juga terkait dengan masyarakat dan pelaku bisnis. Arti pentingnya adalah semua pihak perlu dilibatkan, sehingga sumber daya dikelola semaksimal mungkin (wujud kerja integrasi dan koordinasi), sehingga nilai yang dihasilkan dalam memecahkan masalah masyarakat semakin tinggi.

Upaya untuk mencari kerjasama oleh pemerintah sangat ditekankan dalam menjalankan kebijakan publik. Aspek penting lain yang perlu diperhatikan, dengan melihat fenomena dalam kehidupan sosial masyarakat adalah mencari solusi pendekatan suatu masalah dengan terapan yang relatif tidak berbeda antar alternatif pendekatan yang berkembang dalam masyarakat. Masyarakat pada periode akhir ini seringkali menunjukkan perilaku yang melawan kebijakan publik, bahkan dengan cara membuat alternatif tandingan. Dapat dilihat pada kasus Prita, koin untuk membayar denda yang ditetapkan oleh hakim, terakhir koin untuk pembangunan kantor KPK dan ragam lain perlawanan masyarakat atas kebijakan publik yang diputuskan oleh pemerintah. Informasi ini telah menjadi publikasi umum dalam berbagai media.

Suharno (2007:13) membedakan jenis kebijakan publik, sebagai berikut :

1. Kebijakan substansif; kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan pemerintah.
2. Kebijakan prosedural; bagaimana kebijakan substansif dapat dijalankan.
3. Kebijakan distributif; menyangkut distribusi manfaat pada masyarakat atau individu
4. Kebijakan re-distributif; kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
5. Kebijakan material; kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran.
6. Kebijakan simbolis; kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

7. *Public good*; kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik

Pemerintah sebagai pelaku utama kebijakan publik, karena sebagai pengelolaan kekayaan negara perlu berupaya semaksimal mungkin untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran dan dilakukan dengan prosedur yang tepat pula serta alokasi sumber daya yang optimal. Terwujudnya hal tersebut, maka informasi atas permasalahan substansial masyarakat sangat diperlukan, sehingga kebijakan yang muncul dapat bersifat tepat sasaran.

### 3. Model Kebijakan Publik

Kebijakan publik diselenggarakan oleh pemerintah, dalam prakteknya menjadi domain usulan dan pelaksanaan organisasi publik. Kerangka sistem pemerintahan Indonesia ada kerja koordinasi dengan legislatif (DPR untuk kebijakan publik pemerintah pusat dan DPRD untuk kebijakan publik pemerintah daerah), dalam praktek pelaksanaannya dapat membangun kerjasama dengan pihak lain (swasta). Syafi'i (2008:87) menyatakan bahwa prosesnya meliputi siklus perumusan formulasi, implemmentasi dan evaluasi kebijakan.

Terdapat enam model dalam perumusan kebijakan publik, yaitu model kelembagaan, model kelompok, model elite, model rasional, model inkremental dan model sistem (Dye dalam Syafi'i, 2008:89). Model kelembagaan dalam kebijakan publik dipandang sebagai kegiatan lembaga pemerintah (*institutional policy as institutional activity*). Terapan kebijakan publik berdasarkan model kelembagaan ditetapkan, disahkan, dilaksanakan dan dipaksakan pemberlakuannya oleh lembaga pemerintah yang

berlangsung. Ada hubungan yang kuat antara kebijakan publik dengan lembaga pemerintahan secara formal.

Model kelembagaan, kebijakan publik dinyatakan sebagai kebijakan negara, terdapat tiga cirinya (Syafi'i, 2008:90), yaitu :

1. Pemerintah memberikan legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan di mana kebijakan pemerintah pada umumnya di pandang sebagai kewajiban secara hukum dan dipatuhi oleh masyarakat.
2. Kebijakan pemerintah bersifat universal; bersifat umum dan menjangkau semua lapisan masyarakat.
3. Pemerintah mempunyai hak monopoli untuk memaksa semua anggota masyarakat patuh terhadap suatu kebijakan dan memberikan sanksi bagi yang melanggar kebijakan.

Kebijakan publik dalam model kelembagaan lebih dekat dengan makna mengikat masyarakat, tidak fokus pada manfaat dari kebijakan tersebut sebagai pemecah masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Model kelembagaan lebih dekat sebagai pendekatan dengan ilmu politik (Syafi'i, 2008:90).

Model kebijakan publik yang menjadikan masyarakat sebagai pusat perhatiannya diberikan oleh model kelompok (*group theory*). Kebijakan publik dalam model kelompok, dinyatakan sebagai hasil keseimbangan kelompok (*policy as group equilibrium*). Interaksi antar kelompok dalam masyarakat sebagai pusat perhatian kebijakan publik. Makna dalam kelompok ini dapat bersifat formal dan informal, yang tercipta dari kesamaan kebutuhan dan disuarakan atau dituntut pada pemerintah. Syafi'i (2008:91) menyatakan bahwa "*a share-attitude group that makes certain claims upon other group in the society*" (suatu

kelompok yang mempunyai sikap-sikap yang sama dalam mendesak tuntutan mereka terhadap kelompok lain dalam masyarakat).

Kebijakan publik dalam pendekatan model kelompok mempunyai pemikiran inti bahwa perumusan kebijakan harus menciptakan keseimbangan antar kelompok, sehingga kebijakan yang muncul pada periode sekarang dapat memecahkan masalah masyarakat dengan lebih baik, begitu juga dengan periode lanjutannya akan dapat lebih efektif dalam memecahkan masalah masyarakat. Hal ini dapat terjadi jika perumusan kebijakan publik mengetahui permasalahan mendasar yang ada di masyarakat, perilaku masyarakat serta sumber daya yang dapat digerakkan untuk mempercepat pemecahan masalah masyarakat.

Kebijakan publik dalam pendekatan model kelompok mempunyai pemikiran bahwa kebijakan publik yang dirumuskan akan selalu mengalami perbaikan. Masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan publik mempunyai daya dalam memperjuangkan kepentingan kelompoknya, sehingga kemungkinan konflik dapat terjadi. Pemerintah harus berupaya untuk melakukan penyeimbangan dengan mengatur kompromi atas kepentingan kelompok (Syafi'i, 2008:92).

Era demokrasi di Indonesia, peran legislatif yang terdiri atas berbagai latar belakang politik dan kepentingan yang diwakili (masyarakat) mengharuskan pemerintah mempunyai kemampuan dalam melakukan tawar menawar, kompromi, dan negosiasi (Santoso, 2010). Membiasnya tidak dengan cara melakukan negosiasi, kompromi dan tawar menawar, maka sangat diperlukan aturan dalam memperjuangkan kepentingan kelompok. Praktek perumusan kebijakan di Indonesia dengan ciri ragam budaya, kelompok, dan daerah sangat

rentan dengan perilaku yang tidak baik dalam mendapatkan perhatian pemerintah atas suatu kebijakan publik.

Suatu model dalam kajian ilmu pengetahuan merupakan cerminan dari konsep teori dan subyek yang menjadi perhatian, sehingga muncul bentuk terapan yang berbeda. Model elit memberikan gambaran pihak yang berada tersebut dengan jumlah yang kecil, sebagai penguasaan atau penentu kebijakan dan banyak masyarakat sebagai pihak yang diatur. Konsep penting dari model ini adalah adanya pemekaran bahwa terapan kebijakan publik selama ini tidak bersifat merata. Kebijakan publik dapat saja bukan cerminan dari tuntutan masyarakat, tetapi ditentukan oleh masyarakat yang perannya sebagai penguasa (Santoso, 2010).

Asumsi dalam model elit kebijakan publik (Syafi'i, 2008:93) sebagai berikut :

1. Masyarakat terbagi dalam dua bagian, yaitu masyarakat dengan jumlah yang sedikit serta memiliki kekuasaan dan masyarakat banyak, tetapi tidak mempunyai kekuasaan.
2. Kelompok elit mempunyai kekuasaan dan menguasai perekonomian masyarakat
3. Perubahan posisi kelompok non elit menjadi elit sangat sulit terjadi
4. Kelompok elit berupaya untuk menjaga sistem atau kelas sosial tersebut
5. Kebijakan publik sering mencerminkan keinginan kelompok elit
6. Pengaruh rakyat atau kelompok besar sangat kecil

Kondisi ini dapat tergambar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Para elit berada di berbagai sektor penting, sehingga kekuasaan untuk merealisasikan kebijakan publik selalu melewati seleksinya. Eksekutif dan legislatif di Indonesia, merupakan kelompok elit, jika berasal dari masyarakat banyak, maka akan berubah menjadi kelompok elit dan akan berupaya untuk mengamankan posisinya. Kondisi yang sangat parah adalah

pihak yang dijadikan rekanan atau mitra yang berasal dari masyarakat oleh pemerintah juga berasal dari elit, sehingga prakteknya masyarakat hanya menjadi pekerja atas kebijakan publik tersebut.

Spesifik kewarganegaraan kelompok elit dalam model tersebut tidak diberikan penjelasan karena fakta yang ada penguasa perekonomian di Indonesia bukan hanya elit WNI, tetapi juga elit WNA (baik dalam konteks individu atau badan). Apabila rancangan kebijakan politik mengedepankan elit non WNI, maka dapat dipastikan bahwa manfaat kebijakan publik akan bersifat minim dan akan menyebabkan *gap* kondisi sosial ekonomi antara kelompok elit dan non elit yang semakin tinggi.

Model rasional (*rationalism*) yaitu model yang memberikan perhatian atas formulasi kebijakan publik secara efisien. Model ini menegaskan bahwa dalam mewujudkan tujuan tertentu yang ditetapkan dengan cara efisien (*policy as efficient goal achievement*). Efisiensi mempunyai makna maksimalisasi pencapaian tujuan dengan anggaran tertentu atau pencapaian tujuan dengan biaya yang minimal. Manajemen efisiensi dinyatakan maknanya sebagai “mengerjakan sesuatu dengan benar” (Handoko, 2000:51). Penting bagi pihak perumus kebijakan untuk mencari alternatif kebijakan yang terbaik, dengan memperhatikan aspek tujuan dan beban biaya yang dikeluarkan.

*Less cost* (rendah biaya) perlu menjadi perhatian, bukan dalam makna mengurangi anggaran. Anggaran diupayakan sebesar-besarnya untuk kebijakan publik, tetapi yang menjadi penekanan adalah pencapaian hasil atau pewujudan tujuan yang sebesar-besarnya, jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Konteks ini relevan dengan konsep otonomi



daerah, yaitu *more welfare* dan *less cost*, dari setiap strategi dan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah (Osborne dan Plastrik, 1997).

Beberapa catatan penting yang diberikan Syafi'i (2008:94) atas model rasional dalam kebijakan publik agar dapat terwujud tujuan dengan maksimal :

1. Pembuat kebijakan harus termotivasi untuk mencapai tujuan maksimal, bukan tujuan kekuasaan, status dan lainnya.
2. Pembuat kebijakan termotivasi atas tujuan dan kemajuan, dalam makna kemajuan kesejahteraan masyarakat.
3. Anggaran atau investasi yang besar tetap dengan upaya untuk mencari alternatif kebijakan yang terbaik.
4. Analisis alternatif sudah pasti dilakukan dengan analisis informasi manfaat dan risiko dari keputusan terkait.
5. Diperlukan kemampuan proyeksi atas hasil dari setiap kebijakan publik yang menjadi pilihan.
6. Diperlukan pendekatan untuk melakukan analisis biaya dan manfaat

Menyimak uraian tersebut pada dasarnya bentuk pernyataan negatif dari kritik atas merupakan model kebijakan publik rasional. Suatu kritik harus diupayakan untuk menjadi pernyataan positif, karena setiap model pada dasarnya mempunyai kelemahan, tetapi perhatian organisasi publik dan pihak lain yang terlibat dalam memperhatikan sinkronisasi biaya dan pencapaian tujuan sangat penting pada setiap kebijakan publik. Pencapaian tujuan yang dimaksud adalah pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat atau kebijakan lain yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Model inkremental merupakan kebijakan publik yang mendasarkan diri pada upaya untuk selalu melakukan perbaikan dan peningkatan serta relatif tidak fokus pada upaya untuk peninjauan atas kebijakan yang telah dirumuskan (Santoso, 2010).

Model ini dapat dinyatakan sebagai kritik dari model kebijakan rasional.

Pertimbangan dari model inkremental adalah (Syafi'i, 2008:95):

1. Tidak mempunyai waktu, intelektualitas dan biaya untuk melakukan penelitian dan temuan atas nilai sosial masyarakat.
2. Keraguan atas hasil dari kebijakan yang tidak pernah dibuat atau dirumuskan sebelumnya.
3. Adanya hasil dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan.
4. Menghindari konflik dalam proses negosiasi kebijakan baru.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditemukan bahwa suatu model juga muncul dari upaya untuk memberikan perbaikan atas model sebelumnya, dengan pemikiran bahwa model yang diajukan lebih mendekati konsep dari kebijakan publik dalam memecahkan permasalahan masyarakat dan kondisi aktual dari faktor penentunya. Model berikutnya adalah model sistem, memberikan penegasan bahwa kebijakan publik terbentuk dari suatu kombinasi sub sistem, proses dan output (Santoso, 2010). Model ini dapat digunakan sebagai dasar dalam mendekati kebijakan publik dengan menggunakan potensi Babinsa. Input terkait dengan kondisi informasi, sumber daya alam dan sumber daya lain yang dijadikan sebagai penentu kebijakan publik yang akan diambil. Tentu model ini akan dikombinasikan dengan model lain dengan melakukan seleksi muatan positif dari setiap kebijakan publik.

Model kebijakan publik lain yang dapat diberikan dalam kajian ini adalah model proses. Model proses lebih memperhatikan bagaimana kebijakan publik dirumuskan. Santoso (2010) mengidentifikasi tahapan proses pembentukan kebijakan publik, sebagai berikut :

1. Identifikasi/pengenalan masalah

2. Perumusan agenda
3. Formulasi kebijakan
4. Adopsi kebijakan
5. Implementasi kebijakan
6. Evaluasi kebijakan

Model ini memberikan perhatian pada bagaimana proses kebijakan publik dirumuskan. Hubungannya dengan kebijakan publik di Indonesia, maka ada desain dan proses yang dijalankan, karena ada hubungan kerja antar organisasi publik. Kebijakan dari organisasi publik harus mendapatkan persetujuan dari DPR, tahapnya terjadi pada awal periode anggaran sesuai dengan KUA (Kebijakan Umum Anggaran), di mana tertera bentuk kebijakan, jenis kegiatan, dan tujuan yang dicapai (Bastian, 2006:260).

#### **4. Pentingnya Kebijakan Publik**

Rakyat atau masyarakat merupakan obyek dan subyek dari kebijakan publik, dalam makna sebagai pelaku dari alternatif kebijakan publik dan sekaligus sebagai obyek yang akan diselesaikan permasalahannya. Kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan rendah, kesehatan yang buruk dan lainnya merupakan suatu kondisi yang dirasakan secara aktual oleh rakyat, peran pemerintah untuk memformulasikan kebijakan publik agar berbagai permasalahan tersebut dapat dengan cepat diselesaikan. Fakta yang ada sampai saat ini masyarakat masih dilingkupi oleh permasalahan dasar tersebut.

Mahmudi (2007:214) menegaskan bahwa aspek permasalahan dasar tersebut terdiri atas permasalahan kesehatan, pendidikan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut masih menjadi permasalahan yang melekat dalam kehidupan masyarakat, terbukti dengan banyaknya penduduk yang masih berada pada kriteria miskin.

Artinya masyarakat masih banyak pada kondisi belum mampu memenuhi kebutuhan dasar dengan baik.

Pemerintah melalui kebijakan publiknya dapat menjadi stimulan dalam mempercepat pengentasan permasalahan masyarakat, baik dengan memberikan bantuan pemilikan sumber daya, mempermudah akses, atau menerapkan peraturan tertentu. Wujud kebijakan publik yang ada secara nasional misalnya Program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM), BOS (Biaya Operasional Sekolah), Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan lainnya. Wujud lain dari kebijakan publik adalah kebijakan pembangunan berbagai aspek kehidupan masyarakat (Syafi'i, 2008).

Kebijakan publik tidak selalu bersifat memberi sumber daya pada masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung, tetapi juga melakukan pengurangan. Wujud kebijakan publik tersebut adalah pencabutan subsidi BBM, berdampak pada peningkatan harga pada berbagai aspek kebutuhan. Terdapat berbagai ragam kebijakan publik yang memberikan penjelasan bahwa kebijakan publik tersebut penting untuk mengatasi masalah masyarakat, bukan sebaliknya memunculkan permasalahan bagi masyarakat. Penelaahan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah sangat diperlukan agar kebijakan tersebut dipastikan mempunyai dampak yang signifikan atas pemecahan permasalahan masyarakat (Wahab, 2004:12).

Urgensi kebijakan publik sebagai ilmu pengetahuan untuk dipelajari mempunyai tiga alasan, yaitu alasan ilmiah (*scientific reason*), alasan profesional (*professional reason*)

dan alasan politis (*politic reason*) (Suharno, 2007:6). Hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Alasan ilmiah; dalam rangka memperoleh pengetahuan yang luas atas asal muasalnya, proses perkembangannya dan konsekuensinya bagi masyarakat.
2. Alasan profesional; menghimpun pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik guna memecahkan masalah sosial masyarakat.
3. Alasan politik; pemerintah mempelajari kebijakan publik dalam rangka dapat merumuskan kebijakan publik yang lebih tepat.

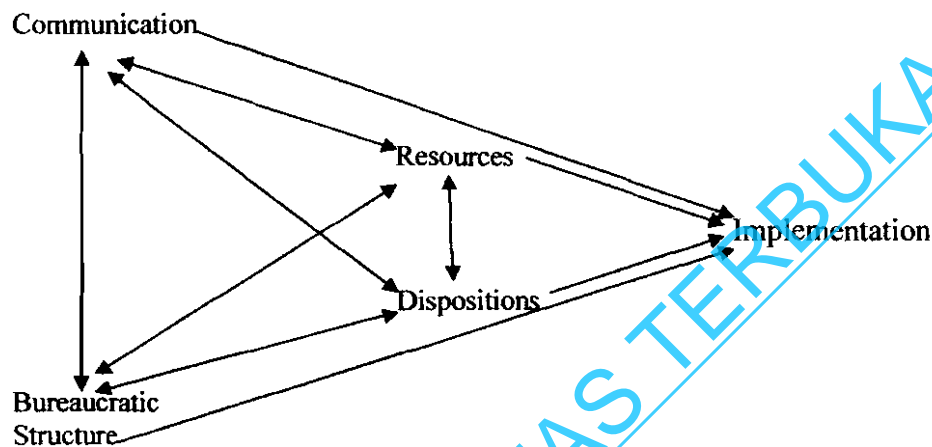
Penelitian ini masuk pada tiga kerangka alasan pentingnya melakukan kajian atas kebijakan publik. Kebijakan publik dalam pendekatan ilmiah mempunyai prosedur yang jelas, faktor yang dibutuhkan dalam analisis dan pertimbangan alternatif, sehingga perkiraan hasil dalam memecahkan permasalahan masyarakat dapat diperkirakan. Informasi permasalahan dasar, kondisi sumber daya, kondisi sosial dan lainnya perlu dijadikan input oleh pengambil kebijakan, sehingga pemanfaatan hasil kerja aparatur negara yang mempunyai fungsi terkait dapat dilakukan.

## **5. Implementasi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik telah diberikan definisi pada uraian sebelumnya, selanjutnya yang tergolong penting adalah bagaimana melaksanakan hasil dari rumusan kebijakan publik di lapangan. Implementasi kebijakan publik dapat dinyatakan sebagai tahap pelaksanaan, pewujudan tujuan dan sasaran oleh semua pihak dalam menjalankan suatu kebijakan. Impelemntasi kebijakan publik akan dapat lebih cepat dimengerti dengan menggunakan bantuan model yang telah dikembangkan oleh para ahli.

Model Edward III menjelaskan implementasi kebijakan dengan menggunakan model berikut.

Gambar 2.1. Model Edwards (1980).



Terdapat empat komponen dalam model tersebut, yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya dan disposisi. Pengelolaan empat komponen tersebut akan menentukan kualitas dari implementasi kebijakan, yang tercermin dalam hasil atau keluaran dari kebijakan terkait. Komunikasi pada prinsipnya adalah penyampaian informasi, sehingga semua pihak yang ada dalam organisasi, termasuk pelibatan pihak luar mengenai bagaimana kebijakan akan dilaksanakan dan hasil yang akan dicapai. Komunikasi dalam organisasi dan pihak luar akan dijalankan sangat tergantung pada struktur birokrasi yang dibangun organisasi terkait.

Sumber daya mempunyai makna yang luas, termasuk nilai proyek atau dana yang dianggarkan, jumlah tenaga kerja yang dilibatkan serta bagaimana menerapkan pemberian wewenang atau disposisi pada setiap jabatan, terkait dengan pelaksanaan proyek. Empat komponen yang ada dalam model tersebut dibangun dengan hubungan imbal balik, bukan

hubungan satu arah, sehingga kondisi dari salah satu komponen yang ada akan mendapatkan penyesuaian, guna terjadi keseimbangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan bukan pada internal organisasi yang merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan, tetapi bagaimana Babinsa dilibatkan dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Terjadi komunikasi dengan pihak Babinsa atau tidak pada setiap kebijakan yang ada pada desa atau kelurahan yang menjadi wilayah teritorialnya. Penerimaan alokasi sumber daya dan disposisi dari dinas terkait pada implementasi kebijakan publik, sehingga pihak eksternal ini dapat memperkuat implementasi kebijakan.

Berhubungan dengan uraian di atas, maka model implementasi kebijakan yang relevan adalah model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983). Dalam model ini terdapat tiga variabel, yaitu

- i. Variabel bebas (*independent variable*), yaitu mudah tidaknya masalah yang akan dikelola dapat dikendalikan, konteks ini memerlukan pemikiran bahwa variabel bebas hendaknya muncul dalam perspektif mudah untuk diatur atau dikelola dalam mewujudkan tujuan tertentu atau setidaknya ada peluang untuk mengendalikannya
- ii. Variabel antara (*intervening variable*), yaitu kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat
- iii. Variabel terikat (*dependent variable*), tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan.

Pelibatan faktor eksternal terletak pada variabel antara, terkait dengan kemampuan dalam menstrukturkan proses implementasi kebijakan secara tepat. Sumber daya yang diperhatikan dalam implementasi kebijakan bukan hanya sumber daya internal, tetapi juga

sumber daya eksternal, baik masyarakat ataupun potensi lain yang dapat digunakan untuk melipatgandakan pelaksanaan kebijakan, sehingga hasil yang diwujudkan akan sesuai dengan tujuan, bahkan lebih besar.

## 6. Potensi Babinsa

Potensi mempunyai arti kata yang sepadan dengan kapasitas, kekuatan, kemampuan, daya dan energi ([www.artikata.com](http://www.artikata.com), 2012). Arti kata tersebut diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, selanjutnya dapat dimaknai sebagai kemampuan dalam memberikan nilai lebih atau maksimal dari variabel tujuan atas dasar pengelolaan fungsi yang ada dari aparatur negara (berupa Babinsa). Babinsa berada dalam naungan TNI AD dengan visi :

1. Solid; setiap prajurit Angkatan Darat dan sesamanya harus menyatu dan saling membantu.
2. Profesional; melatih keterampilan taktik dan teknik kemiliteran yang berlandaskan pada jati diri TNI sebagai pejuang, Tentara Rakyat dan Tentara Nasional Indonesia.
3. Modern; Prajurit TNI AD yang memiliki sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan situasi.
4. Tangguh; Prajurit TNI AD yang berbudi luhur, mengharagai sesama manusia, membela yang lemah, pantang menyerah, berani mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat dan apa yang tidak diperbuat.
5. Berwawasan Kebangsaan; prajurit TNI AD yang tidak berorientasi pada kesukuan, agama dan golongan.
6. Dicintai Rakyat; Prajurit TNI AD harus manunggal dengan rakyat, mengingat Angkatan Darat adalah tentara rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat (TNI AD, 2011).

Berdasarkan visi tersebut dijadikan sebagai ciri dari perilaku seluruh prajurit, termasuk Babinsa. Fokus pada visi yang terakhir, maka TNI juga memosisikan diri pada upaya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, dalam konteks pemecahan masalah yang



dihadapi oleh masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Kondisi negara yang aman dan berdaulat penuh, maka perhatian penuh diberikan pada percepatan pewujudan visi yang tersebut.

Babinsa mempunyai potensi yang besar dalam mewujudkan visi yang terkait dengan dicintai rakyat dalam terapan berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Konteks tersebut dalam aspek ekonomi dan sosial atau permasalahan kebutuhan dasar masyarakat. Babinsa mempunyai lima tugas utama, salah satunya adalah menjadi sumber informasi mengenai kondisi sosial ekonomi wilayah atau lokasi tugasnya. Babinsa bertugas di tingkat desa dan kelurahan, sebagai ujung tombak permasalahan sosial ekonomi masyarakat (TNI AD, 2011).

Potensi penting Babinsa adalah sumber informasi yang dibutuhkan oleh organisasi publik (kebijakan publik pemerintah pusat ataupun daerah). Informasi dibutuhkan dalam setiap perumusan kebijakan publik agar relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, kesesuaian dengan kondisi SDM, SDA dan SDB di daerah terkait. Konsep ini secara jelas dalam model sistem dan model proses perumusan kebijakan publik (Syafi'i, 2008).

Keberadaan Babinsa (Bintara Pembina Desa) perlu dioptimalkan pada setiap desa dan kelurahan dengan cara memiliki ruang kerja pada setiap kantor lurah ([www.haluankepri.com](http://www.haluankepri.com), Mei 2012). Kerja yang dilakukan oleh Babinsa bukan hanya kerja yang berhubungan dengan ketahanan dan kedaulatan negara, tetapi melakukan koordinasi dengan kepolisian dan memberikan dukungan atas kerja organisasi publik lainnya. Kondisi

ini dapat direalisasikan dengan memaksimalkan keberadaan Babinsa, baik secara kuantitas dan kualitas dalam makna kesadaran atas posisi dan fungsinya dalam mendukung kebijakan publik.

Potensi Babinsa akan dapat optimal dalam kebijakan publik, apabila secara internal para Babinsa peka dalam melaksanakan tugas serta adanya kesadaran dari seluruh organisasi publik untuk melakukan koordinasi sebelum mengambil kebijakan publik secara aktual ([www.lensaindonesia.com](http://www.lensaindonesia.com) , Maret 2012). Konteks aktual bagaimana Babinsa dalam menjalankan tugasnya serta bagaimana organisasi publik memanfaatkannya dalam merumuskan setiap kebijakan publik perlu mendapatkan penelahaan secara mendalam.

## **B. Kerangka Berpikir**

Pemerintah sebagai pihak yang mengelola sumber daya dan keuangan negara mempunyai kewajiban merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial (pendidikan dan kesehatan) serta aspek lainnya. Kebijakan yang dirumuskan diharapkan muncul sebagai stimulan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial. Kondisi ini hanya dapat terwujud dengan baik, jika kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah sesuai dengan permasalahan dan potensi sosial ekonomi yang ada di wilayahnya.

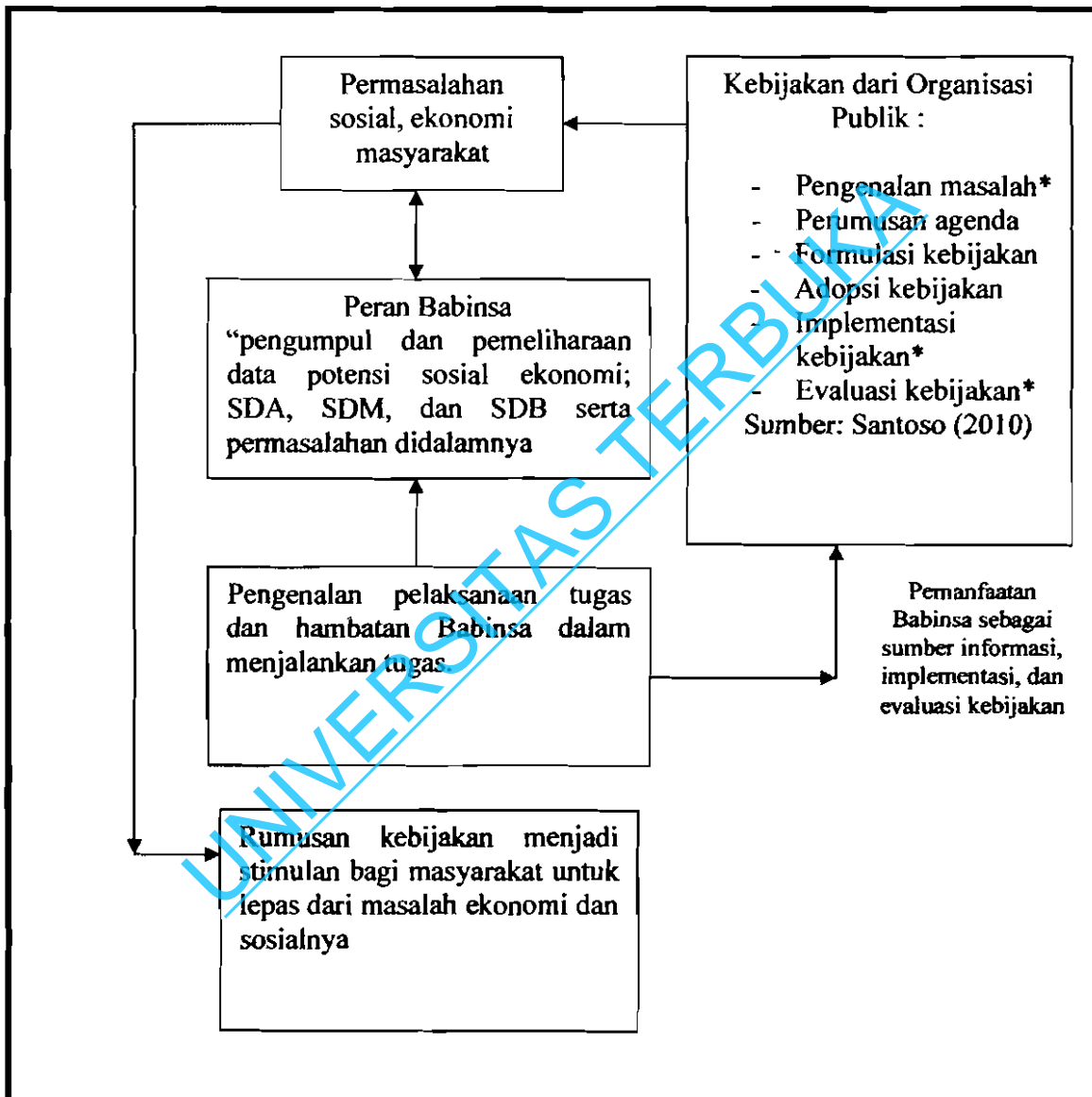
Kecenderungan kebijakan yang ada selama ini lebih bersifat rutinitas atau pengulangan dari kebijakan yang ada sebelumnya, tercermin dari fakta yang ada dan hasil riset peneliti sebelumnya. Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat selalu

muncul pengaspalan dan sejenisnya, sehingga tidak memberikan stimulan yang nyata bagi masyarakat dalam melepaskan diri dari belenggu kemiskinan, pendidikan dan kesehatan yang rendah.

Perlu dilakukan kajian peran dari aparatur negara yang memiliki fungsi untuk menghimpun data permasalahan sosial ekonomi, potensi SDA, SDM, dan SDB pada suatu wilayah. Aparatur tersebut adalah Babinsa, selanjutnya analisis yang mendalam mengenai bagaimana tugas Babinsa dijalankan dan bagaimana perannya dilibatkan dalam merumuskan kebijakan oleh organisasi publik yang ada di wilayah kerjanya.

Temuan atas dua aspek di atas dijadikan dasar untuk memberikan solusi bagaimana pemanfaatan kerja Babinsa oleh organisasi publik yang ada. Konteks ini sangat diperlukan agar organisasi publik yang ada dapat melakukan kerja bukan hanya dengan melihat kondisi internal organisasi, tetapi juga organisasi publik lain, sehingga terjadi *multiflier effect* atas manfaat dari keberadaan suatu bidang tugas. Lengkapnya uraian ini dirumuskan dalam model kerangka konseptual sebagai berikut.

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir



Sumber: diadopsi dari Santoso (2010), Syafi'i, (2008), Dunn (2003) dan konsep kebijakan publik lain.

Keterangan : \*Tahapan perumusan kebijakan yang dianalisis.

Model rumusan kebijakan yang digunakan dengan model proses, potensi Babinsa dapat digunakan mulai dari awal perumusan kebijakan sebagai sumber informasi,

selanjutnya berperan dalam menguatkan implementasi dan memberikan bantuan dalam evaluasi kebijakan. Hasil kerja empiris dan proses kerja selanjutnya pada Babinsa dapat digunakan oleh organisasi publik dalam merumuskan kebijakannya guna memecahkan permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Desain atau rancang penelitian ini sebagai penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bersifat menemukan atas fenomena permasalahan yang dikaji (Umar, 2008). Desain penelitian ini lebih mengutamakan temuan di lapangan, sementara konsep teori yang digunakan hanya sebagai pedoman dalam menemukan keterkaitan antar fenomena temuan.

Temuan dalam penelitian di atas akan dijustifikasi dalam makna kesesuaian dan ketidakesuaiannya dengan konsep teori yang telah diuraikan sebelumnya. Setiap uraian temuan atas suatu variabel akan dilengkapi dengan konsep teori dan hasil penelitian terdahulu. Desain penelitian dalam ranah eksploratif diarahkan pada peran Babinsa dalam perumusan kebijakan publik, hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan fungsi tersebut serta peran implementasi kebijakan publik sebagai wujud pelibatan dari organisasi publik yang ada di wilayah Kodim 1606/Lombok Barat.

#### **B. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini adalah para Babinsa Kodim 1606/Lombok Barat yang dilaksanakan secara acak yang menurut peneliti (atas dasar pengamatan awal) dapat mewakili para Babinsa dalam memberikan informasi yang diharapkan dalam pedoman wawancara yang telah disusun peneliti. Sumber informasi dalam penelitian kualitatif

diupayakan dari informan dengan konsep pencarian informasi dihentikan jika telah diperoleh informasi yang seragam. Konteks keseragaman tersebut per wilayah (Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara). Konsep dasar perlakuan seperti ini, karena setiap daerah otonom mempunyai spesifikasi informasi, termasuk dalam perumusan kebijakan publik. Informan dalam penelitian ini adalah Babinsa yang bertugas di wilayah Kodim 1606/Lombok Barat, Danramil, tokoh masyarakat dan aparat desa di wilayah kerja 1606/Lombok Barat.

Informasi dari informan di atas (Babinsa) akan didukung melalui wawancara dengan beberapa kepala desa sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan beberapa Danramil sebagai atasan Babinsa dalam melaksanakan tugas di pemerintahan desa. Para informan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan sekaligus sebagai kerja *cross check* dalam pengumpulan data atau informasi. Terapan *cross check* tersebut sebagai wujud triangulasi dalam pengumpulan data, sehingga informasi yang ditampilkan hanyalah informasi yang valid.

### C. Instrumen Penelitian

Informasi indikator penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Indikator dan Instrumen Penelitian

No.	Indikator	Instrumen
1	Peran Babinsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsi normatif</li> <li>- Hasil kerja selama satu tahun terakhir</li> <li>- Rekapitulasi permasalahan sosial ekonomi desa</li> <li>- Rekapitulasi potensi desa; SDA, SDM, dan DB</li> </ul>
2.	Pelaksanaan fungsi Babinsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat kerja</li> <li>- Kerja operasional yang dijalankan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerja konseptual yang dijalankan; termasuk rekapitulasi</li> <li>- Pertanggungjawaban</li> <li>- Koordinasi</li> <li>- Faktor pendukung dan penghambat kerja serta peran bagi organisasi publik</li> </ul>
3.	Kebijakan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencarian informasi oleh Organisasi publik</li> <li>- Penguatan implementasi melalui koordinasi kerja</li> <li>- Penguatan evaluasi melalui pelibatan</li> </ul>

Instrumen atau indikator di atas dijadikan sebagai bahan pertanyaan atau item untuk menyusun kuesioner. Penelitian ini, dapat saja terjadi pengembangan komponen pertanyaan tergantung pada hasil wawancara dengan responden. Hal ini memungkinkan, karena akan dilakukan wawancara mendalam dengan responden (Babinsa, dan aparatur desa serta jika memungkinkan dengan perumus kebijakan di organisasi publik). Konsep penentuan instrumen secara statis akan membatasi temuan dalam penelitian. Berbagai indikator yang disusun dapat dinyatakan sebagai temuan pokok, sehingga perlu diberikan kesempatan munculnya indikator lain dalam rangka memperdalam dan memperluas hasil temuan. Konteks ini sebagai keunggulan dari desain penelitian kualitatif.

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dengan mendesain hasil observasi, wawancara dengan responden serta aspek yang terpenting adalah kerja *cross check* sumber informasi. Prosedur yang dijalankan adalah :

1. Pembentukan tim wawancara, khususnya kepada informan Babinsa Kodim 1606/ Lombok Barat.



2. Melakukan wawancara mendalam dan observasi mengenai rutinitas kerja Babinsa Kodim 1606/Lombok Barat di wilayah Kabupaten Lombok Barat termasuk temuan atas hambatan dalam pelaksanaan tugas serta pelibatannya dalam tahap implementasi kebijakan publik oleh organisasi publik yang ada di wilayah kerjanya.
3. Melakukan telaah atas kerja yang dihasilkan Babinsa Kodim 1606/Lombok Barat berhubungan dengan pengumpulan dan pemeliharaan data potensi dan permasalahan ekonomi sosial, SDA, SDM, dan SDB di wilayah kerjanya. Kerja tersebut untuk memberikan jaminan bahwa para Babinsa mempunyai sumber informasi yang potensial untuk mendukung perumusan kebijakan publik.
4. Melakukan wawancara dengan Babinsa dan aparat desa mengenai koordinasi kerja yang dijalankan selama ini. Koordinasi tersebut mulai dari tahap perumusan kebijakan publik dan tahap implementasi kebijakan publik.
5. Melakukan wawancara dengan Babinsa mengenai peran aktifnya dalam memberikan kontribusi untuk perumusan kebijakan publik
6. Melakukan wawancara dengan Babinsa mengenai pelibatannya oleh organisasi publik dalam perumusan kebijakan publik, penguatan implementasi dan evaluasi.
7. Melakukan wawancara dengan perumusan kebijakan publik di dinas dan lembaga yang ada mengenai sumber informasi yang digunakan, penguatan pelaksanaan dan evaluasi dengan melibatkan kerja Babinsa.

## E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, berarti mengandalkan temuan dan kemampuan dalam melakukan analisis. Analisis dilakukan atas fakta yang ditemukan serta melakukan konektivitas dengan konsep teori dan hasil riset terdahulu. Modal yang digunakan sebagai bahan analisis adalah konsep teori untuk menyatakan temuan atau fakta empiris memberikan dampak pada perumusan kebijakan publik yang baik atau tidak.

Tahap awal dalam rangka sistematiknya analisis data dilakukan dengan memberikan deskripsi atas temuan mengenai pelaksanaan tugas Babinsa, hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, rekapitulasi hasil kerja berhubungan dengan potensi ekonomi sosial serta kondisi SDA, SDM, dan SDB di wilayah kerjanya. Memberikan deskripsi temuan tersebut tidak hanya dari satu sumber, tetapi juga sumber lain dalam konteks kerja *cross check* atau proses triangulasi dalam pendekatan kualitatif (Moleong, 2000:175).

Deskripsi juga diberikan mengenai kerja aktif Babinsa dalam memberikan informasi pada perumus kebijakan publik serta kerja perumus kebijakan publik dalam memanfaatkan Babinsa sebagai sumber informasi (pengenalan masalah). Proses ini lebih bersifat deskripsi temuan, begitu juga dengan kerja yang melibatkan Babinsa oleh perumus kebijakan dalam penguatan implementasi kebijakan dan membantu dalam merumuskan evaluasi dari kebijakan publik terkait.

Berdasarkan uraian di atas dilakukan analisis dengan menggunakan dasar normatif kerja Babinsa, proses perumusan kebijakan yang efektif untuk melakukan kajian atas fakta

empiris perumusan kebijakan publik di wilayah kerja Kodim 1606/ Lombok Barat, berarti berada pada wilayah kerja daerah otonom Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Utara. Analisis terakhir adalah melakukan kajian untuk memberikan solusi mengenai pelaksanaan tugas Babinsa secara spesifik pada tugas pengumpulan dan pemeliharaan data potensi ekonomi sosial, SDA, SDM, dan SDB di wilayah kerjanya serta solusi dalam mengoptimalkan proses perumusan kebijakan publik.

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Profile Wilayah Penelitian

Wilayah kerja Kodim 1606/Lombok Barat berada pada tiga daerah otonom, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara. Perlu diberikan informasi singkat mengenai profile wilayah yang memberikan indikasi potensi dan permasalahan sosial ekonomi serta permasalahan dasar lainnya. Tiga wilayah ini mempunyai kondisi wilayah yang berbeda, Kabupaten Lombok Utara sendiri merupakan daerah baru yang sedang melakukan pemberahan dalam penciptaan sarana prasarana untuk mendukung kesejahteraan masyarakatnya.

Potensi tiga wilayah kerja secara umum, dilihat dari indikator makro perlu diberikan, begitu juga dengan hambatan yang ada, karena terkait dengan tugas Babinsa. Tugas Babinsa terkait dengan pengumpulan, pemeliharaan data geografi, demografi, kondisi sosial dan potensi nasional meliputi SDM, SDA/SDB serta sarana prasarana di wilayahnya. Tugas tersebut identik dengan tugas sosial ekonomi, bukan tugas dalam kerangka keamanan dan stabilitas wilayah. Konteks stabilitas dalam kajian ini lebih pada peran dari Babinsa dalam memberikan kontribusi dalam penciptaan stabilitas ekonomi dan sosial, lebih pada aspek tiga kebutuhan dasar, yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Potensi pertama yang diberikan kajian adalah nilai produksi tiga wilayah di Kodim 1606/Lombok Barat. Nilai produksi ini memberikan gambaran kesejahteraan, serta potensi ekonomi yang menjadi dan sektor yang perlu mendapatkan untuk dikembangkan sesuai

dengan potensi aktual yang ada di daerah. Informasi lengkap sumber pembentuk perekonomian tiga daerah otonom tersebut, sebagai berikut :

Tabel 4.1. Potensi Ekonomi Tiga Daerah di Wilayah Kerja Kodim 1606/Lombok Barat Tahun 2011.

No.	Sektor	Kabupaten/Kota		
		Lobar	Mataram	KLU
Total Nilai (Rp.000)		4.462.781.045	5.507.010.960	3.325.004.003
1	Pertanian	28,96	3,63	42,74
2	Pertambangan dan Galian	3,54	0,01	2,63
3	Industri Pengolahan	3,75	9,99	1,41
4	Listrik, gas dan Air Bersih	0,7	1,12	0,27
5	Bangunan	11,17	8,94	10,83
6	Perdagangan, Hotel dan restoran	21,72	22,16	18,24
7	Pengangkutan & komunikasi	12,34	23,85	6,66
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,09	17,33	6,07
9	Jasa-jasa	13,73	12,97	11,16
Total Nilai (Rp.000)		4.462.781.045	5.507.010.960	3.325.004.003
Jumlah Penduduk (jiwa)		904.252	406.910	897.115
Pendapatan per kapita		4.935,33	13.533,73	3.706,33

Sumber : BPS Lobar, Kota Mataram dan KLU.

Kota Mataram mempunyai potensi ekonomi di sektor pengangkutan dan komunikasi dengan kontribusi sebesar 23,85 persen terhadap total penerimaan daerahnya serta sektor perdagangan, hotel dan restoran, dengan kontribusi sebesar 22,16 persen. Pemberi kontribusi lainnya di atas dua digit dari sektor keuangan dan jasa. Kota Mataram dapat dinyatakan bukan sebagai daerah dengan potensi pada sektor pertanian, terbukti kontribusi yang diberikan hanya sebesar 3,63 persen.

Kondisi yang berbeda dengan Lobar dan KLU, perekonomian daerahnya mengandalkan sektor pertanian. Kabupaten Lobar mendapatkan kontribusi dari sektor

pertanian sebesar 28,96 persen dan setkor perdagangan sebesar 21,72 persen. Pola kontribusi yang relatif sama dengan KLU, tetapi dengan potensi sektor pertanian yang lebih besar, yaitu 42,74 persen dan sektor perdagangan sebesar 18,24 persen. Berhubungan dengan kondisi ini, pengembangan potensi ekonomi diarahkan untuk mengoptimalkan nilai produksi pada sektor pertanian dan perdagangan. Babinsa mempunyai peran dalam pemeliharaan potensi ekonomi, baik berupa sumber daya alam dan sumber daya buata yang mengarah pada dukungan sektor pertanian dan perdagangan.

Babinsa dengan fungsi melakukan pemeliharaan atas potensi SDA, SDB dan SDM hendaknya mengerti potensi ekonomi yang ada di daerah kerjanya. Diharapkan peran dalam memelihara dan mencari solusi melalui kerjasama dengan aparaturnegara lain dalam pengembangan ekonomi juga menjadi bidang tugas Babinsa, bukan semata faktor keamanan. Babinsa dalam tugasnya mempunyai peran dalam mengumpulkan dan memelihara data kependudukan, geografi, demografi dan aspek lain yang terkait dengan pemeliharaan potensi ekonomi yang ada di daerah kerja. Mengenal potensi yang ada di wilayah kerja menjadi sangat penting, seperti di Lobar dan KLU pada sektor pertanian dan perdagangan, maka peran Babinsa untuk melakukan inventaris dan memelihara sumber air, pasar dan lainnya yang memberikan dukungan pada dua sektor tersebut.

Informasi penting lain yang perlu diketahui setiap Babinsa pada wilayah atau regional kerjanya adalah kondisi kesejahteraan masyarakat. Aspek ini sangat penting, karena berdampak pada masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, di mana seluruhnya berdampak pada aspek lain, seperti keamanan dan stabilitas di wilayah terkait. Kota

Mataram mempunyai kondisi kesejahteraan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, dengan asumsi kondisi rata-rata. Fakta yang ada di Kota Mataram, ternyata ketimpangan ekonomi tergolong tinggi, terbukti lebih dari 45,00 persen penduduknya miskin (Renstra Kota Mataram, tahun 2011). Kondisi yang berbeda dengan Lobar dan KLU, kemiskinan yang terjadi bersifat merata, karena memang pendapatan per kapitanya tergolong rendah. Kondisi ini menimbulkan permasalahan spesifik yang berbeda pada setiap wilayah kerja Babinsa di Kodim 1606/Lombok Barat.

Kondisi masalah dasar di wilayah kerja Kodim 1606/Lombok Barat dapat diberikan melalui hasil pengukuran Indeks Pembangunan Manusia, sebagai cermin hasil pembangunan itu sendiri serta permasalahan yang ada, sebagai tanggung jawab bersama apatur negara, termasuk dukungan kerja Babinsa. Kota Mataram berada pada posisi atau peringkat 196 dari Kabupaten/Kota di Indonesia, sementara Lobar dan KLU berada di atas peringkat 350 di Indonesia (BPS NTB, 2012). Fakta ini menunjukkan adanya permasalahan besar dalam pembangunan manusia di wilayah Kodim 1606/Lombok Barat, termasuk juga di Kota Mataram. Potensi SDM di wilayah Kodim 1606/Lombok Barat dapat dinyatakan masih rendah. Babinsa perlu memberikan dukungan melalui kerjanya dalam mempercepat pembangunan SDM.

Kodim 1606/Lombok Barat mempunyai tiga wilayah kerja, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Pengaturan potensi yang di Kodim 1606/Lombok Barat pada tiga wilayah tersebut sebagai berikut:

1. Wilayah Kota Mataram:
  - a) Makodim 1606/Lobar di Mataram

- b) Koramil 1606-01/Cakra
- c) Koramil 1606-05/Mataram:
  - Pos Ramil Ampenan
  - Pos Ramil Sekarbela
- 2. Wilayah Kabupaten Lombok Barat:
  - a) Koramil 1606-01/Cakra:
    - Pos Ramil Narmada
    - Pos Ramil Lingsar
  - b) Koramil 1606-04/Gerung:
    - Pos Ramil Kediri
    - Pos Ramil Kuripan
    - Pos Ramil Labuapi
    - Pos Ramil Lembar
  - c) Koramil 1606-07/Gunungsari
- 3. Wilayah Kabupaten Lombok Utara:
  - a) Koramil 1606-02/Tanjung:
    - Pos Ramil Gangga
    - Pos Ramil Pemenang
  - b) Koramil 1606-03:
    - Pos Ramil Kayangan

Informasi pemilikan pos secara hirarki pada tiga wilayah Kodim 1606/Lombok Barat, juga dapat emmberikan informasi jumlah pos yang menjadi satuan pelaksana pada wilayah kerja yang ada. Koramil dalam hirarki Kodim 1606/Lombok Barat merupakan eselon pelaksana. Dapat dinyatakan bahwa terdapat enam koramil yang tersebar dalam tiga wilayah kerja, satuan tersebut merupakan tingkatan pelaksana atau dapat dinyatakan sebagai pemberi *action* pada masyarakat.

Obyek dalam penelitian ini adalah Babinsa Kodim 1606/Lombok Barat dengan wilayah kerja Kabuapten Lombok Barat, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara. Total jumlah Babinsa yang bekerja di wilayah Kodim 1606/Lombok Barat sebanyak 171 orang dengan perincian 88 orang yang ada di 88 desa dari 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, 50 orang yang ada di 50 desa dari 6 Kecamatan yang ada di



Kota Mataram dan 33 orang dari 33 desa yang ada di 5 Kecamatan Kabupaten Lombok Utara.

Kodim 1606/Lombok Barat dengan sebaran hirarki organisasi ke bawah pada tiga wilayah secara proporsional dengan jumlah penduduk dan wilayah serta kompleksitas masalah. Diharapkan bhakti TNI dapat terlaksana dengan cepat, dalam wujud aksi sosial seperti membantu membangun sarana dan prasarana sesuai prioritas pembangunan di daerah masing-masing dan ragam aksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep kerja ini telah tertulis dalam kerja normatif Kodim 1606/Lombok Barat, di mana organisasi publik (sipil) lainnya harus memahaminya, sehingga dapat terjadi koordinasi dan optimalisasi peran seluruh aparaturnegara. Babinsa sebagai personil Kodim 1606/Lombok Barat yang paling dekat dengan masyarakat, sebagai sumber informasi dalam ragam kebutuhan yang sifatnya *down to top* dalam hirarki TNI.

## **B. Deskripsi Tugas Babinsa di Kodim 1606/Lombok Barat**

### **1. Informan Babinsa**

Informasi dari mitra kerja dan atasan Babinsa mengenai kilasan kerjanya telah diberikan, setidaknya ada gambaran kerja di lapangan, termasuk pelaporan hasil kerja dalam hirarki organisasinya. Peran dari setiap Babinsa di tempat tugas masing-masing akan dapat terlihat dari fungsi aktual yang dijalankan, dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki atas fungsi normatif yang dijalankan.

Wawancara dilakukan dengan via telpon dan wawancara langsung oleh tim peneliti yang dibentuk peneliti, guna mendapatkan informasi yang luas, sementara wilayah kerja

dan jumlahnya yang cukup banyak. Serma Sujudi ( Babinsa Kelurahan Cakra Barat, wawancara tanggal 1 Nopember 2012), berikut hasil wawancaranya atas fungsi normatif dan fungsi aktual yang dijalankan :

Membantu Danramil dalam tugas kewilayahan, komunikasi sosial dan pembinaan desa. Berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam segala aspek, terlebih keamanan, sosial dan ekonomi. Ragam permasalahan yang dikerjakan ada yang sifatnya kasus dan ada yang sifatnya telah direncanakan. Sifatnya kasus berhubungan dengan kejadian yang sifatnya insidental, seperti kasus kenakalan remaja yang berpotensi konflik. Aspek yang sifatnya perencanaan dengan pemerintah desa berupa penentuan titik penyebab banjir, penataan gorong-gorong, setidaknya informasi pada Dinas PU.

Banyak ragam pekerjaan yang berhubungan dengan upaya untuk menjaga keamanan, karena sebagai pusat perdagangan dan mencoba untuk membina kembali semangat bersama (gotong royong dan sejenisnya).

Informasi di atas memberikan temuan bahwa tugas Babinsa, baik normatif dan aktual bukan sebatas pertahanan nasional dan penggalangan potensi, tetapi juga berhubungan dengan aspek sosial. Hasil wawancara dengan Babinsa tersebut adalah :

Laporan yang bersifat tertulis diberikan pada Danramil, kerja atasan yang mungkin membuat catatan atau sejenisnya terkait dengan potensi wilayah binaan. Kami dalam bekerja mungkin membutuhkan alat untuk membuat catatan dan sekaligus untuk dokumen kerja kami...bukan diingat saja

Babinsa di atas memberikan informasi bahwa ada tugas yang berhubungan dengan aspek ekonomi atau non pertahanan dan keamanan. Melakukan koordinasi dengan aparatur desa berhubungan dengan perencanaan dan penggalian potensi serta mengatasi masalah yang dihadapi oleh wilayah binaan (desa tempat bertugas).

Sertu I Wayan Ngenteq ( Babinsa Kelurahan Cakra Selatan, wawancara tanggal 1 Nopember 2012), hasil wawancaranya sebagai berikut :

Ada kesalahan masyarakat atas kerja kami sebagai tentara atau saya sebagai Babinsa...selalu berpikir tugasnya berhubungan dengan "perang". Ada tugas kami yang lebih penting, karena zaman sekarang bukan zaman perang, walaupun tetap kesiapan dan kesiagaan serta penggalian potensi ketahanan diperlukan. Tugas kami adalah menjalankan aspek yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, manunggal TNI dengan rakyat tercermin pada kemampuan kami berbuat pada aspek ekonomi dan lainnya, bukan hanya pada saat kritis, seperti bencana, tetapi juga dalam keadaan normal. Bagaimana kami mampu menemukan potensi di wilayah kerja....jelas di wilayah kami adalah wilayah dagang, banyak masyarakat yang berhasil, peran kami memberikan dukungan dalam menciptakan kondisi yang mendukung hal tersebut. Seluruh informasi potensi wilayah binaan menjadi laporan pada Danramil...saya sendiri dalam melaksanakan tugas rutin perlu menggali apa yang kira-kira dihindari agar permasalahan sosial tidak terjadi...toleransi, gotong royong perlu menjadi perhatian, karena ragam agama, ragam kondisi ekonomi dan ragam pekerjaan...

Ada kesadaran yang telah tercipta, perubahan pola pikir pada diri TNI, khususnya pada Babinsa di atas, bahwa keberadaannya dalam memberikan dukungan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi sangat penting. Informasi mengenai potensi SDA, SDM dan SDB secara rutin diinformasikan pada Danramil.

Serma Abdul Kasim (Babinsa Desa Sayang-Sayang, wawancara tanggal 1 Nopember 2012), berikut hasil wawancaranya :

Keamanan dan berfungsinya sarana yang telah ada menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas...apa yang telah ada dan apa yang diperlukan menjadi pikiran untuk diinformasikan pada mitra kerja....kepala desa khususnya...kami sering melakukan diskusi dengan kepala desa, supaya peran kita sebagai aparat pemerintah dapat berfungsi. Laporan kerja kami berikan pada atasan, jadi permasalahan dan potensi tercatat dalam wilayah binaan yang lebih luas ada di Danramil...kami lebih mengedepankan kerja dalam membantu pemerintah desa ...saluran tidak ada mari buat, carikan dana pada pemerintah yang menyediakan atau jika ada anggaran bekerja, keamanan tidak baik mari gotong royong  
 Apa yang dibutuhkan warga...ada banyak jalan di dalam desa yang rusak, aliran sungai besar perlu dijaga dengan baik oleh seluruh warga....

Ada informasi penting yang diperoleh, bahwa Babinsa di Desa Sayang-Sayang memposisikan diri sebagai individu yang bekerja, pecahkan masalah yang ada. Informan menyatakan tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan menunjuk pada perbaikan jalan, saluran irigasi. Perbaikan jalan terutama pada wilayah yang menuju persawahan dan pemukiman warga akan memberikan kemudahan bagi warga dalam menjalankan aktivitas, terutama petani. Seolah bahwa Babinsa tersebut mengidentifikasikan diri bukan sebagai personal yang merencanakan, tetapi cukup sebagai individu yang memberikan informasi dan tindakan aktual dalam pemecahan permasalahan yang ada.

Babinsa adalah personal TNI yang berada paling depan dekat dengan masyarakat desa, dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola potensi ketahanan nasional dan peran TNI dalam manunggal rakyat, berarti juga sebagai personal TNI yang paling dekat dengan masyarakat dalam membantu memecahkan permasalahan sosial ekonomi. Serka I Ketut Wiliana ( Babinsa Desa Krg. Taliwang, wawancara tanggal 5 Nopember 2012), berikut hasil wawancaranya :

Kondisi yang paling saya senang adalah apabila ada kegiatan TNI masuk desa atau sejenis kegiatan sosial yang dilakukan oleh TNI di desa binaan saya. Pada posisi tersebut masalah sedikit terpecahkan....ada perbaikan rumah bagi penduduk miskin, perbaikan irigasi dan lainnya, bahkan kami pernah gotong royong membangun masjid...ada kenyamanan dalam berbuat langsung, kami yang Hindu tidak perlu menyatakan toleransi lagi, karena terlihat kami ikut membaur saling membantu....jangan penyuluhan atau sejenisnya dengan kata semata, tetapi lakukan tindakan....

Tugas kami bukan seperti orang kantoran di desa, tetapi terjun langsung dalam menggali permasalahan yang ada....

Babinsa di atas memberikan informasi yang jelas atas fungsi aktual yang diberikan, yaitu melakukan kerja langsung dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh

masyarakat. Personal tersebut memposisikan diri sebagai aparatur yang melakukan tindakan aktual, bukan sebagai perencana atau pekerjaan yang lebih banyak duduk di belakang meja atau hanya berada di kantor. Tindakan aktual yang menjadi perhatiannya baik atas kerjanya sendiri, rekan satuan dan kerja lain yang sifatnya tindakan langsung.

Informasi yang diberikan Babinsa di atas memberikan pembuktian bahwa kerja yang dijalankan bukan hanya sebatas pertahanan atau aspek lain yang terkait dengan hankam serta upaya untuk mengetahui potensi masyarakat dalam pendekatan pertahanan. Pengenalan masyarakat juga dihubungkan dalam upaya mengenali potensi dan permasalahan ekonomi, pendidikan dan sosial lainnya. Wujud kerja sosial, seperti toleransi antar pemeluk agama tidak dilakukan melalui kerja penyuluhan, tetapi tindakan langsung yang lebih spesifik dari penyuluhan itu sendiri. Babinsa di atas kebetulan beragama Hindu, tetapi sangat senang bergotong royong dalam mengerjakan masjid. Konsep dalam kehidupan kerukunan tidak hanya dalam pikiran, tetapi diaktualisasikan secara langsung dalam kehidupan yang berdampingan satu sama lain.

Peran yang dijalankan oleh setiap individu dapat saja berhubungan dengan faktor individu terkait. Pengenalan atas aspek di atas dilanjutkan dengan melakukan wawancara atas rutinitas yang dijalankan Babinsa di desa binaan. Serka Silahudin ( Babinsa Kelurahan Mayura, wawancara tanggal 5 Nopember 2012), sebagai berikut :

Ada potensi ekonomi dalam bentuk bisnis dan lokasi wisata di Kelurahan Mayura....bagaimana memadukan wilayah bisnis dengan obyek wisata menjadi sangat penting. Peran Babinsa untuk memberikan jaminan pemeliharaan atas potensi bisnis (pertokoan, pasar) bekerjasama dengan pihak kepolisian...

Permasalahan ekonomi dapat dinyatakan, tergantung pada kemampuan dalam menggunakan kesempatan....selama ini warga telah menyadari potensi tersebut, bahkan banyak warga lain yang juga andil dalam menggunakan sarana prasarana ekonomi yang ada....seluruhnya tidak ada masalah. Penelaahan yang saya lakukan, adanya tuna wisma di wilayah tersebut bukan berasal dari wilayah tersebut, tetapi pendatang

Tugas yang saya jalankan selama ini lebih fokus pada membantu kerja lurah dalam mengoptimalkan potensi yang ada, menjaga keamanan dan ketertiban. Hal-hal yang berhubungan dengan gejala konflik sangat diupayakan untuk diredam sebelum menjadi permasalahan...terutama saat ada acara yang diadakan, sangat diutamakan keamanan ....

Babinsa di atas dalam menyebutkan rutinitasnya telah tidak menyebutkan aspek pertahanan atau penelaahan potensi masyarakat untuk keadaan darurat perang atau hal yang berhubungan dengan ketahanan dari masyarakat sipil. Kondisi ini dapat terjadi, karena dalam rutinitas kerjanya tidak pernah menjumpai kondisi darurat, menyebabkan potensi kerjanya diarahkan untuk kegiatan ekonomi dan aspek lain yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

Serma Hada Umar ( Babinsa Cakra Utara, wawancara tanggal 6 Nopember 2012), informasi mengenai rutinitas fungsi yang dijalankan sebagai berikut :

Kalau bapak mau mengetahui fungsi yang kami jalankan dapat dilihat dalam buku pedoman kerja kami, beragam tugas yang ada sekarang lebih pada permasalahan aktual yang ada di desa binaan. Kerja operasional yang dilakukan Babinsa lebih pada permasalahan aktual yang ada di desa, meliputi aspek yang terkait dengan keamanan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan masalah sosial.

Bagaimana kita dengan sigap mengidentifikasi isu yang dapat menyebabkan konflik horisontal dengan berbagai alasan. Misalnya ada kegiatan ekonomi, tetapi limbahnya haram bagi ummat lain, maka seluruhnya memerlukan pendekatan agar masyarakat tidak gelisah dan berakhir dengan konflik. Pendekatan kami dengan kepala desa memberikan bantuan atas hal tersebut Kerja kami bukan atas dasar apa yang akan kami kerjakan, tetapi lebih pada identifikasi apa yang diperlukan untuk dikerjakan atau tuntaskan.

Babinsa di atas dalam pelaksanaan pekerjaan lebih sebagai upaya untuk mengenali pekerjaan atau tindakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan sebagai pekerjaan yang didasarkan atas perencanaan jangka panjang. Babinsa dalam pelaksanaan pekerjaan cukup banyak yang lebih mengedepankan tindakan aktual dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Konsep ini dapat saja dibenarkan, karena akan secara terus menerus mengikis permasalahan yang ada, dalam waktu yang panjang ragan permasalahan akan tuntas.

Konsep pekerjaan yang membutuhkan perencanaan tentu diperlukan dalam rangka menghasilkan kebijakan yang inovatif untuk menggerakkan potensi masyarakat. Kerja aktual yang dilakukan oleh Babinsa berhubungan dengan potensi diri dan perannya, sebagai tenaga operasional yang paling dekat dengan sumber masalah dan sumber potensi.

Serma Suhermanto ( Babinsa Kelurahan Dasan Cermen, wawancara tanggal 6 Nopember 2012), berikut hasil wawancaranya :

Kelurahan ini menjadi central gudang dan pelaku usaha skala regional, sisi lain banyak pekerja atau masyarakat yang hanya mengandalkan menjadi buruh, penjaga toko dan ada juga yang masih menjadi petani. Hal yang jelas ada jurang kondisi ekonomi, warga keturunan menjadikan daerah tersebut sebagai gudang dan ada kecenderungan akan adanya pemukiman-pemukiman mewah. Kondisi tersebut merupakan peluang dan sekaligus potensi kecemburuan sosial...

Upaya saya sendiri adalah membangun hubungan yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat serta memberikan masukan bagi yang menguasai bisnis agar memberikan kesempatan utama pada penduduk sekitar sebagai pekerja...tentu dengan tetap mengutamakan kemauan dan kemampuan dalam bekerja. Adanya hubungan yang kaya dan miskin, satu sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan lain sebagai pekerja akan memberikan jaminan keamanan sosial.

Upaya kerja saya demikian....lapangan pekerjaan telah ada dan dibangun oleh warga pebisnis, tinggal bagaimana pemerintah kelurahan membangun nuansa sosial yang dijalankan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan...

Informan di atas dalam menguraikan pekerjaan rutin tidak menyinggung mengenai ketahanan nasional, karena bukan lagi menjadi permasalahan vital dalam kehidupan yang normal. Konsep ketahanan nasional bukan hanya memandang adanya gangguan dari eksternal, tetapi perlu diperhatikan sumber internal. Jaminan gangguan yang bersumber dari internal tidak akan terjadi selama *gap* ekonomi, sosial dan lainnya tidak terlalu tinggi.

Serma Wiyarto ( Babinsa Kelurahan Abian Tubuh, wawancara tanggal 7 Nopember 2012), berikut hasil wawancaranya :

Saya bekerja atas apa yang diarahkan oleh Danramil...fokus saya pada hal tersebut, karena beliau telah mempelajari kondisi wilayah binaannya..tentu semua juga atas dasar informasi kami..  
 Wilayah binaan saya termasuk wilayah yang padat dengan ragam aktivitas ekonomi dan kegiatan produksi...terkenal dengan sentra tahu. Selama ini kondisi wilayah tergolong aman, tinggal upaya untuk menata sarana prasarana agar tidak banjir saat musim penghujan, pengelolaan limbah industri.  
 Saya bekerjasama dengan pak lurah telah mengerahkan masyarakat untuk gotong royong..sangat penting bagi saya untuk memperhatikan kehidupan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik, karena itu menjadi syarat untuk mengarahkan warga dalam segala hal...

Pemikiran cemerlang dari informan di atas adalah bahwa fokus pekerjaan diberikan pada upaya untuk membantu aparat kelurahan dalam menata lingkungan masyarakat yang terhindar dari banjir, penataan limbah produksi, sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Kondisi ekonomi yang baik dimasyarakat memberikan jaminan seluruh program pemerintah akan berjalan dengan baik pula.



Sertu Abdilah ( Babinsa Desa Pemenang Timur, wawancara tanggal 10 Nopember 2012), berikut hasil wawancara mengenai aktivitas rutin sebagai Babinsa :

Kerja kami pada setiap desa binaan dapat saja berbeda, tergantung pada kondisi masyarakat, walaupun fokus pada pengenalan wilayah dan pengelolaan potensi ketahanan nasional. Sebagai wilayah baru hasil pemekaran, saya sendiri telah mengajukan pada kepala desa agar gencar mengusahan fsailitas kesehatan bagi masyarakat, lengkap dengan petugas (perawat dan bidan)... saya melihat banyak anak nikah usia dini, banyak anak yang dapat mengganggu ekonomi masyarakat

Kesehatan masyarakat akan memberikan dukungan kegiatan ekonomi, program KB perlu digalakkan. Ini semua sedang kami upayakan, jika mungkin saya sedang mengusulkan agar pelayanan dari TNI masuk desa dalam wujud pelayanan kesehatan dan penyuluhan perlu diupayakan, tetapi keterbatasan tenaga menjadi masalah

Ada upaya yang kuat dari Babinsa di atas mengaktualisasikan kerja dalam bentuk kebutuhan vital masyarakat yang dapat berdampak pada aspek lain. Informan sampai saat ini telah menunjukkan bahwa Babinsa bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan bekerja dengan rutinitas, tetapi mencoba mengenali kebutuhan masyarakat. Kondisi yang dapat dijelaskan adalah ada upaya untuk bekerja dan memberikan kontribusi pada penciptaan masyarakat yang sejahtera, baik dalam konteks langsung ataupun tidak langsung. Konsep kerja ini yang diperlukan pada setiap aparatur, bukan hanya datang dan duduk, tanpa ada hasil kerja pada setiap periode kerjanya.

Informasi mengenai potensi dan permasalahan wilayah binaan dapat dipastikan diketahui dengan baik oleh para Babinsa, setidaknya atas dasar informasi dari responden terkait. Untuk mendapatkan informasi yang luas dilakukan wawancara kembali. Sertu Ali (Babinsa Tegal Maja, wawancara tanggal 10 Nopember 2012), berikut hasil wawancaranya :

Wilayah binaan kami potensial perkebunan dengan hasil utama kelapa, banyak yang bekerja sebagai petani (lahan berupa kebun dan ladang)...masyarakat yang lain menggunakan potensi tersebut untuk membuat usaha kopra dan pedagang kelapa, serta pelaku usaha industri rumah tangga dengan dasar pengelolaan hasil panen kelapa (minyak goreng).

Perhatian kami atas pelaksanaan tugas bukan saja masalah keamanan, tetapi apa yang dapat dikembangkan di dalam masyarakat agar masalah keamanan tidak terjadi....upaya penciptaan keamanan mandiri melalui siskamling diupayakan juga

Saya sendiri dalam melaksanakan tugas tidak hanya siang hari, tetapi keliling desa pada malam hari untuk lebih akrab dengan lingkungan dan masyarakat.

Koordinasi pekerjaan selalu dikoordinasikan dengan kepala desa...saya ingin memberikan andil di desa binaan...karena moto kami dalam bekerja adalah kemanunggalan dengan rakyat

Konsep manunggal TNI dengan rakyat bukan selalu dalam bentuk TNI masuk desa, tetapi bagaimana aparat yang dimiliki pada setiap kerjanya dekat dengan masyarakat, termasuk para Babinsa. Manunggal Babinsa dengan rakyat diaplikasikan dengan cara mengenali permasalahan masyarakat, bersosialisasi dan kegiatan lain, sehingga apa yang menjadi sasaran kerja Babinsa dapat dengan mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh masyarakat serta sebaliknya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terwujud.

Babinsa dalam hirarki kerjanya sebagai personal TNI yang ada paling ujung dalam mengenali, mengelola potensi ketahanan masyarakat. Saat dibutuhkan dapat digerakkan untuk kepentingan ketahanan nasional. Konsep kerja tersebut menjadi tugas utama Babinsa, tetapi tugas keduanya berhubungan langsung dengan masalah ekonomi sosial, melalui kemampuan mengenal, memelihara potensi SDA, SDM dan SDB di wilayah binaan. Kondisi nasional dan regional yang stabil, mengalihkan perhatian para Babinsa atas tugas pengenalan masalah sosial ekonomi masyarakat.

Serma I Komang Daman ( Babinsa Desa Jenggala, wawancara tanggal 10 Nopember 2012), berikut informasinya :

Kerja Babinsa menurut saya....sifat kaku, birokratis atau bentuk lain dari keseharian dari pasukan harus hilang. Dalam melaksanakan pekerjaan, pengenalan wilayah, potensi dan lainnya harus melebur dengan masyarakat, jadi berperilaku seperti masyarakat umumnya....Pengenalan untuk potensi ketahanan nasional menjadi perhatian, tetapi dalam keseharian kita disuguhkan pekerjaan yang lebih bernuansa keamanan, ekonomi dan sosial masyarakat...

Masyarakat terkadang hanya berpikir bahwa tugas Babinsa berhubungan dengan keamanan, padahal itu lebih pada tugas kepolisian... tugas kami pada aspek ketahanan...konsep kerja jika ada masalah keamanan, lebih pada koordinasi dengan kepolisian...

Saya sendiri dalam pelaksanaan pekerjaan lebih banyak di lapangan, bukan di kantor....dengan ada di msasyarakat kita akan mengenali dengan baik wilayah binaan, siapa tokoh masyarakat, siapa yang bisa di dengar, siapa orang kaya, apa jenis kegiatan ekonomi masyarakat dan lainnya

Desa Jenggala secara topografi dan potensi desa sama dengan kondisi Kecamatan Tanjung secara umum, dengan potensi ekonomi dalam bidang perkebunan kelapa. Potensi alam tersebut berimplikasi pada pekerjaan utama masyarakat, baik dalam bentuk kerja di sektor primer ataupun kegiatan industri skala rumah tangga dan industri menengah. Potensi yang perlu dikembangkan lebih jauh adalah potensi SDM terkait dnegan pengelolaan ragam varians dari rproduk utama dan sampingan kelapa. Misalnya kerajinan dari batok kelapa, sabut kelapa, daun kelapa serta pohon kelapa yang telah tua serta varian lainnya.

Sertu Saipudin ( Babinsa Desa Gondang, wawancara tanggal 10 Nopember 2012), berikut hasil wawancaranya :

Babinsa membutuhkan keterampilan, pengetahuan, skill yang banyak...karena tidak mungkin hanya mengerjakan hal yang berhubungan dengan ketahanan nasional...masyarakat tidak mengenal hal tersebut, karena selama hayatnya tidak pernah mengalami situasi perang....kebutuhan masyarakat lebih pada

bagaimana kita bisa memberikan pemecahan masalah yang sedang dihadapi...jika irigasi tidak ada, berarti perlu setidaknya parit. Bukan tidak memperhatikan aspek ketahanan, itu tetap, tetapi sepanjang kerja kami lebih dekat dengan permasalahan di luar itu...

Saya mengenal dengan baik wilayah binaan, kondisi SDA, SDM dan SDB serta permasalahan yang sering terjadi. Seluruhnya kami laporkan ke atasan "Danramil"...

Ada kesadaran dibutuhkannya pengetahuan dan keterampilan lebih dalam menjalankan tugas sebagai Babinsa. Kesadaran tersebut membuktikan dalam pelaksanaan pekerjaan dibutuhkan kemampuan dalam memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kondisi ini juga menjadi bukti bahwa tugas yang diemban oleh Babinsa bukan hanya berhubungan dengan masalah ketahanan, kondisi teritorial dan lainnya, tetapi juga masalah pemeliharaan potensi dan memberikan solusi pada masyarakat melalui koordinasi kerja dengan pejabat di wilayah binaan (kepala desa/lurah dan staf lainnya).

Wawancara dilakukan dengan Serma M. Baihaqi ( Babinsa Desa Mumbulsari), Serma Samsudin ( Babinsa Desa Senaru), Serma Supriyadi ( Babinsa Desa Sukadana), Serma Munawar ( Babinsa Desa Bayan) dan Serma Made Sudiartawan ( Babinsa Desa Anyar), wawancara dilakukan pada tanggal 11 Nopember di desa binaan masing-masing. Informasi yang diperoleh relatif sama mengenai pelaksanaan tugasnya, bahwa tugas yang diemban lebih banyak pada permasalahan aktual masyarakat, masalah kemiskinan berupa pembagian Beras Raskin, memberikan dukungan atas kerja personal pada proyek PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), seluruhnya berhubungan dengan kerja pemberdayaan SDM dan pengadaan sarana prasarana di setiap desa binaan.

Hasil wawancara pada Babinsa di atas relatif tidak menyinggung tugas utama yang diemban, sebagai personal TNI yang menyiapkan ketahanan nasional. Kerja yang dijalankan lebih pada program dan kebijakan yang sedang diprioritaskan pada wilayah binaan. Babinsa pada setiap program dan kebijakan yang masuk di program binaan tidak menjadikan diri sebagai penonton atau tidak ambil bagian dalam berkontribusi.

Serka Sukardi ( Babinsa Desa Kayangan, wawancara tanggal 12 Nopember 2012), sebagai berikut :

Tahun 2008 sampai 2011, Desa Kayangan disibukkan dengan program PNPM. Saya terlibat langsung mulai dari sosialisasi, musyawarah di tingkat dusun, tingkat desa dan bahkan tingkat antar desa...perhatian saya selama ini tertuju pada hal tersebut....karena tugas pokok pada dasarnya telah dilakukan dan tidak yang berubah mengenai ketahanan dan teritorial desa binaan. Pada kondisi tersebut saya menyadari bahwa saya butuh pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam berkomunikasi, membina hubungan sosial dan mengerti atas setiap program yang ada....membuka telinga, pikiran dan perhatian atas ragam kebijakan pemerintah menjadi sangat penting, bahkan jika memungkinkan kemampuan dalam menyampaikan kebutuhan penting masyarakat...seluruhnya melalui koordinasi dengan kepala desa, bukan bekerja secara individu.

Babinsa di atas memberikan penegasan bahwa tugas yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah teritorial untuk kepentingan ketahanan tidak mengalami perubahan, selama tidak terjadi kondisi yang rusuh (rush, konflik, kudeta dan lainnya) yang berdampak pada terganggunya NKRI. Informasi tersebut memberikan kesadaran pentingnya kemampuan dalam mengenali masalah ekonomi dan sosial masyarakat sebagai dasar pemberian informasi pada organisasi publik yang membutuhkannya dalam rangka penerapan suatu kebijakan di desa binaan. Para Babinsa yang menjadi informan dalam kajian ini, sampai pada informan di atas memberikan informasi yang seluruhnya sama,

bahwa tugas yang dilakukan bukan hanya masalah teritorial serta telah mulai munculnya kesadaran atas peran lain yang dijalankan, sehingga keberadaannya di desa binaan menjadi berarti.

Sertu I Ketut Armama ( Babinsa Desa Senaru, wawancara tanggal 12 Nopember 2012), berikut hasil wawancaranya :

Mobilitas penduduk luar, bahkan asing pada bulan tertentu tergolong tinggi di Desa Senaru, dalam aktivitas pendakian Gunung Rinjani. Banyak juga orang asing dan penduduk dari luar bermukim di hotel dan cottage yang ada...seluruhnya ada yang mengatur, termasuk ada aturan kerja dalam memberikan penginapan...kerja kami bersama polisi sempat memberikan rasa aman bagi para pelancong tersebut...memberikan pemahaman pada khususnya pemuda dalam memanfaatkan kondisi yang ada, baik aktivitas ekonomi di desanya sendiri atau sampai di tempat pendakian...menjadi potter (jasa pembawaan barang pelancong) bukan pekerjaan yang mempunyai potensi ekonomi...tetapi diperlukan kerja lain. Menyediakan jasa pemandu berhubungan dengan budaya di desa sekitar, menggali budaya dan keterampilan dalam menyediakan cendera mata atau jasa lainnya sangat diperlukan dan itu belum ada. Berbeda dengan di desa saya (Bali) semuanya dapat menjadi uang, pelancong dapat berlama-lama, itu semua jika ada yang ditawarkan pada turis...bukan hanya naik gunung dan pergi meninggalkan obyek terkait

Kemampuan lain dalam mengelola potensi desa dibutuhkan oleh Babinsa, karena dalam menjalankan tugas lebih banyak berada di desa, terlebih jika mempunyai pos kerja. Keberadaan Babinsa di desa binaan akan lebih nyata jika mampu memberikan nilai lebih pada aspek ekonomi dan sosial, karena pada aspek ketahanan nasional tidak menjadi penting, karena desa atau negara dalam keadaan aman, bukan daerah konflik. Potensi Babinsa, yang terkait dengan pengalamannya di daerah lain penting untuk disalurkan, sehingga pejabat di satuan hirarki TNI perlu memberikan identifikasi dan klasifikasi desa binaan, selanjutnya diimplikasikan pada wujud pelatihan pada Babinsa terkait.

Babinsa adalah personel TNI yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan TNI manunggal dengan rakyat, sehingga ragam pengetahuan dan keterampilan dibutuhkan dalam menjalankan perannya. Pelaksanaan TNI masuk desa dan program lainnya bersifat priodik, sementara keberadaan Babinsa berhubungan langsung dengan masyarakat sepanjang keberadaannya di desa binaan. Lembaga TNI perlu mempunyai orientasi baru dalam pelaksanaan tugas, di samping mempunyai tugas utama dalam menjaga ketahanan nasional adalah memberikan perhatian atas kontribusinya dalam pembangunan, salah satunya melalui orientasi tugas Babinsa.

Serma Pramono ( Babinsa Desa Bajur, wawancara 14 Nopember 2012) berikut informasi yang diberikan atas pelaksanaan rutinitasnya di desa binaan :

Apapun jabatan kita penting orang tahu dan lakukan dengan baik...Saya sendiri tidak bertempat tinggal di desa binaan, karena tidak ada pos, tetapi dalam menjalankan tugas saya tidak menjadikannya sebagai alasan. Secara rutin saya berkeliling di malam hari, bersilaturahmi, siskamling dan lainnya sehingga keberadaan kita diketahui sebagai Babinsa.

Apapun saya diminta oleh kepala desa dan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat saya lakukan, tanpa menyinggung atau mengambil pekerjaan orang lain...kemitraan antar instansi kita perhatikan dan ada saling mengisi satu sama lain...saya tidak membatasi tugas dalam kaitan dengan keamanan saat pemilu atau lainnya, kalau kita telah berada ditengah masyarakat dalam arti dikenal, maka saran dan masukan yang kita berikan didengar...Pembangunan diupayakan berjalan di desa, sehingga saya meminta kepada kepala desa untuk aktif dalam mencari ragam solusi

Ada kesadaran pada aparat di atas dalam menjalankan tugas serta mempunyai strategi dalam melancarkan pelaksanaan tugas. Strategi yang dijalankan bukan hanya fokus pada tugasnya, tetapi bergaul dengan masyarakat, mendengar kebutuhan dan permasalahannya serta selalu membina kemitraan dengan aparat lain yang ada di desa

binaan. Dalam menjalankan tugas di masyarakat tidak dibutuhkan kebijakan dan program instansi lain, tetapi aspek yang menjadi perhatian adalah pencapaian hasil untuk kepentingan masyarakat.

Serma I Nyoman Kartika ( Babinsa Desa Jagaraga, wawancara tanggal 14 Nopember 2012) berikut hasil wawancaranya :

Desa binaan saya berada di antara desa yang mayoritas beragama Islam...belajar dari kasus yang banyak terjadi, maka konsep ketahanan nasional dimaknai sebagai upaya untuk selalu menjaga kesatuan antar penduduk, tidak ada konflik benuansa ras, politik dan lainnya....hal tersebut menjadi perhatian, walaupun selama ini kehidupan masyarakat berjalan harmonis...upaya mengenali permasalahan dan menghindari provokator menjadi penting. Perhatian atas aspek ini yang menjadi arahan tugas utama saya dari Babinsa, tentu tidak lepas dari perhatian atas kehidupan sosial pembangunan.

Pengarahan dari Danramil menjadi pedoman kerja para Babinsa, sesuai dengan kondisi desa binaan. Belajar dari kasus di daerah lain pada akhir-kahir ini, perhatian utama pada aspek ketahanan dalam makna kehidupan yang jauh dri nuansa konflik. Upaya pencegahan jauh lebih penting dari upaya perbaikan, karena setiap konflik akan berdampak pada kerugian materil yang besar dan kerugian non materi yang tidak ternilai (jiwa, trauma dan kemungkinan sebagai sumbu konflik di masa yang akan datang). Babinsa diberikan tugas yang berorientasi pada pencegahan ragam bentuk konflik, dengan pertimbangan kondisi perbedaan ras di desa binaan.

Serda Ahmad ( Babinsa Desa Bengkel, wawancara tanggal 15 Nopember 2012), berikut hasil wawancaranya :

Kami selalu membangun hubungan dengan semua pihak, terutama atasan saya langsung (Danramil Gerung/Koramil 1606-04), koordinasi dengan kepala



desa, sekdes dan aparat lain pemerintah serta pihak lain yang bertugas di desa (PPL misalnya, dari kepolisian)...jika kita selalu membangun komunikasi dengan baik, saling tukar informasi, maka kerja akan semakin terarah...tata kelola ketahanan nasional yang menjadi utama, selanjutnya pembangunan ekonomi...

Apa bentuk proyek, kebijakan dan lainnya di desa, oleh kepala desa selalu memberikan informasi, terlebih masalah keamanan...tegasnya saya membentuk diri menjadi tim kerja yang ada di desa, bukan sebagai aparatur yang terpisah

Informasi yang diberikan oleh Babinsa di atas memberikan penegasan bahwa dalam menjalankan tugasnya tetap pada tugas pokok, prinsip kerja selanjutnya sebagai tim yang bekerja di desa binaan. Melakukan upaya koordinasi dengan semua pihak yang ada di desa, sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Serka Wager Rudolf. S ( Babinsa Desa Kuripan, wawancara tanggal 15 Nopember 2012), berikut hasil wawancaranya :

Desa Kuripan seperti desa lain di Kecamatan Kuripan mengandalkan perekonomian dari sektor pertanian, pembuatan batu bata, pengambilan batu di bukit-bukit...pada musim kemarau atau paceklik ada gejolak keamanan, juga pada saat pemilihan kepala dusun dan kepala desa...Babinsa mempunyai tugas ekstra pada saat-saat tersebut serta menjadi arahan Babinsa untuk meminimalkan kondisi yang negatif...pendidikan yang masih rendah dan kondisi ekonomi yang belum baik menjadi permasalahan semua itu...jadi pemerintah perlu memberikan perhatian pada upaya meningkatkan wajib belajar dan bentuk keterampilan yang memunculkan kegiatan ekonomi...

Informasi di atas memberikan pembuktian bahwa Babinsa bersangkutan tidak hanya memberikan perhatian pada keamanan, tetapi bagaimana memberikan informasi sebagai penyebab dari kondisi yang ada. Ada upaya untuk mengenali permasalahan yang ada di desa binaan, sebagai dasar untuk memberikan solusi, baik atas kerja dirinya atau informasi

pada aparatur lain yang ada di desa ataupun hirarki organisasi yang lebih tinggi di tingkat kecamatan dan lanjutannya.

Serka Dody F. ( Babinsa Desa Beleke, wawancara tanggal 16 Nopember 2012),

berikut hasil wawancaranya :

Desa Beleke masih dicirikan dengan kemiskinan, pendidikan rendah...dapat saya katakan sebaai warisan generasi sebelumnya, bahkan lebih parah...kalau dulu masih ada tanah untuk bertani sedikit, kalau sekarang banyak yang tidak mempunyai lahan garapan....saya selalu menegaskan pada bapak-bapak yang ada sekarang penting anaknya bisa membaca dan menulis dengan baik, jadi bisa menjadi TKI dan lainnya.

Lapangan pekerjaan di sini sedikit, sehingga desa ini dulu dikenal sebagai desa yang rawan...selama tugas yang saya jalankan saya menggunakan pendekatan kekeluargaan, keliling malam sudah menjadi kebiasaan, mereka semua sudah kenal dengan baik....saya katakan saya orang luar, ingin bapak-bapak sejahtera...mari kita bangun desa ini...harus mereka tahu niat baik kami, bukan sebagai intel atau apa yang menyebabkan mereka merasa diawasi.....

Babinsa di atas dalam memberikan informasi atas tugas yang dijalankan tidak menyinggung masalah ketahanan nasional, karena telah dijalankan dalam kurun waktu yang panjang selama bertugas lebih dari lima tahun di desa binaan tersebut. Perhatian dalam pelaksanaan tugas pada periode akhir ini lebih pada permasalahan dasar yang melingkupi masyarakat, yaitu kemiskinan yang disebabkan rendahnya pendidikan dan tidak memiliki sumber daya untuk aktivitas ekonomi. Solusi yang diarahkan oleh informan di atas adalah kesadaran pentingnya pendidikan, sehingga ada alternatif untuk menjadi TKI atau aktivitas ekonomi untuk generasi berikutnya.

Informasi yang diperoleh dari informan (Babinsa di wilayah Kodim 1606/Lombok Barat ) mengenai tugas yang dijalankan relatif menunjukkan informasi yang sama, yaitu

pelaksanaan tugas dalam bidang ketahanan, selanjutnya fokus pada permasalahan esensial yang ada di desa binaan, seperti aspek sosial ekonomi. Terdapat delapan wilayah kerja koramil dalam Kondim 1606/Lombok Barat, diupayakan untuk mendapatkan informan dari setiap koramil. Informan di atas telah melingkupi Koramil 01-04, selanjutnya dicari informan (Babinsa dari Koramil 05-08), sehingga diperoleh informasi yang luas.

Serma M. Arief ( Babinsa Kelurahan Monjok-Koramil 1606-05/Mataram, wawancara tanggal 16 Nopember 2012), berikut informasinya :

Wilayah Kelurahan Monjok lebih banyak orang-orang pintar, pendidikan tinggi, pegawai, pebisnis...karena lebih banyak pendatang, ada pemukiman baru (BTN)...dapat dinyatakan tidak ada permasalahan mendasar..tetapi perhatian saya selama ini adalah warga asli....itu biasa pasti tertinggal dengan pekerjaan sebagai buruh dan sejenisnya...gap sosial tidak terjadi, karena para pendatang berpendidikan, bahkan menjadi tempat untuk bekerja seperti pembantu, jaga malam dan lainnya.....  
Saya sendiri dalam bekerja di siang hari berada di Kantor Lurah, tergantung juga pada hasil koordinasi dengan lurah dalam beraktivitas...wujud kerja lain juga tergantung pada pengarahan dari Danramil

Ada peran penting Danramil dalam memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas Babinsa, tentu atas dasar laporan sebelumnya mengenai kondisi wilayah binaan, baik berhubungan dengan kondisi ketahanan, sosial, ekonomi dan aspek lainnya. Pengarahan ini penting pada setiap Babinsa, sehingga ada kesatuan gerak pada setiap wilayah Koramil, tentu ada spesifikasi tertentu pada setiap wilayah binaan sesuai fakta gap yang ada. Penekanan pada aspek ini, atas dasar informasi Babinsa di atas bahwa tugas yang dilakukan juga tergantung pada hasil pengarahan Danramil.

Serma Hariyanto ( Babinsa Kelurahan Karang Pule, wawancara tanggal 16 Nopember 2012) berikut hasil wawancaranya :

Kelurahan Karang Pule tidak dapat dinyatakan sebagai wilayah pertanian, tidak juga sebagai ciri perkotaan...dapat dinyatakan sebagai wilayah dan kehidupan transisi...mengandalkan sektor pertanian dipastikan tidak bisa, karena lahan telah menyempit...pilihan sebagai buruh bangunan, tukang bangunan, industri kecil, pedagang di pasar dan ragam pekerjaan lain menjadi pilihan...para pemudanya juga demikian, telah mulai mempelajari hal baru di luar kegiatan ekonomi orang tuanya....kondisi umum kondusif.

Walaupun demikian, perhatian pada sumber konflik, kenakalan remaja, penggunaan narkoba menjadi fokus perhatian...bekerjasama dengan kepolisian, walau bukan tugas utama saya....tetapi jika ada masalah demikian, pasti saya akan terlibat, jadi lebih bagus kita cegah....

Komunikasi dan hubungan dalam pekerjaan dengan kepala desa berjalan dengan baik

Jabatan yang diemban oleh aparatur perlu memperhatikan aspek-aspek yang mempunyai hubungan dengan tugas yang diemban, walaupun tidak tercatat jelas dalam deskripsi tugas yang diemban. Jabatan sebagai Babinsa dapat dinyatakan sekecil apapun informasi harus diketahui dan dimanfaatkan dalam menjalankan tugas. Masalah ketahanan nasional prinsipnya bekerja dengan konsep intelegensi, potensi tersebut perlu digunakan oleh Babinsa dalam memberikan bantuan pada kerja lurah atau kepala desa untuk mempercepat penuntasan permasalahan yang ada dan memperlancar pembangunan.

Serka Siswanto ( Babinsa Kelurahan Jempong Barat, wawancara tanggal 16 Nopember 2012), berikut informasinya :

Kelurahan Jempong dan sekitarnya harus berbenah dengan baik....ternyata baru terlihat potensi yang ada, dengan banyaknya perguruan tinggi, pemukiman...banyaknya mahasiswa yang sedang kuliah, mahasiswa kos adalah peluang....citra baik masyarakat harus dimunculkan, bukan sebaliknya. Warga secara bersama diarahkan untuk menjaga keamanan dan mulai hidup dengan lingkungan yang nyaman....hal ini menjadi perhatian kami dengan lurah pada beberapa tahun terakhir ini... syukur terlihat hasilnya, banyak rumah penduduk telah ditata, sehingga ada mahasiswa yang kos, banyak yang menata rumahnya untuk berjualan.....

Tugas itu yang dapat dengan mudah saya berikan...tentu tugas dalam menelaah dan mengkaji dalam makna ketahanan nasional sudah pasti menjadi bidang tugas utama...kalau bapak mau bekerja ya ...mohon sesuaikan tugas bapak, yang ada hubungannya termasuk bagaimana kita dibutuhkan di masyarakat...

Ada bentuk perubahan yang mendasar dalam konsep berpikir peronal TNI, termasuk Babinsa. Fokus pekerjaan juga pada aspek sosial ekonomi dan aspek lain yang memberikan dampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Perannya dalam membantu masyarakat merubah perilaku guna mendapatkan manfaat dari peluang yang ada. Perubahan perilaku masyarakat tersebut sangat penting, jika dalam konsep ekonomi sosial mampu diarahkan, maka dapat dipastikan untuk potensi ketahanan nasional juga dapat diarahkan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan negara. Pelaksanaan pekerjaan tidak dapat hanya menggunakan konsep yang telah ditetapkan dari organisasi, tetapi bagaimana mampu melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sebagai subyek dan obyek dari tugas yang diemban.

Kondisi yang sama dengan Kelurahan Jempong adalah Kelurahan Dasan Agung, bahwa perubahan mutlak dilakukan untuk mendapatkan kesempatan yang ada. Banyaknya perguruan tinggi, kantor dan lainnya, maka perubahan dalam berperilaku menjadi perhatian. Peneting bagi generasi yang akan datang untuk tidak menjadi penonton di wilayah sendiri, bagaimana anak-anak disiapkan untuk ikut ambil bagian dalam mendapatkan pendidikan dan berkompetisi untuk mendapatkan kesempatan kerja atau penciptaan pekerjaan.

Uraian ini tercermin dalam hasil wawancara dengan Serma Marhaban (Serma, Babinsa Kelurahan Dasan Agung, wawancara tanggal 16 Nopember 2012), berikut hasil wawancaranya :

Warga Kelurahan Dasan Agung sedikit yang sarjana, sedikit yang menjadi pegawai, padahal setiap hari melihat orang datang untuk kuliah dan bekerja....terlihat senang memelihara perilaku yang tidak produktif...kondisi sekarang memang sudah ada sedikit perubahan, tetapi 5-10 tahun dulu (informasi yang saya peroleh) minum dan lainnya menjadi pemandangan...seharusnya mereka yang banyak kuliah...ternyata tidak. Pemukiman padat menjadi ciri, walaupun demikian masih banyak mahasiswa yang kos di daerah ini....karena memang kebutuhan dekat dengan kampus... Potensi lingkungan jelas sangat besar...tinggal bagaimana untuk dimanfaatkan...jangan berpuas hanya menjadi satpam, tukang sapu...daya juang generasi sebelumnya kurang.... Saya melihat ini yang sulit untuk diubah.... Pak lurah mau penyuluhan ...sudah mereka tahu dan lihat setiap harinya banyak orang datang berjuang ke wilayahnya...atau mungkin menjadi ciri dari penduduk asli suatu daerah...hanya menjadi penonton

Pada kasus di atas, sekilas ada sikap menyerah atau tidak mengetahui dengan jelas wujud kebijakan dan tugas yang dijalankan oleh Babinsa dan aparat di Kantor Lurah. Perilaku yang mengarah pada perubahan untuk mendapatkan peluang yang ada, bukan sebaliknya menjadi beban dari kondisi yang terus menerus bergerak menuju perbaikan untuk maju. Ciri pemukiman asli di Kelurahan Dasan Agung dapat dinyatakan sangat padat, tempat tinggal bukan lagi satu rumah, tetapi satu rumah terdiri atas beberapa kepala keluarga (hasil observasi, karena tertarik pada kondisi khusus di wilayah Kodim 1606/Lobar).

Serma Agus Jamil ( Babinsa Desa Pelangan, wawancara tanggal 20 Nopember 2012), berikut hasil wawancaranya :

Tugas utama kami adalah pengelolaan desa binaan sesuai pengarahan Danramil...apa yang ditugaskan kami jalankan dengan maksimal. Kondisi desa binaan kami informasikan pada Danramil ...beliau kemudian melakukan analisis dan memberikan saran atas apa yang kami jalankan....  
Penting kami di lapangan tidak hanya bekerja atas hirarki kami, tetapi juga dengan banyak aparat di desa...bekerja bersama memberikan solusi yang berarti untuk masyarakat

Perhatian diberikan pada dua hal dalam pelaksanaan tugas oleh Babinsa di atas, yaitu arahan yang diberikan atasan dan hasil kerjasama dengan petugas lain di desa binaan. Prinsip kerja tersebut penting, karena dalam wilayah binaan yang cukup luas, bukan sebagai petugas di kantor, kemampuan berkoordinasi dengan pihak lain menjadi sangat penting. Kemampuan dengan cepat menyesuaikan diri dengan aparatur lain menjadi pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan.

Serma M. Saleh ( Babinsa Desa Gunungsari, wawancara tanggal 20 Nopember 2012), berikut informasinya :

Babinsa mempunyai tugas di lapangan...temuan permasalahan di lapangan, langsung diperoleh dari masyarakat...temuan aspek ekonomi, kependudukan, potensi dan hambatan yang ada di desa menjadi perhatian...  
Tugas kami bukan hanya masalah ketentaraan...kami juga memperhatikan aspek sosial ekonomi, juga memberikan masukan atau sebaliknya dengan pejabat di pemerintahan desa.

Informasi yang diperoleh dari seluruh responden (Babinsa) telah membentuk keseragaman, bahwa tugas yang dijalankan bukan hanya masalah ketahanan nasional, tetapi lebih banyak menyesuaikan tugasnya dengan permasalahan ekonomi, sosial dan aspek lain yang seluruhnya berdampak atau tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan. Informasi dari Babinsa di wilayah kerja Kodim 1606/Lombok Barat, seperti Serka I Putu Wijaya ( Babinsa Batu Layar), Pelda Muhamad ( Babinsa Desa Gegerung dan Bug-bug),

Serma Abdul Hamid ( Babinsa Desa Karang Bayan), Pelda Syamsudin Jibril ( Babinsa Desa Duman), Serma Ruslan Adi ( Babinsa Desa Segerongan), Serka Saipul Bahri ( Babinsa Desa Langko), Pelda Zainal Abidin ( Babinsa Nyurlembang), Serka I Ketut Susila ( Babinsa Desa Dasan Tereng), Serka Muhazzabul Karim ( Babinsa Desa Sesaot dan Desa Buwun Sejati), Serka Budi Sujarwo ( Babinsa Desa Sembung dan Desa Peresak), Serda Sudirman ( Babinsa Desa Lembuak dan Desa Keru) dan Serma Dewa Nyoman Sayang ( Babinsa Desa Narmada) memberikan informasi yang sama, bahwa tugas Babinsa bukan hanya masalah ketahanan, tetapi disesuaikan dengan permasalahan sosial ekonomi yang ada di desa binaan. Perhatian diberikan pada permasalahan yang esensial di desa, sebagai hasil kajian sendiri dan atau kerjasama dengan aparat lain yang ada di desa binaan.

Informasi yang diperoleh dari seluruh informan tidak ada yang melepaskan diri dari permasalahan yang sedang terjadi di desa, bukan hanya masalah yang terkait dengan keamanan, kegiatan politik (pemilihan kepala desa atau kepala kampung), bukan hanya masalah konflik, tetapi juga memberikan bantuan pada masyarakat desa melalui kerjasama dengan pihak lain di pemerintahan desa dalam mempercepat penciptaan masyarakat yang sejahtera.

Informan dalam pelaksanaan pekerjaan seluruhnya melakukan koordinasi dengan aparat kantor lurah atau desa serta dengan pejabat lain terkait dengan adanya proyek yang masuk di wilayah binaan. Ragam informasi di atas juga menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Babinsa di seluruh wilayah binaan lebih banyak berada di lapangan, walaupun mempunyai ruang kerja kantor desa/kelurahan. Dapat juga dinyatakan bahwa Babinsa



dalam menjalankan tugasnya tidak mempunyai jam kerja layaknya aparatur kantoran, karena banyak yang menjelaskan Babinsa juga melakukan tugas siskamling atau berada di tengah masyarakat dalam ragam aktivitas.

## 2. Bentuk Hasil Kerja Babinsa di Wilayah Kodim 1606/Lombok Barat

Desain riset, terutama dalam penelitian kualitatif dapat saja mengalami perubahan sesuai dengan kondisi di lapangan. Informasi bagaimana pekerjaan Babinsa dijalankan tidak hanya diperoleh dari subyek terkait, tetapi dengan mitra kerja di wilayah binaan dan jabatan yang memberikan pengawasan atas fungsinya. Hasil wawancara atas operasional fungsi aktual para Babinsa telah memberikan informasi yang luas mengenai pekerjaan yang dijalankan, konsep kemitraan dan pertanggungjawabannya. Konsep kemitraan telah diperoleh informasinya dari kepala desa dan aparatur lain di pemerintahan desa/kelurahan tempat Babinsa bertugas.

Hasil kerja aktual dapat terlihat dari lapangan, informasi ini juga telah diperoleh dari mitra kerja dan Babinsa sendiri. Guna mendapatkan kesahihan informasi dilakukan *cross check*, wawancara dikembangkan dengan Danramil. Wawancara dilakukan dengan Kapten Inf Marito ( Danramil 1606-01/Cakranegara, wawancara tanggal 1 Desember 2012), berhubungan dengan tugas Babinsa :

Tugas kami memberikan jaminan informasi potensi ketahanan nasional, perlawanan rakyat, data purnawirawan dan data lain yang sifatnya pertahanan nasional....Data ini diawal tugas Babinsa telah direkap semuanya, perubahan terkait hal tersebut tentu ada, tetapi kurun waktu panjang....dalam kondisi sekarang “keadaan aman, tidak ada masalah gangguan atau konflik” fokus pada peran TNI dalam menjalankan kemanunggalannya dengan rakyat...lebih pada bantuan sosial, kami sendiri sering mengadakan pengobatan gratis pada rakyat

miskin, dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan lintas sektoral.....Para Babinsa di wilayah binaan kami ...seluruhnya menjalankan tugas dengan baik, kami mengadakan pertemuan rutin dan jika sewaktu-waktu dapat kami hubungi dengan cepat, karena ada media komunikasi sendiri...

Informasi di atas relevan dengan hasil wawancara dengan para Babinsa yang ada di wilayah Danamil 1606-01/Cakranegara, bahwa dalam pelaksanaan tugas rutin selama ini lebih fokus pada masalah sosial ekonomi dan masalah lain yang sifatnya mencegah kemungkinan konflik serta pemeliharaan ragam potensi ekonomi serta sumber daya lainnya. Kapten Inf Sumadji (Danramil 1606-02/Tanjung, wawancara tanggal 5 Desember 2012) berikut hasil wawancaranya :

Saya terkadang meminta para Babinsa membuat laporan tertulis mengenai kondisi wilayah binaan masing-masing. Hubungan dengan aspek pertahanan nasional...Banyak tugas yang sifatnya langsung dari intruksi saya, sesuai dengan apa yang menjadi orientasi dari atasan saya juga....kondisi terakhir ini fokus pada peran langsung dari prajurit pada pembangunan....fokus pada kemanunggalan dengan rakyat...cepat tanggap jika ada bencana dan lainnya

Lingkup internal organisasi TNI, dapat dipastikan Babinsa sebagai pemberi informasi awal atas kondisi wilayah binaan. Kebijakan apa yang dibutuhkan, bentuk implementasinya murni dari informasi Babinsa dan kemampuan penelaahan informasi dari hirarki yang lebih tinggi, guna memberikan andil dalam percepatan pembangunan atau pemecahan suatu masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kapten Inf Raden Sugondo (Danramil 1606-03/Bayan, wawancara 8 Desember 2012) menyatakan :

Prajurit kami ada yang hidup dan selalu ada di wilayah binaan...desa/kelurahan. Bekerja di lapangan untuk mengenali masalah yang ada, membina komunikasi dengan aparat lain di desa untuk mendapatkan ragam kebijakan yang masuk. Posisi Babinsa dalam hirarki struktur organisasi

TNI sangat penting, karena prajurit yang dekat dengan masyarakat, dibekali ragam keterampilan, terutama kemampuan mengenali gejala hankam, termasuk juga melakukan inventaris sumber daya yang ada di desa....kami pernah memberikan bantuan pengadaan sumber air dari mata air ke tempat penduduk, sebagai wujud kerja Babinsa mengenali bahwa masalah yang ada di Bayan terkait kesulitan memperoleh air bersih....informasi dari Babinsa dapat digunakan oleh semua pihak kecuali yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan nasional, sepanjang untuk masalah pembangunan tidak menjadi masalah....dalam menjalankan tugasnya para Babinsa tidak menggunakan seragam TNI, itu untuk menghilangkan kesan "prajurit", kecuali ada kegiatan resmi

Informasi di atas memberikan penegasan atas informasi sebelumnya, termasuk juga peran Babinsa sebagai aparatur negara, di mana manfaat dari hasil kerjanya dapat digunakan semua pihak, kecuali hal yang menyangkut informasi khusus. Maknanya adalah lembaga publik yang ada, tidak perlu melakukan pengumpulan data primer kembali disaat akan merumuskan suatu kebijakan, karena informasi esensial mengenai kondisi ekonomi, sosial, sumber daya dan lainnya telah dimiliki oleh Babinsa. Tugas khusus dari aparat untuk mengenali wilayah binaannya dengan sangat detail hanya dimiliki oleh aparatur Babinsa, baik sebagai bahan laporan pada atasan atau dasarnya dalam menjalankan tugas rutin.

Berbeda dengan tugas sensus, lebih pada pengumpulan data terakhir atau kemungkinan bias informasi. Tugas yang dijalankan oleh Babinsa dalam pengenalan wilayah binaan sepanjang tugasnya atau dilakukan secara terus menerus. Informasi tersebut akan semakin valid, jika pada setiap temuan dilakukan pencatatan, sehingga muncul sebagai dokumentasi kerjanya. Dokumen secara rinci atas hasil kerja Babinsa dapat diperoleh pada Danramil. Ditegaskan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan

Kapten Inf Muhdar, S.Pd ( Danramil 1606-06/Sekotong, wawancara tanggal 11 Desember 2012), sebagai berikut :

Laporan tertulis saya biasakan pada para Babinsa mengenai hasil kerjanya di desa binaan...tugas yang demikian kita dapat memperoleh data dokumentasi, jadi bukan atas ingatan semata, karena khawatir akan bercampur dengan persepsi...pada suatu periode saya menerapkan *focus discusion group*...penting untuk mengenali permasalahan yang ada serta kemungkinan solusi dari para Babinsa...kerja demikian juga dapat memberikan manfaat rasa kebersamaan, saling mengenal satu sama lain, dapat saja koordinasi dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan antar Babinsa.

Selama ini para Babinsa di wilayah Koramil 1606-06/Sekotong telah menjalankan tugasnya dengan baik..

Pelaksanaan pekerjaan pada empat wilayah Kodim 1606/Lombok Barat tergolong berjalan dengan baik, relevan dengan informasi yang diberikan oleh mitra kerja di desa dan informasi dari para Babinsa. Kapten Inf Sumani (Danramil 1606-07/Gunungsari, wawancara tanggal 14 Desember 2012) juga memberikan informasi yang sama, disebabkan karena konsep pengawasan dan pertanggungjawaban rutin yang harus dilakukan oleh Babinsa. Pelaksanaan tugas yang dilakukan Danramil di atas juga melakukan pengawasan langsung atas kerja Babinsa, bukan hanya dengan cara menunggu laporan pertanggungjawaban.

### **3. Pengenalan Hambatan dan Pendukung Pelaksanaan Tugas Hubungan dengan Kebijakan Publik**

Babinsa dalam pelaksanaan tugas di lapangan lebih banyak pada tugas pengenalan wilayah binaan dan taraf tindakan dari ragam pemecahan masalah, sesuai dengan hasil koordinasi dengan kepala desa. Pelaksanaan tugas juga berhubungan dengan hasil pengarahan yang diberikan oleh atasan, di mana seluruhnya dilaporkan pada atasan.

Pelaksanaan tugas Babinsa memerlukan kemampuan analisis atas kondisi yang ada di wilayah binaan (potensi atau hambatan pada aspek ketahanan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya). Kemampuan melakukan pengumpulan data, analisis, dan implementasi menjadi sangat penting, bahkan bagaimana membuat data tersebut sebagai variabel penting untuk pengambilan keputusan menjadi sangat penting.

Babinsa telah dibekali dengan pengetahuan intelegensi, diharapkan juga dapat ditransfer untuk tugas yang berhubungan dengan kemampuan dalam pengumpulan data, analisis dan menjadikannya sebagai informasi untuk aspek non ketahanan. Wujud hambatan dalam pelaksanaan tugas Babinsa terkait dengan tugas ditampilkan dalam bentuk rekapitulasi hasil wawancara, sebagai berikut.

Tabel 4.2. Hambatan dan Pendukung Pelaksanaan Tugas Babinsa di Wilayah Kodim 1606/ Kabupaten Lombok Barat terkait Perumusan Kebijakan Publik Tahun 2012

No.	Nama	Masalah/Hambatan	Pendukung
1	Sujudi	Dibutuhkan media kerja, pelatihan mendalam	Kemitraan kerja di tingkat lapangan; bantuan pimpinan Danramil
2	I Wayan Ngenteg	Alat dan skill	Dukungan masyarakat dan pemerintah desa
3	Adul Kasim	Media kerja	Harmonisasi hubungan di tingkat desa/kel.
4	I Ketut Wiliana	-	Dukungan masyarakat dan pimpinan
5	Silahudin	Media kerja, pengetahuan dan dukungan dari instansi	Dukungan masyarakat dan pimpinan
6	Hada Umar	-	Harmonisasi hubungan
7	Suhermanto	Skil	Pembelajaran dan pengarahan atasan
8	Wiyarto	-	Kemitraan di lokasi dan pimpinan
9	Abdilah	Pengetahuan	Harmonisasi hubungan di lapangan
10	Ali	Media kerja	Dukungan masyarakat
11	I Komang Diarna	Kebersamaan	Harmonisasi aparatur dan masyarakat
12	Saipuddin	Kebersamaan	Dukungan masyarakat
13	Muhamad Baihaqi	Persamaan komitmen	Dukungan masyarakat
14	Samsudin	-	Dukungan masyarakat
15	Supriyadi	Media kerja	Dukungan masyarakat
16	Tambe	Alat dan skill	Dukungan masyarakat dan pimpinan
17	Munawar	Kebersamaan	Dukungan masyarakat

Lanjutan Tabel 4.2.

18	Md Sudiartawan	Media kerja	Dukungan masyarakat
19	Sukardi	-	Dukungan masyarakat dan pimpinan
20	I Ketut Arnama	-	Dukungan masyarakat
21	Pramono	Media kerja	Dukungan masyarakat dan pimpinan
22	I Nyoman Kartika	-	Dukungan masyarakat dan pimpinan
23	Ahmad	-	Dukungan masyarakat
24	Wage Rudolf S.	Kebersamaan	Dukungan masyarakat
25	Aminullah	-	Dukungan masyarakat
26	M. Arief Sugihartono	Media kerja	Kemitraan dengan aparaturnya desa
27	Hariyanto	-	Bimbingan dari atas, kemitraan dengan aparaturnya desa dan dukungan masyarakat
28	Siswanto	-	Harmonisasi hubungan di lapangan
29	Marhaban	Dukungan semua pihak	Harmonisasi hubungan di lapangan
30	Agus Jamil	-	Harmonisasi hubungan di lapangan
31	Mohamad Saleh	Media kerja	Dukungan masyarakat
32	I Putu Wijaya	-	Harmonisasi hubungan di lapangan
33	Muhamad	Media kerja	Harmonisasi hubungan di lapangan
34	Abdul Hamid	Media kerja	Harmonisasi hubungan di lapangan
35	Syahrudin Jibril	Media kerja	Harmonisasi hubungan di lapangan
36	Ruslan Adi Toyo	Media kerja	Dukungan masyarakat
37	Saiful Bahri	Media kerja	Dukungan masyarakat
38	Zaenal Abidin	Media kerja	Dukungan masyarakat
39	I Ketut Susila	Pengetahuan, pendidikan	Dukungan masyarakat
40	Nursamin	Pengetahuan, pendidikan	Dukungan masyarakat
41	I Made Bratha	-	Kerjasama dengan aparaturnya desa
42	Muhazzabul Karim	-	Harmonisasi hubungan di lapangan
43	Budhi Sujarwo	-	Dukungan masyarakat
44	Sudirman	-	Kemitraan dengan aparaturnya desa/kel.
45	Dewa Nym Sayang	Media kerja	Dukungan masyarakat

Sumber : Hasil Wawancara dengan Babinsa di Wilayah Kodim 1606/Lombok Barat

Hambatan dalam pelaksanaan tugas oleh informan tertentu (Babinsa) ada yang menyatakan tidak ada, termasuk cukup banyak yang memberikan informasi tersebut. Pelaksanaan tugas dalam berhubungan dengan masyarakat, hubungan kerja dengan mitra dan konsep pertanggungjawaban tidak ada masalah atau tidak ada faktor yang menghambat untuk menghasilkan kualitas kerja yang tinggi. Pelaksanaan kerja yang dijalankan selama ini, kesenangan dan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan seluruhnya bersumber dari

dukungan masyarakat, harmonisasi hubungan dengan masyarakat dan aparatur desa/kelurahan serta adanya bimbingan dari pimpinan.

Pelaksanaan tugas Babinsa, baik berhubungan dengan tugas dalam mengenali wilayah binaan pada aspek pertahanan nasional, potensi ketahanan rakyat, data TNI paripurna dan lainnya serta tugas dalam melakukan inventaris potensi ekonomi diharapkan bukan sebatas persepsi, tetapi ada data yang mampu disediakan. Konteks ini telah dijawab oleh atasan, bahwa laporan kerja yang dilakukan juga bersifat tertulis. Artinya, Babinsa yang menyatakan tidak hambatan telah mempunyai alat atau media kerja serta telah ada pengetahuan untuk mengoperasikannya.

Uraian tugas secara empiris dari para informan juga menunjukkan bahwa pencatatan atau pedokomenan hasil kerja dipastikan ada. Ada cukup banyak Babinsa yang memberikan informasi bahwa hambatan kerjanya pada media kerja, baik tempat kerja khusus di kantor atau alat/teknologi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan. Hasil wawancara menunjukkan media yang dimaksud lebih identik dengan laptop atau alat sejenisnya untuk mencatat hasil kerja, bahkan untuk dapat dengan cepat mengirim hasil kerja pada atasan (media email dan lainnya). Koordinasi kerja selama ini hanya sebatas komunikasi dengan menggunakan alat berupa *hand phone*, tentu dalam konsep pelaporan menjadi tidak jelas.

Temuan lain dalam hambatan kerja yang dilakukan para Babinsa adalah dukungan dari instansi sendiri dan instansi lain serta komitmen yang sama dalam memecahkan permasalahan masyarakat. Informan juga ada yang menyatakan bahwa hambatan kerjanya

berupa pengetahuan dan keterampilan yang masih terbatas, khususnya dalam pelaksanaan tugas non hankam. Selama ini, kemampuan tersebut lebih banyak tercipta dari pembelajaran di lapangan, selama melakukan koordinasi kerja dengan aparat desa serta aparatur yang mempunyai program atau kebijakan atau proyek di desa terkait.

#### **4. Pelaksanaan Tugas Babinsa dalam Hubungan dengan Perumusan Kebijakan Publik**

Pelaksanaan tugas rutin Babinsa, baik informasi dari mitra kerja, atasan dan pribadi bersangkutan dapat ditemukan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan, baik ditahap awal perencanaan, implementasi dan evaluasi kembali berjalan dengan baik. Temuan tersebut untuk tingkat pemerintahan desa, bukan dengan level pengambil kebijakan di tingkat yang lebih tinggi, misalnya BAPPEDA, PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan lainnya.

Wawancara mendalam dengan para Babinsa sebagian besar tidak pernah dimintai informasi oleh organisasi publik yang berada pada level lebih tinggi (kecamatan atau kota/kabupaten). Taraf informasi dari Babinsa hanya diperlukan oleh level pemerintahan desa atau kelurahan. Informasi pada kasus ini ditampilkan pada Lampiran 4, tanda negatif (-) menunjukkan Babinsa tidak pernah dimintai informasi, pendapat dan lainnya dalam rangka untuk perumusan suatu kebijakan publik.

Kerja Babinsa bagi organisasi publik di Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara tidak ditemukan mencari informasi langsung atas permasalahan esensial masyarakat desa dari para Babinsa. Potensi tersebut sama sekali



tidak digunakan, karena mungkin saja sebagai implikasi kebutuhan desa atas suatu pembangunan telah diusulkan dalam musyawarah pembangunan desa (Musrenbang). Aparatur desa melakukan koordinasi dengan baik dengan para Babinsa, bahkan meliputi aspek yang sangat luas (informasinya pada rutinitas tugas yang dijalankan Babinsa).

Komunikasi, dalam makna pemberian informasi, koordinasi, pertanggungjawaban hanya terjadi pada level koordinasi dengan aparat yang ada di desa, pertanggungjawaban dengan hirarki TNI dan komunikasi dengan masyarakat. Bentuk komunikasi dalam konteks dengan organisasi publik yang ada di hirarki pemerintahan lebih tinggi (kecamatan dan kabupaten; ragam organisasi publiknya) relatif tidak terjadi. Hanya ditemukan tiga orang Babinsa yang pernah dimintai informasi dalam kaitan dengan kebutuhan esensial masyarakat sebagai dasar perumusan kebijakan publik.

Konteks di atas adalah organisasi publik yang aktif dalam mencari informasi, bukan atas inisiatif Babinsa dalam memberikan informasi tersebut. Serma Sujudi ( Babinsa Kelurahan Cakra Barat, wawancara tanggal 1 Nopember 2012), memberikan informasi sebagai berikut :

Pejabat yang saat itu aktif mencari informasi adalah PU, dalam kaitan dengan penanganan masalah draenase guna menghindari banjir...Kebetulan saat pejabat tersebut turun lapangan, bersama dengan kepala desa ...terjadi banyak komunikasi..diharapkan saran saya untuk menggunakan jasa padat karya secara rutin digunakan...terutama menggunakan buruh-buruh yang ada di wilayah binaan....

Saat banjir atau sejenisnya merupakan peran saya sebagai Babinsa dalam memberikan bantuan, bahkan menjadi arahan dari Danramil...dapat menggunakan potensi yang di kesatuan

Serka Silahudin (Babinsa Kelurahan Mayura), wawancara tanggal 5 Nopember 2012 memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi publik dalam meminta informasinya sebagai dasar perumusan kebijakan publik. Hasil wawancaranya sebagai berikut :

Dinas Budpar dalam upaya mengembangkan potensi Taman Mayura...pejabat dari dinas tersebut meminta informasi dari sudut pandang risiko dan aspek lainnya jika secara rutin dilakukan kegiatan wisata, misalnya hiburan di taman tersebut....saat tersebut saya bersama dengan anggota kepolisian yang bertugas, kami memberikan sudut pandang dari keamanan dan keberadaan pengunjung ....

Serma Munawar ( Babinsa Desa Bayan, wawancara tanggal 11 Nopember 2012) juga informan dari Samsudin, relatif sama berhubungan dengan program kesehatan yang akan dijalankan oleh Dinas Kesehatan. Informasi yang dibutuhkan terkait dengan optimalisasi penggunaan fasilitas sanitasi oleh masyarakat. Informasi yang dimiliki oleh Babinsa mengenai potensi dan permasalahan sosial, ekonomi dan pendidikan desa binaan seluruhnya telah disampaikan dalam musyawarah pembangunan desa, sehingga para pengambil kebijakan tidak secara spesifik dalam menggunakan potensi Babinsa dalam mendukung perumusan kebijakan publik.

Tahap selanjutnya dari perumusan kebijakan publik adalah tahap implementasi atau penguatan terapan kebijakan publik di masyarakat desa dan kelurahan. Temuan dalam penelitian ini adalah seluruh Babinsa dilibatkan dalam penguatan implementasinya (Lampiran 4). Hasil wawancara mendalam selama bulan Nopember 2012 menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program yang masuk di wilayah binaan diketahui oleh Babinsa dan memberikan dukungan yang optimal dalam implementasinya.

Babinsa secara umum dekat dengan masyarakat, mengetahui dengan baik potensi, penduduk yang menjadi tokoh masyarakat dan kemungkinan golongan masyarakat yang memberikan dukungan atau memberikan hambatan atas kerja kepala desa/lurah (setiap wilayah ada nuansa politik, terutama di desa sebagai implikasi pemilihan langsung) dapat lebih mengarahkan pelaksanaan kebijakan, terlebih yang membutuhkan kerja atau kesadaran masyarakat. Ada potensi Babinsa yang tinggi digunakan dalam kebijakan publik, tetapi masih sebatas penguatan implementasinya.

Tahap kebijakan publik yang juga menjadi perhatian dalam riset ini adalah evaluasi kebijakan yang masuk ke desa binaan Babinsa. Organisasi publik (PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappeda Kota/Kabupaten) melalui kerja para pejabatnya ternyata tidak ada yang menggunakan potensi Babinsa dalam memberikan evaluasi terapannya. Temuan ini memberikan implikasi pada rendahnya kemungkinan perbaikan dari kebijakan publik yang diterapkan oleh organisasi publik.

##### **5. Informan Mitra Kerja Aparatur Kelurahan/Desa**

Babinsa dalam keberadaan di masyarakat menjalankan ragam fungsi, perlu diketahui keberadaan fungsi tersebut dengan mitra kerja di setiap desa dan lurah. Wawancara dilakukan dengan lurah/desa dan aparatur lainnya berhubungan dengan koordinasi yang terkait tugas yang diemban.

S.I (Lurah Pagutan Barat-Kota Mataram, wawancara tanggal 2 November 2012), sebagai berikut :

Tugas penting Babinsa di wilayah kami adalah membantu menjaga stabilitas, membantu kerja polisi....sama dengan tugas Polri dan TNI dalam lingkup wilayah yang lebih sempit.....kami dalam pelaksanaan pekerjaan juga membicarakan masalah potensi yang ada di kelurahan dan faktor yang menjadi penghambat ragam aspek kehidupan sosial ekonomi... Dalam setiap hubungan kerja kami tentu berupaya untuk mengetahui bidang tugasnya...sehingga kami dapat memberikan dukungan (*support*)...

Pada hubungan kerja di atas, pimpinan wilayah kelurahan telah mengetahui fungsi dan tugas Babinsa, bukan sebatas keamanan dan stabilitas semata. Koordinasi kerja dapat berjalan dengan baik, berimplikasi pada penggunaan potensi aparatur negara, lintas fungsi dalam membangun masyarakat. Wawancara dilanjutkan dengan Sekretaris Kelurahan Pagutan Barat (wawancara tanggal 2 November 2012), sebagai berikut :

Babinsa di wilayah kami sering datang ke kantor lurah...jadi permasalahan yang ada relatif diketahui (semua masalah). Ikut urun rembuk dalam mengatasi masalah....bukan hanya pada kerja keamanan wilayah saja.

Lurah Dasan Agung (wawancara tanggal 5 Nopember 2012) memberikan informasi atas pengetahuannya pada tugas Babinsa sebagai berikut :

Kami mitra kerja...tidak ada ketertapan atas permasalahan yang ada di sini. Semua kami jadikan potensi dalam membangun desa kami...bapak tahu kompleksitas masalah di wilayah kami, dari ekonomi, sosial, pengangguran, potensi penduduk dengan banyaknya mahasiswa dan lainnya...Babinsa dalam setiap hari kerja selalu menyempatkan diri hadir, karena memang di sini kantornya....ada upaya kami agar Babinsa punya ruang, kalau meja kerja sudah ada....

Lurah Cilinaya (wawancara tanggal 5 Nopember 2012) memberikan informasi sebagai berikut :

Babinsa oleh masyarakat hanya ditahu sebagai fungsi aparaturnya TNI, begitu juga kami karena yang terlihat fungsinya dominan untuk stabilitas wilayah....

Informasi tersebut memberikan gambaran faktual dari kerja Babinsa, lebih pada pelaksanaan tugas yang dijalankannya di masyarakat. Penggalan informasi mengenai perannya dalam melakukan inventaris dan pemeliharaan potensi di wilayah kerja ditegaskan lebih pada aspek keamanan, dengan koordinasi pada petugas polisi. Lurah Cakra Barat pada waktu wawancara yang sama memberikan informasi mengenai Babinsa, sebagai berikut :

Babinsa kami lebih memberikan penekanan pada manunggalnya TNI dan rakyat, tentu dalam segala aspek. Pertahanan wilayah yang paling dasar, lebih jauh pada aspek-aspek operasional lainnya yang memberikan bantuan keamanan dan membantu dalam beragam diskusi kami dalam menghadapi permasalahan yang ada...

Kepala Desa Pemenang (wawancara tanggal 8 Nopember 2012) sebagai berikut :  
Kondisi umum aparat terlihat disegani sama masyarakat...Babinsa di sini dekat dengan masyarakat, karena tinggal di desa kami....Babinsa mengetahui segala hal mengenai desa kami.. karena beliau rajin terjun di masyarakat, bahkan terlibat dalam ronda ....

Ada potensi yang besar bahwa Babinsa mengetahui ragam permasalahan dan keunggulan yang ada di masyarakat, karena melakukan aktivitas bersama masyarakat. Berhubungan dengan masyarakat akan tergalikan seluruh permasalahan dan potensi yang ada, sebagai dasar dalam memberikan pelaporan ataupun pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan ketahanan ataupun inventaris potensi ekonomi (SDA, SDM, SDB) yang ada di wilayah kerja.

Kepala Desa Jenggala (wawancara tanggal 12 Nopember 2012), berikut hasil wawancaranya :

Babinsa kami menggunakan seragam kalau ada acara formal, seperti kunjungan pejabat...sehari-hari berpakaian biasa, datang ke kantor juga biasa saja...beliau bermitra dengan kami...terlebih yang bersangkutan ternyata bertani dan berkebun di sini.. telah menjadi penduduk sini...keamanan kami kondusif, beliau juga senang diajak membahas masalah pembangunan atau masalah yang sedang ada

Kepala Desa Tegal Maja (wawancara tanggal 12 Nopember 2012), berikut hasil

wawancaranya :

Kami sebagai kepala desa mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan, ragam pelayanan, menerima program pembangunan dari pemerintah dan lainnya....kerja kami terbantuan dengan adanya Babinsa, beberapa kali ada kerja bersama melibatkan TNI...saya pikir seluruhnya sebagai peran Babinsa kami...terima kasih atas kerjanya

Pendapat yang positif atas kerja yang dibangun oleh Babinsa oleh aparatur desa, terutama oleh kepala desa di wilayah kerja masing-masing. Penelusuran informasi terus dilakukan guna mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Wawancara dengan

Kepala Desa Jenggala (wawancara tanggal 12 Nopember 2012), sebagai berikut :

Kami membutuhkan banyak program dan keberadaan aparatur di desa, babinsa, sarjana pendamping, mahasiswa KKN dan lainnya...seluruhnya kami butuhkan...Babinsa kami pernah mengusulkan agar beliau mempunyai rumah tinggal atau ruang kerja di kantor desa...tapi belum kami wujudkan...ada aparatur di desa kami memberikan bantuan dalam memecahkan beragam masalah. Babinsa kami tidak berada di desa...jadi tidak optimal

Permasalahan ruang kerja dan tempat tinggal Babinsa menjadi permasalahan yang diungkap oleh Kepala Jenggala, sebagai indikasi tidak optimalnya peran Babinsa bagi wilayah kerjanya. Wawancara lebih mendalam dilakukan, terkait dengan kerja yang dijalankan, yang bersangkutan memberikan informasi kurang banyak pergerakan dan masukan atau upaya untuk membangun kemitraan.

Kerja yang dijalankan oleh Babinsa lebih banyak pada wilayah kerja, bukan berkantor seperti aparatur lainnya, seperti di Kantor Babinsa, tetapi dominan berada di wilayah binaannya (desa atau kelurahan). Wawancara dilakukan dengan aparatur desa yang berada jauh dari kota, seperti Desa Senaru mengenai keberadaan Babinsa, wawancara dilakukan tanggal 14 Nopember 2012) :

Deweq (saya) membutuhkan bantuan dari semua pihak....kami mempunyai potensi alam, tapi kami hanya sebagai masyarakat yang dilalui saja....ada banyak hotel atau penginapan...tapi kami menjadi penonton saja...Babinsa tidak ada yang dapat kami banggakan perannya...sehausnya beliau yang mengkoordinir masalah keamanan, tetapi beliau perlu diundang...jadi tidak tahu apa masalah kami ...

Temuan dalam hasil wawancara ini perlu diperdalam, karena pada dasarnya hasil wawancara awal ini terkait dengan pengetahuan mitra kerja Babinsa di wilayah binaan, sehingga dapat melakukan koordinasi antar aparatur yang ada, guna memberikan dukungan atas potensi yang ada dan mencari pemecahan masalah atas hambatan yang ada, terkait dengan pembangunan di desa.

Wawancara kembali dilakukan pada desa yang jauh dari pusat pemerintahan kecamatan. Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa Selengan (wawancara tanggal 17 Nopember 2012) :

Babinsa berperan penting di desa kami....yang bersangkutan aktif dalam ragam kegiatan di desa, ikut terlibat dalam memberikan saran dan lainnya. Tapi sayang, Babinsa di desa kami tidak bisa memberikan perannya secara utuh, karena tidak mempunyai tempat atau pos di desa  
Babinsa aktif dalam upaya memecahkan masalah pendidikan, pertanian dan lainnya.... Kerja yang dilakukan memberikan dukungan atas kerja aparatur yang ada, seperti PPL, bidan dan lainnya

Hasil wawancara di atas memberikan pembuktian bahwa Babinsa di Desa Selengan menjalankan tugasnya dengan baik, bukan sebatas pertahanan dan keamanan, tetapi juga masalah sosial ekonomi masyarakat. Potensi dari Babinsa, kesadaran atas tugasnya yang luas, bukan sebatas pertahanan dan keamanan serta bukan sebatas memberikan laporan kerja pada Danramil, tetapi mempunyai implikasi peran di masyarakat.

Berbagai informasi di atas dalam rangka mengetahui peran yang dijalankan oleh Babinsa atas dasar informasi dari mitra kerja. Sekdes Selengan (wawancara tanggal 17 Nopember 2012) memberikan informasi mengenai keberadaan Babinsa :

Petugas seperti bidan, Babinsa dan lainnya yang memberikan pelayanan pada masyarakat harusnya mempunyai tempat tinggal dan sekaligus sebagai kantor kerja di desa. Secara utuh Babinsa akan memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan, siskamling dan lainnya...kami merasa aman di desa jika ada petugas. Desa aman, kami dapat beraktivitas ekonomi dengan baik, hasil pertanian aman dan lainnya dari gangguan

Informan di atas memberikan pernyataan bahwa aparaturnegara yang memberikan pelayanan pada masyarakat hendaknya mempunyai tempat tinggal di desa dan menjadi pos kerjanya. Pemerintah perlu memperhatikan aspek di atas, sehingga peran dari aparaturnegara tersebut maksimal dalam memberikan dukungan kesejahteraan. Keberadaan Babinsa menurut informan di atas akan memberikan jaminan keamanan, menjadi syarat penting dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Penelitian ini tidak melakukan kajian atas tugas Babinsa atas aspek yang berhubungan dengan penggalan potensi kekuatan pertahanan nasional, pelatihan militer dan aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan militer dalam keadaan operasi militer. Penelitian ini fokus pada peran Babinsa dalam keadaan nasional yang normal, sehingga



perannya pada aspek ekonomi sosial menjadi yang utama. Peran tersebut perlu diketahui telah disadari atau tidak oleh mitra kerjanya di desa dan kelurahan.

Kepala Desa Loloan Bayan (wawancara tanggal 19 Nopember 2012) memberikan informasi mengenai keberadaan Babinsa, sebagai berikut :

Setiap petugas yang ada di desa ini perlu kami tahu tugasnya, sehingga dapat kami tahu yang bersangkutan bekerja atau tidak...bukan sebagai atasan saya mengetahui hal tersebut...tetapi supaya perannya sebagai kepala desa untuk masyarakat dapat berjalan dengan baik...semua petugas yang ada harus mempunyai makna atas peningkatan kesejahteraan, sudut pandang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lainnya...seluruhnya sebagai satu kesatuan, kurang salah satunya berarti terganggu kesejahteraan masyarakat Babinsa mempunyai tugas ketahanan dan memberikan dukungan pemerintahan dalam aspek lain...yang bersangkutan dikatakan harus tahu segala hal yang ada di desa...orang kaya, orang miskin, bahkan proyek apa yang ada di desa...

Pengetahuan informan atas fungsi yang diemban oleh Babinsa bukan sebagai hasil membaca perundangan, tetapi atas dasar kerja koordinasi yang dijalankan dengan personal terkait. Seyogyanya demikian, sehingga kepala pemerintahan di tingkat desa dapat melakukan pengelolaan atas seluruh potensi aparatur yang ada di desa, melalui kerja koordinasi atau wujud kerja lainnya (komando atau meminta wewenang) dapat dijalankan guna mempercepat penyelesaian masalah masyarakat desa.

Kepala Desa Bujur (wilayah kerja di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, wawancara tanggal 23 Nopember 2012) memberikan informasi mengenai pengetahuannya atas peran yang dijalankan Babinsa , sebagai berikut :

Banyak pihak yang bertugas di desa, ada PNPM, perawat dan bidan, Babinsa... harus kami tahu peranannya di desa supaya dapat kami informasikan pada masyarakat, kemana mereka akan datang jika ada suatu masalah.... jangan sakit di bawa ke babinsa dan sebaliknya mau siskamling atau ronda dengan bidan....Bertumpuknya personal yang ada hendaknya

memberikan manfaat yang maksimal pada masyarakat...saya melihat Babinsa bekerjasama dengan semua pihak....kerjanya semua bisa..saat membangun polindes beliau juga bisa menjadi tukang...begitu juga kalau ada kerusakan di kantor desa...memberikan gambaran pada diri saya bahwa tugasnya bukan hanya masalah perang, keamanan, tetapi luas....

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perannya di masyarakat sangat tergantung pada keadaan. Aparatur TNI dapat bekerja memberikan bantuan penanggulangan bencana, gotong royong membangun prasarana vital, seluruhnya dikenal dengan manunggal ABRI dengan masyarakat. Informan di atas memberikan bukti bahwa personal TNI bukan sebatas ketahanan dan keamanan, tetapi serba bisa dalam memberikan pelayanan dan bantuan pada masyarakat, baik melalui kerja langsung dan tidak langsung. Pola kerja yang demikian sangat cepat mendukung membaunya Babinsa dan masyarakat, sehingga mempermudah dalam pelaksanaan tugasnya.

Kepala Desa Kuripan (wawancara tanggal 23 Nopember 2012) memberikan informasi keberadaan Babinsa sebagai berikut :

Dalam kerja kami...kapanpun saya telpon, termasuk oleh masyarakat yang membutuhkan, mau tengah malam atau apa yang bersangkutan siap sedia....kami membutuhkannya bukan hanya ada masalah menyangkut keamanan, tetapi kami membutuhkan keberadaannya pada semua masalah di desa kami...beliau harus tahu...itu yang ditegaskan pada awal penugasannya

Fungsi yang diemban oleh Babinsa di desa terkait diinformasikan oleh yang bersangkutan, bahkan memberikan informasi yang luas sebagai wujud mendedikasikan diri dalam membantu kepala desa dan jajaran dalam bekerja. Pengetahuan atas seluruh aspek yang sudah terjadi dan sedang berjalan, baik aspek ekonomi dan lainnya diperlukan oleh Babinsa, sehingga dapat memberikan dukungan atas pelaksanaan fungsi yang diemban.

Penggalian dan pemeliharaan potensi SDA, SDM, SDB bukan hanya melalui kerjanya sendiri, tetapi juga bagaimana mendapatkan informasi dari aparatur. Misalnya terkait dengan rencana pembangunan, Babinsa perlu mengetahuinya, terutama berhubungan dengan tepat atau tidaknya kebijakan tersebut, terkait dengan potensi dan hambatan ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang dimiliki masyarakat desa.

Koordinasi mengenai fungsi yang dimiliki Babinsa di setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara telah terjadi dengan baik. Hasil wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa Tempos, Kediri, Sekotong, Gerung Utara, Lembar, Salut, Sukadana dan banyak desa lainnya memberikan informasi yang sama, bahwa Babinsa tidak menjadikan diri sebagai aparatur yang berdiri sendiri, tetapi telah melakukan koordinasi tugas dengan aparatur desa dan personal lain yang bertugas di desa terkait.

#### **6. Informan Atasan Babinsa Danramil Terkait Tugas**

Informasi dari personal lain mengenai keberadaan Babinsa dalam menjalankan tugas perlu diperoleh dari pihak lain, selanjutnya dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara, baik dalam konteks *cross check* ataupun untuk memperdalam materi wawancara. Wawancara mendalam juga perlu dilakukan dengan atasannya, yaitu Danramil mengenai peran yang dijalankan Babinsa, baik dalam perannya di desa dan konsep pertanggungjawaban.

Kapten Inf Marito (Danramil 1606-01/Cakranegara, wawancara tanggal 1 Nopember 2012) berikut hasil wawancaranya :

Terdapat 17 orang Babinsa di wilayah kerja kami..kami secara rutin melakukan kontak, sebagai hubungan kerja formal dan non formal....menurut saya seluruh Babinsa telah menjalankan tugas dengan baik...seluruhnya memberikan laporan periodik dengan baik...data demografi di wilayah kami diperoleh dari para Babinsa...berarti fungsi inventaris telah dijalankan dengan baik...optimalisasi tugas tentu diperlukan, sehingga lebih tercipta manunggal TNI dengan rakyat

Prosedural kerja telah dijalankan oleh Babinsa, termasuk tugas aktual di lapangan.

Konteks tersebut atas informasi pimpinan atau personal yang berada di atas hirarkinya dalam struktur organisasi. Informasi di atas secara personal, perlu diperoleh informasi lebih lanjut mengenai kondisi khusus secara individu pada Babinsa yang berada di wilayah kerja Koramil Cakranegara. Informasi yang diperoleh sebagai berikut :

Wilayah kerja kami berada di central bisnis Kota Mataram, kondisi yang ada relatif sama, karakteristik kerja yang dibutuhkan sama...para Babinsa tidak ada yang mempunyai permasalahan khusus dalam kerjanya...menurut saya semuanya baik. Walaupun banyak warga keturunan...tidak ada masalah dengan nasionalisme...seluruhnya memberikan dukungan potensi ketahanan nasional, setidaknya dengan tidak menimbulkan permasalahan atas ketahanan nasional itu sendiri.

Wilayah kerja Koramil Cakranegara relatif sama, sebagai wilayah pusat bisnis. Semua potensi yang terkait dengan SDM, SDA dan SDB berhubungan dengan bisnis, seluruhnya telah terata dengan baik, sehingga tidak ada permasalahan yang berdampak pada gangguan keamanan dan sejenisnya yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan permasalahan bisnis atau ekonomi.

Kapten Inf Watimiyatno Rahman (Danramil 1606-05/ Mataram, wawancara tanggal 5 Nopember 2012), berikut hasil wawancaranya :

Kami membawahi 33 Babinsa, berarti 33 desa (setiap desa/kelurahan) mempunyai satu orang Babinsa....atas kerja para Babinsa saya mendapatkan informasi lengkap mengenai potensi yang ada di wilayah kerja yang

ada...peran saya untuk membaca dan menelaah dalam makna kepentingan ketahanan nasional dan aspek lain terkait dengan manunggal TNI. Dalam hubungan manunggal TNI dengan rakyat kami membutuhkan ragam informasi kondisi ekonomi dan sosial, sehingga kami mempunyai peran dalam kondisi ketahanan yang normal, bukan dalam keadaan darurat perang.

TNI harus mampu memberikan makna atas kesejahteraan masyarakat, itu dilakukan dengan Babinsa sebagai personal yang berada paling dekat dengan sumber informasi dan sekaligus sebagai wilayah sasaran

Kerja inventarisasi potensi ekonomi dan permasalahan desa atau kelurahan telah dijalankan di wilayah kerja Koramil Mataram. Informasi dari Danramil di atas memberikan penegasan bahwa peran Babinsa dalam menjalankan fungsi manunggal TNI sangat penting, khususnya dalam inventarisasi potensi dan hambatan ekonomi, kesehatan dan pendidikan agar dapat memberikan bantuan serta sekaligus sebagai konsep kemitraan dengan aparaturnegara lain.

Kapten Inf Muhdar, S.Pd (Danramil 1606-06/Sekotong, wawancara tanggal 8 Nopember 2012), mengenai pelaksanaan tugas dan kerja pengawasan serta pertanggungjawaban Babinsa di wilayah kerjanya, berikut informasinya :

Struktur organisasi di Koramil memberikan informasi bahwa Babinsa Bertanggung jawab langsung pada Danramil, sehingga bagaimana pelaksanaan tugas Babinsa menjadi tanggung jawab kerja Danramil. Proses pengawasan, permintaan pertanggungjawaban kerja dari Babinsa dibutuhkan oleh Danramil...

Kami membangun komunikasi dengan Babinsa jika ada sesuatu yang diperlukan, baik dari saya sebagai atasan ataupun dari Babinsa dalam rangka meminta suatu arahan dalam pelaksanaan pekerjaan...rutinitas laporan kami terapkan, karena itu sebagai tugas saya.

Dalam wilayah kerja saya...dapat saya nyatakan bahwa para Babinsa telah menjalankan tugasnya dengan baik, tentu setiap wilayah kerja menghasilkan kerja yang beragam dan permasalahan yang bersifat khusus.

Wilayah kerja Koramil Sekotong terdiri atas tujuh (7) desa, secara umum sebagai wilayah dengan perekonomian masyarakat utamanya bersumber dari pertanian dan nelayan. Masyarakat secara umum hanya menjalankan kerja yang bersifat rutinitas, tetapi dengan kondisi sarana prasarana yang minim atas dukungan aktivitas ekonomi masyarakat. Kerja Babinsa sebagai satuan tugas pada wilayah Koramil Sekotong sangat diperlukan, sehingga ada wujud kebijakan publik yang mempercepat pengentasan permasalahan yang ada.

Kapten Inf Sumani (Danramil 1606-07/Gunungsari wawancara tanggal 15 Nopember 2012), berikut hasil wawancaranya :

Terdiri atas sembilan belas desa ...seluruhnya telah ada Babinsa di setiap desa. Saya mempunyai pemikiran bahwa jika seluruh kita bekerja dengan orientasi yang sama dalam pembangunan, baik dalam koordinasi semua fungsi yang ada akan dapat memberikan percepatan dalam menciptakan masyarakat sejahtera...informasi yang saya peroleh dari para Babinsa, kemiskinan masih menjadi masalah di wilayah kerjanya...masyarakat masih tersandera dalam melakukan inovasi usahanya, perolehan kesempatan pendidikan, kesehatan dan lainnya. Pertumbuhan sarana prasarana minim ...sebagai wujud pembangunan tidak mengalami pertumbuhan...  
Perlu ada informasi kebutuhan pembangunan di daerah atau pemikiran bersama semua pihak di desa untuk mengarahkan pembangunan.

Danramil di wilayah Gunungsari mempunyai harapan agar seluruh personal yang ada, baik di pemerintahan dan TNI mempunyai andil atau kontribusi dalam merumuskan pembangunan dan sekaligus aspek lain yang berhubungan dengan terarahnya pembangunan itu sendiri. Babinsa dalam kesatuan kerjanya bukan hanya dapat terlibat dalam perencanaan, tetapi dapat menggunakan potensi yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, termasuk kerja operasional, khususnya melalui manunggal TNI dengan rakyat.

Kapten Inf Kiswahudin (Danramil 1606-08/Sekotong wawancara tanggal 22 Nopember 2012) memberikan informasi sebagai berikut :

Terdapat 27 Babinsa dalam wilayah Koramil Narmada...banyak ragam kegiatan para Babinsa...seluruhnya ada dalam laporan rutin...Wilayah Kecamatan Narmada dan Lingsar mempunyai potensi pertanian, perikanan dan bisnis...pengembangan wilayah ini sangat berhubungan dengan kemampuan pengambil kebijakan di pemerintahan.

Para Babinsa yang berada di di Koramil Narmada secara umum mempunyai pos kerja, jadi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik....Pelaksanaan beberapa pekerjaan di Kecamatan Narmada atas inisiatif para Babinsa, kami dari Koramil Narmada melakukan ragam kegiatan dalam konsep manunggal dengan rakyat "TNI Masuk Desa"....

Potensi kami dalam pemerintahan, ketahanan dan lainnya akan dapat terlihat dengan jelas...atas peran dari Babinsa, karena fungsi sosial ekonominya yang perlu ditonjolkan.....

Babinsa yang berada di wilayah Kecamatan Narmada dan Lingsar (wilayah Koramil 1606-08/Narmada), sekilas atas informasi Danramil telah berjalan dengan baik. Kerja yang dijalankan bukan sebatas kerja untuk fungsi ketahanan nasional, tetapi lebih banyak dalam menjalankan fungsi sosialnya. Terbukti atas inisiatif sesuai dengan permasalahan dan potensi di wilayah kerjanya mampu merealisasikan TNI Masuk Desa. Peran ini perlu digalakkan kembali, sehingga fungsi pemilikan informasi dan pelaksanaan pembangunan dapat terwujud.

Berbagai ragam hasil informasi di atas, dapat disederhanakan dalam matrik hasil wawancara berikut, tentu sifatnya bersifat general, sebagai berikut.

Tabel 4.3. Matrik hasil Wawancara

No.	Keterangan	Temuan
<b>Fungsi Babinsa sebagai Pemberi Informasi</b>		
1	Penggunaan peran Babinsa oleh Organisasi publik dalam perumusan kebijakan publik (pendidikan, kesehatan dan lainnya)	Minim; hanya terjadi koordinasi pada level pemerintahan desa
2	Pendampingan dalam implementasi kebijakan	Babinsa diberdayakan
3	Kerja evaluasi	Pelibatan Babinsa minim
4	Kerja dengan aparaturnya Desa	Koordinasi dan ragananya dalam memecahkan masalah masyarakat sangat tinggi
<b>Pelaksanaan Pekerjaan Babinsa</b>		
1	Tempat kerja  waktu kerja	Lapangan dan kantor desa (jika ada fasilitas diharapkan mempunyai ruang kerja) Dekat dengan masyarakat; waktu kerja dapat dinyatakan 24 jam selama dibutuhkan
2	Hasil kerja	Pelaporan pada Danramil dalam koordinasi tingkat kecamatan dapat melalui Danramil
3	Bentuk hasil kerja	Pemecahan masalah aktual; membantu aparaturnya desa dalam menyukkseskan ragam pembangunan
4	Sifat kerja	Dekat dengan masyarakat, akar masalah dan dicintai oleh masyarakat
<b>Hambatan dan pendukung kerja</b>		
1	Hambatan	Minim media, pengetahuan dan keterampilan dalam riset dan pengolahan data-sesuai dengan perkembangan teknologi
2	Dukungan	Dukungan masyarakat, pengarahan atasan dan harmonisasi hubungan di desa dengan semua pihak
<b>Ciri kerja yang Dibangun</b>		
Keterbukaan dalam pelaksanaan tugas; memberikan bantuan dalam ragam kerja, menyangkut informasi, kerja fisik dan lainnya. Organisasi publik lain bersifat antipati, sehingga potensi aparaturnya negara secara keseluruhan tidak digunakan.		

Sumber: data primer diolah



### C. Pembahasan

Babinsa dalam pelaksanaan tugas di hirarki TNI hanya bertanggung jawab pada Danramil. Wujud tanggung jawab tersebut secara langsung, berarti pemberian tugas dan pertanggungjawaban (*top down* dan *button top*) bersifat langsung, tanpa ada jabatan lain yang menjadi interveningnya. Tugas yang diemban Babinsa sangat tergantung pada ragam pengarahan dari Danramil, berarti tergantung pada kemampuannya dalam melakukan telaah atas informasi yang diperoleh pada waktu sebelumnya sebagai dasar dalam merumuskan tindakan pada waktu berikutnya. Penggunaan istilah waktu, karena dapat saja dalam waktu mingguan dan bulanan, tergantung pada waktu pelaporan yang dibuat oleh para Babinsa di wilayah Koramil.

Temuan dalam penelitian ini, memberikan indikasi yang kuat bahwa para Babinsa di Kodim 1606/Lobar telah melaksanakan tugas dengan baik. Pelaksanaan tugas yang dijalankan tidak bersifat tugas formal, tetapi bagaimana para Babinsa memberikan seluruh tugasnya tanpa ada batas waktu kerja, terutama saat bersosialisasi dengan masyarakat. Koordinasi dengan aparat desa, petugas lapangan dari organisasi publik, pertanggungjawaban pada Danramil berjalan dengan baik, sehingga potensi dan faktor hambatan yang berhubungan dengan aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan diketahui dengan baik.

Kerja yang dijalankan oleh Babinsa dalam aplikasi ataupun dalam tupoksi yang dijalankan bukan hanya meliputi aspek hankam, tetapi juga menyangkut aspek sosial ekonomi dan politik melalui kerja dalam melakukan inventarisasi potensi desa. Kerja ini

sangat penting dalam kaitan penciptaan kesejahteraan masyarakat. Konsep kerja secara normatif (sesuai tufoksi) dan fakta kerja yang dijalankan sangat diharapkan dalam memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan tertentu yang berpihak pada masalah. Konsep ini sesuai dengan Smith (2003). Intinya adalah dalam menjalankan tugas oleh aparaturnegara dengan menggunakan sumber daya yang ada dapat memecahkan permasalahan masyarakat atau mewujudkan tujuan masyarakat.

Tugas yang dijalankan oleh Babinsa, pada tempat yang sama ataupun pada Babinsa di wilayah lain harus bersifat spesifik. Babinsa dalam kerja aktual di setiap lokasi berbeda, sesuai dengan permasalahan yang ada serta potensi yang dimiliki masyarakat. Konsep kerja kebijakan publik yang demikian sesuai dengan pendapat dari Zheng Wu et.al. (2005). Kerja yang dijalankan harus sesuai dengan usulan masyarakat, karena masyarakat yang tahu permasalahan yang dihadapinya. Waktu yang bersamaan, masyarakat lebih mengetahui haknya, sehingga tuntutan akan lebih tinggi intensitasnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa kerja Babinsa dengan terjun ke lokasi, berhubungan dengan masyarakat menjadi sangat penting.

Babinsa dalam menjalankan tugasnya membuka diri dengan semua pihak, bahkan dengan ragam tugas, karena upayanya dalam memaknai kemanunggalan TNI dengan rakyat. Pada pemerintahan desa/kelurahan, potensi Babinsa digunakan dengan baik, tetapi tidak optimal dalam memberikan makna pada pemecahan dasar masyarakat. Hal tersebut disebabkan peran dari pemerintah desa, termasuk Babinsa di dalamnya hanya sebatas sebagai pendamping dari ragam kebijakan publik yang diterapkan oleh organisasi publik.

Babinsa tidak dilibatkan secara langsung oleh pengambil kebijakan organisasi publik dalam merumuskan suatu kebijakan, begitu juga untuk tahap evaluasinya. Babinsa hanya difungsikan pada tarap operasional dari suatu kebijakan, dapat dinyatakan sebagai pengawal dari suatu kebijakan untuk dijalankan dengan baik.

Pemerintah dalam membuat kebijakan publik harusnya melibatkan pemerintah desa, mencari masukan dengan konsep *down to top*, baik dalam makna hirarki pemerintahan ataupun sampai pada masyarakat yang menjadi sumber permasalahan yang akan dipecahkan. Fakta ini tidak berjalan dengan baik, terlebih penggunaan informasi dari aparat pemerintah yang berasal dari instansi lain. Hal ini bersesuaian dengan pernyataan Dunn (2003) terkadang dalam kebijakan publik ada bias atau *gap* yang disebabkan oleh kekuatan tertentu. Kekuatan yang dimaksud dapat berupa kebiasaan yang ada dalam birokrasi dan aspek lain yang menyebabkan kebijakan dijalankan hanya sebatas rutinitas. Dihubungkan dengan model kerja perumusan kebijakan di atas, termasuk dalam implementasinya sebagai ciri dari model kebijakan kelembagaan, sehingga terkadang lupa atas esiansial kebijakan dalam memecahkan masalah. Prosedur kerja yang dijalankan lebih sebagai nuasa politik (Syafi'i, 2008). Kekuatan yang ada yang menyebabkan organisasi publik tidak mengambil prosedur yang semestinya dalam mengambil keputusan, karena orientasi keberpihakan pada kepentingan organisasi semata, kepentingan sekelompok pengambil keputusan atau kondisi tersebut kemudian diperkuat oleh kebiasaan birokrasi yang ada.

Kajian atas tugas rutin yang dijalankan oleh Babinsa (tanpa melupakan tugas sebagai penghimpun, penelaah dan pengelola potensi ketahanan nasional di wilayah binaan) ternyata lebih banyak berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan aspek-aspek yang menjadi permasalahan dasar masyarakat. Perannya dalam melakukan inventarisasi data, termasuk juga pemeliharaan dan pelaporan serta melakukan koordinasi, maka pada prinsipnya Babinsa memerlukan pengetahuan dan keterampilan khususnya layaknya pelaku riset, tabulasi, secara otomatis dalam memaknai temuan dan selanjutnya bersosialisasi dengan masyarakat.

Babinsa dalam menjalankan tugasnya memunculkan potensi baru dalam diri dan kelembagaannya di dalam masyarakat, yaitu kedekatan dan hubungan sosial serta emosional. Harapan masyarakat atas semakin dijalankannya tugas TNI yang memberikan bantuan pada masyarakat melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), istilah dulu sangat dipentingkan. Potensi TNI (aparatur negara) dikalahkan oleh kepentingan politik yang menghendaki agar ABRI tidak mempunyai fungsi ganda yang dikenal dengan Dwi fungsi ABRI. Dalam model keputusan publik hal ini relevan dengan makna kebijakan politik yang diungkapkan oleh Lindblom dalam Wahab (2004). Penegeasan yang diberikan adalah keputusan publik adalah hal yang kompleks, tidak berawal dan berakhir, bersifat analitis dan politis. Adanya makna politis didalamnya, terkadang menyebabkan rasionalitas dan kebermaknaan tidak menjadi pilihan, tetapi aspek kepentingan yang berujung pada manfaat segolongan elit yang relevan dengan kekuasaan.

Hambatan utama dalam pelaksanaan tugas tersebut berupa pemilikan alat tabulasi, pelaporan dan secara otomatis pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasionalkannya. Pengetahuan intelgensi berbeda dengan kemampuan dalam melakukan tabulasi dan pelaporan ragam potensi dan hambatan yang dimiliki wilayah binaan pada aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (kebutuhan dasar). Optimalisasi peran Babinsa, khususnya dalam rangka menjalankan fungsi manunggal TNI dengan rakyat, maka perlu diberikan pengetahuan, keterampilan dan sekaligus media kerja.

Kebijakan publik yang menghasilkan keberpihakan pada masyarakat adalah kebijakan yang meliputi prosedur dengan mengutamakan kemampuan analitis, bukan dominan mengedepankan aspek politik. Model kelembagaan dalam kebijakan publik yang menyebabkan suatu organisasi mendapatkan legitimasi, tentu juga kebalikannya. Upaya perjuangan melalui pendekatan politik dapat digunakan untuk mengembalikan hal fungsi TNI dalam kehidupan social masyarakat, bahkan melebihinya. Fakta legitimasi TNI mengalami pengurangan dalam mendapatkan fungsi sosial, bukan berarti TNI menghilangkan kemampuan anggotanya dalam melakukan pekerjaan sosial, kesesuaian keterampilan dan pengetahuan anggota dengan aspek yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Arah perkembangan politik masih dapat berubah, masyarakat akan melakukan tuntutan sejalan dengan keberpihakan yang berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh. Dapat saja dulunya masyarakat antipati atas TNI (ABRI), tetapi pembuktian kembali fungsi sosialnya dapat memunculkan kondisi yang

berbeda. Kekuatan masyarakat dapat mengarahkan perubahan politik dan aspek luas dalam kehidupan bernegara (Rasheed, 2000).

Seluruh hasil kerja yang dimiliki Babinsa akan menjadi data dokumentasi yang dimiliki, jadi tidak muncul sebagai persepsi, tetapi fakta. Fakta tersebut akan tersimpan dengan baik dan sekaligus akan cepat terkirim pada Danramil serta ada kemudahan organisasi publik dalam menggunakannya, jika telah muncul pengetahuan para pengambil kebijakan atas potensi yang dimiliki para Babinsa. Organisasi TNI (Kodim 1606/Lobar) pada periode yang akan datang dapat melakukan usulan belanja modal berupa pembelian laptop dan modem yang diperuntukkan bagi Babinsa, sehingga secara otomatis sistem informasi yang telah dibangun Kodim 1606/Lobar akan optimal digunakan oleh prajurit. Pada waktu yang bersamaan juga diberikan pengetahuan dan keterampilan sebagai personal yang mampu melakukan tabulasi data atau fungsi riset dasar dalam mendukung pelaksanaan tugas prajurit yang paling dekat dengan rakyat.

Adanya potensi Babinsa sebagai bank data di wilayah binaan secara otomatis akan memunculkan ketergantungan organisasi publik lain, terutama dalam upaya dasar untuk merumuskan kebijakan publik. Babinsa bukan satpam dari operasional kebijakan publik, karena akan menjadi pemborosan dalam pelaksanaan tugasnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan sebagai aparatur yang bertugas dalam mengenali, menginventaris dan memelihara SDA, SDM dan SDB yang ada di wilayah binaan. Tugas yang diemban juga bukan sebatas itu, karena akan selalu memberikan perhatian pada permasalahan yang

sedang terjadi di wilayah binaan serta tugas-tugas penting yang diberikan oleh Danramil ataupun hasil koordinasi dengan aparaturnya lain di desa atau kelurahan.

TNI dalam menjalankan fungsinya, terkait dengan fungsinya atas masyarakat telah relevan dengan model kebijakan publik kelompok, masyarakat menjadi orientasinya (Syafi'i, 2008). TNI sebagai organisasi publik telah membuka diri dengan organisasi publik lainnya, sehingga kebutuhan masyarakat berupa pemecahan masalah dan pencapaian tujuan berupa peningkatan kesejahteraan menjadi acuan kerjanya. TNI melalui tugas Babinsa telah berupaya untuk membuka diri dalam memberikan kontribusi percepatan penuntasan masalah dasar (ekonomi, pendidikan, dan kesehatan) masyarakat, termasuk hal-hal yang sedang terjadi di wilayah binaan, seperti bencana, pemilihan desa dan aspek sosial lain yang menghindarkan masyarakat dari kerugian yang dapat muncul sebagai akibat konflik horisontal.

TNI melalui tugas Babinsa tidak hanya berorientasi pelaksanaan tugas ketahanan nasional, tetapi membuka diri atas ragam tugas lain yang diberikan oleh organisasi publik, baik pada level pemerintahan desa/kelurahan dan level lainnya. Fakta yang ada ternyata organisasi publik, khususnya level perumusan kebijakan publik belum terbiasa menggunakan potensi Babinsa. Tahap implementasi dari suatu kebijakan publik yang ada di desa sebagai implikasi inisiatif para Babinsa atas keberadaannya di desa binaan, sehingga mempunyai kontribusi dalam mempercepat penciptaan masyarakat sejahtera, baik secara langsung atau tidak langsung atas ragam kebijakan publik yang ada. Kondisi ini memberikan pembuktian bahwa organisasi lain menerapkan model kebijakan publik yang

tidak mengarah pada kepentingan masyarakat, tetapi kepentingan lain (aspek politik, kekuatan, kepentingan kelompok tertentu yang dominant).

Implikasi penting yang diharapkan dalam riset ini adalah munculnya koordinasi lintas departemen dalam memecahkan permasalahan masyarakat, bukan bekerja sendiri-sendiri, karena akan bersifat pemborosan jika suatu program atau kebijakan selalu dimulai dari awal, tanpa menggunakan potensi organisasi publik atau aparat negara yang mempunyai fungsi terkait dengan pemilikan informasi. Babinsa sebagai bagian dari struktur organisasi TNI AD mempunyai kepedulian yang tinggi atas masalah ekonomi, sosial masyarakat, bukan hanya masalah keamanan dan pertahanan. Pada konsep masih tercermin manfaat ideal dari dwi fungsi TNI, tetapi dalam makna fungsi pemecahan masalah masyarakat, bukan dalam konteks politik.

Kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah melalui organisasi publik dan aparat negara di dalamnya adalah pada upaya mewujudkan keinginan masyarakat. Percepatan penciptaan kesejahteraan melalui ragam kebijakan publik dapat dilakukan. Model yang dapat digunakan dapat beragam, tetapi harus fokus pada kepentingan masyarakat, bukan dominant kepentingan politik. Hal dikhawatirkan adalah apabila masyarakat semakin tinggi kesadarannya atas haknya, intensitas ketidakpercayaan pada pemerintah semakin tinggi, maka sangat dikhawatirkan terjadi berbagai tuntutan masyarakat, dalam intensitas tertentu dapat menjadi dasar tuntutan mundurnya rezim pemerintahan (Rasheed, 2000). Fakta empiris di Indonesia telah terjadi pada era orde lama yang memunculkan orde baru, kemudian tuntutan lagi yang memunculkan era reformasi



serta tidak menutup kembali adanya penggalangan kekuatan masyarakat (massa), jika masyarakat menyatakan rezim era reformasi gagal dalam mensejahterakan masyarakat, yang terindikasi dari ragam kebijakan publik yang lebih kuat aspek politiknya dari aspek yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Rezim yang berkuasa hendaknya tidak melupakan keunggulan rezim sebelumnya, tentu dengan konsep perbaikan. Pemanfaatan potensi TNI, khususnya pada konsep kerja Babinsa sangat diperlukan. Fakta yang ada fungsi mendapatkan dukungan dari masyarakat dan mempunyai hubungan kerja yang harmonis di level bawah. Terapan TNI masuk desa atau yang sejenis perlu dikembalikan. Babinsa sebagai personal yang mempunyai tugas khusus dalam menginventaris potensi SDM, SDA dan SDB serta permasalahan sosial ekonomi masyarakat di wilayah kerjanya mutlak dimanfaatkan oleh organisasi publik dalam merumuskan suatu kebijakan. Proses kerja dengan mengumpulkan data saat kebijakan akan dirumuskan dapat saja bersifat bias, sementara Babinsa bekerja dalam seluruh waktu yang dimiliki, sehingga informasi terserap dengan baik.

Proses perumusan kebijakan publik mengacu pada tahapan yang diajukan oleh Santoso (2010) yang mengutip ragam model, menempatkan tahap pertama berupa pengenalan masalah. Inti dari tahap ini adalah adanya informasi yang memberikan gambaran atas kondisi aktual, kebutuhan masyarakat, potensi masyarakat dan lainnya, sehingga identifikasi kebijakan publik dapat lebih terarah. Relevan dengan pernyataan Dunn (2003) bahwa permasalahan masyarakat dapat terentaskan, salah satunya jika informasi yang digunakan sebagai sumber untuk perumusan kebijakan valid.

Informasi terkait dengan potensi sumber daya dan permasalahan yang ada, sehingga pengelolaan sumber daya dan alokasinya akan tepat sasaran (Dunn, 2003). Salah satu aparatur negara yang mempunyai informasi yang luas, karena menjadi bidang tugasnya dan berada di masyarakat dalam melaksanakan tugasnya adalah Babinsa. Koordinasi organisasi publik dengan organisasi TNI sangat dibutuhkan, sebagai pemerkuat dari awal hingga tahap evaluasi dari kebijakan publik. Koordinasi dan pemanfaatan potensi informasi yang dimiliki satu organisasi publik oleh organisasi publik lainnya akan menghindari inefisiensi dalam hal waktu dan biaya. Fakta yang ditemukan dalam penelitian ini adalah organisasi publik di Kota Mataram yang tidak memanfaatkan potensi informasi dari Babinsa, termasuk juga pada tahap evaluasi, tergolong tidak relevan dengan konsep kebijakan publik yang mengarah pada *more welfare* dan *less cost* (Osborne dan Plastrik, 1997). Fakta ini memberikan satu solusi agar aspek politik dan kekuatan lain yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat (*more welfare*) harus dengan segera dibenahi.

Implementasi penting dari hasil penelitian ini adalah hendaknya organisasi publik yang ada, dengan program kerja yang menyentuh permasalahan masyarakat desa dan kelurahan agar mejakukan koordinasi dengan para Babinsa, baik pada tahap perumusan kebijakan publik, implementasi dan evaluasinya. Hal ini sangat penting, karena Babinsa mempunyai potensi yang tinggi terkait dengan pengetahuannya atas akar permasalahan (pada aspek ekonomi, pendidikan dan sosial lainnya, bukan hanya menyangkut hankam). Pada tahap implementasi, potensi yang dimiliki bukan hanya secara individual Babinsa, karena TNI memberikan upaya untuk memberikan bantuan, termasuk melalui konsep kerja

TNI masuk desa atau sejenisnya. Hal yang jelas, TNI membuka diri dalam segala aspek pada organisasi publik lainnya. Peran dari organisasi publik yang ada untuk memanfaatkan secara maksimal. Dalam makna yang luas dapat dinyatakan dalam perumusan kebijakan publik, implementasi dan tahap lainnya oleh organisasi publik tertentu harus memperhatikan organisasi publik lainnya, sehingga kebijakan yang dirumuskan mempunyai manfaat yang berganda, bukan sebaliknya kebijakan tersebut saling meminimalkan manfaat.

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Babinsa dalam pelaksanaan tugas berkaitan dengan pengarahan langsung yang diberikan oleh Danramil, ragam koordinasi dengan aparat di desa dan secara langsung bersosialisasi dengan masyarakat guna menjalankan fungsi ketahanan nasional, inventarsasi dan pemeliharaan SDA, SDM dan SDB serta ragam kegiatan lain untuk lebih mengenal potensi yang ada di wilayah binaan. Babinsa memberikan laporan secara rutin pada Danramil sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas.

Babinsa di wilayah Kodim 1606/Lombok Barat mempunyai potensi yang besar terkait dengan sumber informasi, penguatan implimentasi kebijakan dan evaluasi kebijakan yang ada di wilayah binaan. Fakta yang ada organisasi publik sebagai perumus kebijakan (Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeda dan organisasi publik lainnya) tidak menggunakan potensi tersebut sebagai sumber informasi dan evaluasi kebijakan. Penguatan dalam implementasi kebijakan di wilayah binaan Babinsa sebagai wujud inisiatif kerjanya secara mandiri dan hasil koordinasi dengan aparat desa serta pengarahan dari Danramil.

2. TNI melalui tugas Babinsa telah membuka diri dengan organisasi publik, tetapi organisasi publik belum optimal dalam menggunakan potensi yang ada dalam aparatur negara pada lintas departemen.

Tugas Babinsa dalam kondisi ketahanan yang aman atau normal akan lebih identik sebagai fungsi riset dan sekaligus sebagai pendamping di masyarakat, sehingga diperlukan bantuan media kerja dan sekaligus pengetahuan serta keterampilan dalam penggunaannya. Hal tersebut muncul sebagai penghambat, tetapi penghambat utama dalam hubungan dengan perumusan kebijakan publik adalah keengganan organisasi publik untuk bekerja lintas departemen. Motto TNI masih berjalan sepihak, tetapi organisasi publik belum mengarah pada upaya manunggal dengan TNI dalam mempercepat pengentasan masalah dasar masyarakat.

3. Keberadaan Babinsa di desa dan kelurahan telah dimanfaatkan oleh organisasi publik lain untuk implementasi, dalam arti ikut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Fakta yang ada hanya sekedar menguatkan, tanpa alokasi sumber daya dan pemberian wewenang secara khusus.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Potensi Babinsa tergolong tinggi berhubungan dengan pengenalan masalah wilayah binaan. Apabila suatu organisasi publik hendak merumuskan kebijakan pada satu desa atau kelurahan, maka sangat penting melibatkan Babinsa, tetapi jika dalam

wilayah yang lebih luas dapat melibatkan Danramil, karena ragam informasi dari para Babinsa telah diberikan pada atasannya.

Seluruh aparatur negara, sektor publik ataupun ketahanan nasional (TNI) mutlak secara optimal digunakan untuk mempercepat pengentasan masalah dasar untuk mewujudkan kesejahteraan, tentu hanya dapat digunakan melalui perumusan kebijakan publik. Koordinasi lintas sektoral dalam menciptakan kebijakan publik, mulai tahap perumusan sampai evaluasi sangat perlu dijadikan ciri dari kerja dalam pemerintahan di Indonesia.

2. Upaya untuk mengatasi masalah kerja Babinsa, maka untuk waktu dekat dilakukan pengusulan belanja modal berupa laptop dan modem serta pelatihan dalam penggunaannya, terutama dalam kerangka kerja riset dan pendamping masyarakat.
3. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian secara spesifik atas persepsi masyarakat atas kerja Babinsa, dihubungkan dengan aksi langsung dalam memecahkan permasalahan dasar masyarakat. Konteks tersebut untuk melengkapi keterbatasan penelitian ini yang hanya fokus pada bagaimana Babinsa dalam menjalankan tugas, penyertaannya dalam perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi oleh organisasi publik serta temuan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Bastian, I., (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chalid, P., (2008). *Teori dan Isu Pembangunan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Dunn, N. William, (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_, (2003). *Analisis Kebijakan Publik; Kerangka Analisis dan Prosedur Perumusan Masalah*. Jakarta : PT. Hanindita Graha Widya.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Handoko, T.H., (2000). *Pengantar Manajemen*. BPFE: Yogyakarta.
- Kismartini, dkk., (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Mahmudi (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta:UPP AMP YPKN.
- McLeod R., Jr., dan Schell, G., (2001). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Indeks.
- Robinson, B. Richard, dan Pearce, A. John., (1997). *Manajemen Strategik; Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Suharto, E., (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno, (2007). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, (1996). *Manajemen Strategis dan Kebijakan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Syafi'i, H.M., (2008). *Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Wahab, Solichin, A., (2004). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wasistiono, S., (2003). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. CV. Fokus Media, Jakarta.

Winarno, B., (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press

**Dokumen :**

\_\_\_\_\_, (2010). *Pangdam Buka ABRI Masuk Desa*. VivaNews.com. Oktober, 2010.

\_\_\_\_\_, (2011). *Menghadapi Kelompok Separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), PDI Perjuangan Mengusulkan Agar Program ABRI Masuk Desa (AMD) Kembali Digalakkan*. INILAH. Com. Agustus, 2011.

\_\_\_\_\_, (2011). *Buku Pintar Babinsa*. Staf Umum Teritorial Angkatan Darat. Jakarta.

BPS, 2011. *NTB dalam Angka*. Mataram

Iqbal, H., (2008). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Karyana, A., (2011). *Pengorganisasian Perencanaan Desa: Kajian Di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Cirebon*. Jurnal Organisasi dan Manajemen. Vol 7 No. 2 Tahun 2011. 140-156.

Kwon H.S., dan Matheson, A., (2003). *Public Sector Modernisation: a New Agenda*. *Journal on Budgeting*. Vol.3 No. 1. 2003.

Muhdi (2012). *Model Implementasi Kebijakan Pendidikan Kota Semarang pada Era Otonomi Daerah*. Jurnal JMP. Volume 1 No. 2. 2012.

Osborne, David dan Plastrik, Peter, 1997. *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*, [www.consultci.com/book\\_reviews/BanishingBureaucracy.html](http://www.consultci.com/book_reviews/BanishingBureaucracy.html), 2012.

Rasheed, M.F., (2000). *The Concep Public Interest*. Department of Public Administration, College of Administrative Sciences, King Saud University, P.O. Box 2459, Riyadh 11451, Saudi Arabia

Santoso, (2010). *Model dalam Kebijakan Publik*. Telusur Google.

Smith, L.B., (2003). *Public Policy and Public Participation Engaging Citizens and Community in the Development of Public Policy*. Canada: Health Sante.



Sulawaty, Susy (2007). *Analisis Kebijakan Publik dalam Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Tasikmalaya*. Tesis Program Pascasarjana Universi Dipenogoro. Semarang.

Universitas Dipenogoro dan BAPPEDA Semarang, (2007). *Kebijakan Publik Bagi PKL di Lokasi Strategis Kota Semarang*. RIPTEK. Vol. 1. 2007. 35-38.

Zheng Wu, et.al (2005). *Population Change and Public Policy Concept Paper for a SSHRC Strategic Research Cluster*. Population Studies Centre, University of Western Ontario. London.

UNIVERSITAS TERBUKA

**Lampiran 1. Pedoman Wawancara**

**PERAN BINTARA PEMBINA DESA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN  
PUBLIK;  
(Studi Pada Wilayah Kodim 1606/ Lombok Barat)**

**A. IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama : \_\_\_\_\_  
 2. Umur : \_\_\_\_\_  
 3. Pendidikan : \_\_\_\_\_  
 4. Pangkat : \_\_\_\_\_

\* Pendidikan jika responden non Babinsa

**B. PERAN BABINSA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK**

1. Fungsi normatif yang dijalankan oleh Babinsa, terkait dengan jawaban yang diberikan bukan atas dasar pedoman dalam uraian jabatan atau perundangan:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

2. Hasil kerja babinsa terkait dalam satu tahun terakhir :

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

3. Rekapitulasi permasalahan sosial (pendidikan dan kesehatan) di desa babinsa bekerja :

---

---

---

---

---

4. Rekapitulasi permasalahan ekonomi di desa babinsa bekerja :

---

---

---

---

---

---

---

5. Rekapitulasi potensi (SDA, SDM, dan SDB) di desa babinsa bekerja

---

---

---

---

---

---

---

**C. PELAKSANAAN FUNGSI BABINSA**

1. Tempat kerja selama ini : \_\_\_\_\_

2. Bentuk kerja operasional yang dijalankan : \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

3. Bagaimana pertanggungjawaban pekerjaan secara vertikal? :

---

---

---

---

---

---

---

---

4. Bagaimana koordinasi kerja dijalankan dengan aparatur desa dan organisasi lainnya (pertanyaan dapat terus diperdalam)? :

---

---

---

---

---

---

---

---

5. Apa pendukung pelaksanaan kegiatannya (Babinsa) selama ini :

---

---

---

---

---

---

---

---

6. Apa penghambat pelaksanaan kegiatannya (Babinsa) selama ini :

---

---

---

---

---

---

---

---

7. Apa pendukung dan penghambat dalam peran babinsa berkontribusi pada perumusan kebijakan oleh organisasi publik

---

---

---

---

---

---

---

---



4. Apa yang bapak kehendaki dalam pelaksanaan tugas, dihubungkan dengan keberartian fungsinya bagi masyarakat melalui kerja yang dijalankan organisasi publik :

---

---

---

---

---

---

---

---

\*Item dalam pertanyaan D, juga dapat dicross check dengan aparatur desa dan organisasi publik lain di setiap wilayah kerja Babinsa

UNIVERSITAS TERBUKA

## Lampiran 2. Informan (Babinsa) di Kodim 1606/Lombok Barat tahun 2012

No	Nama	Pangkat	Desa/ Kelurahan Binaan	Bangku Kerja di Kantor Desa /Kelurahan	Lokasi Kerja
1	Sujudi	Serma	Kel. Cakra Barat	Ada	Lapangan
2	I Wayan Ngenteg	Sertu	Kel. Cakra Selatan	Ada	Lapangan
3	Adul Kasim	Serma	Kel. Sayang-sayang	Ada	Lapangan
4	I Ketut Wiliana	Serka	Kel. Krg Taliwang	Ada	Lapangan
5	Silahudin	Serka	Kel. Mayura	Ada	Lapangan
6	Hada Umar	Serma	Kel. Cakra Utara	Ada	Lapangan
7	Suhermanto	Serma	Kel. Dsn Cermen	Ada	Lapangan
8	Wiyarto	Serma	Kel. Abian Tubuh	Ada	Lapangan
9	Abdilah	Sertu	Ds Pemenang Timur	Ada	Lapangan
10	Ali	Sertu	Ds Tegal Maja	Ada	Lapangan
11	I Komang Diarna	Serma	Ds Jenggala	Ada	Lapangan
12	Saipuddin	Sertu	Ds Gondang	Ada	Lapangan
13	Muhamad Baihaqi	Serma	Ds. Mumbulsari	Ada	Lapangan
14	Samsudin	Serda	Ds. Senaru	Ada	Lapangan
15	Supriyadi	Serma	Ds. Sukadana	Ada	Lapangan
16	Tambe	Serka	Ds. Bayan	Tidak ada	Lapangan
17	Munawar	Serda	Ds. Santong	Ada	Lapangan
18	Md Sudiartawan	Serma	Ds. Anyar	Ada	Lapangan
19	Sukardi	Serka	Ds. Kayangan	Ada	Lapangan
20	I Ketut Arnama	Sertu	Ds. Senaru	Tidak ada	Lapangan
21	Pramono	Serma	Desa Bajur	Tidak ada	Lapangan
22	I Nyoman Kartika	Serma	Ds Jagaraga Indah	Ada	Lapangan
23	Ahmad	Serda	Ds Bengkel	Ada	Lapangan
24	Wage Rudolf S.	Serka	Ds Kuripan	Ada	Lapangan
25	Aminullah	Serda	Ds Beleka	Tidak ada	Lapangan
26	M. Arief Sugihartono	Serma	Kel. Monjok	Ada	Lapangan
27	Hariyanto	Serma	Kel. Karang Pule	Ada	Lapangan
28	Siswanto	Serka	Kel. Jempong Baru	Ada	Lapangan
29	Marhaban	Serma	Kel. Dsn Agung Br	Tidak ada	Lapangan
30	Agus Jamil	Serma	Desa Pelangan	Ada	Lapangan
31	Mohamad Saleh	Serma	Ds. Gunungsari	Ada	Lapangan
32	I Putu Wijaya	Serka	Ds. Batulayar	Ada	Lapangan
33	Muhamad	Pelda	Ds. Gegerung dan	Tidak ada	Lapangan
34	Abdul Hamid	Serma	Ds. Krg Bayan	Ada	Lapangan
35	Syahrudin Jibril	Pelda	Ds. Duman	Ada	Lapangan
36	Ruslan Adi Toyo	Serma	Ds. Segerongan	Ada	Lapangan
37	Saiful Bahri	Serka	Ds. Langko	Ada	Lapangan
38	Zaenal Abidin	Pelda	Ds. Nyurlembang	Ada	Lapangan
39	I Ketut Susila	Serka	Ds. Dasan Tereng	Ada	Lapangan

40	Nursamin	Serda	Ds. Tanak Beak	Ada	Lapangan
41	I Made Bratha	Serda	Ds. Batu Mekar	Ada	Lapangan
42	Muhazzabul Karim	Serka	Ds. Sesaot	Ada	Lapangan
43	Budhi Sujarwo	Serka	Ds. Sembung	Ada	Lapangan
44	Sudirman	Serda	Ds. Lembuak	Ada	Lapangan
45	Dewa Nym Sayang	Serma	Ds. Narmada	Ada	Lapangan

Keterangan : \* Kerja di lapangan mempunyai makna tergantung pada kebutuhan

UNIVERSITAS TERBUKA



**Lampiran 3. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Babinsa Berhubungan dengan Inventaris Potensi Wilayah Binaan dan Aspek Non Hankamnas di Kodim 1606/Lombok Barat.**

No.	Nama	Masalah/Hambatan
1	Sujudi	Dibutuhkan media kerja, pelatihan mendalam
2	I Wayan Ngenteg	Alat dan skill
3	Adul Kasim	Media kerja
4	I Ketut Wiliana	-
5	Silahudin	Media kerja, pengetahuan dan dukungan dari instansi
6	Hada Umar	-
7	Suhermanto	Skil
8	Wiyarto	-
9	Abdilah	Pengetahuan
10	A li	Media kerja
11	I Komang Diarna	Kebersamaan
12	Saipuddin	Kebersamaan
13	Muhamad Baihaqi	Persamaan komitmen
14	Samsudin	-
15	Supriyadi	Media kerja
16	Tambe	Alat dan skill
17	Munawar	Kebersamaan
18	Md Sudiartawan	Media kerja
19	Sukardi	-
20	I Ketut Arnama	-
21	Pramono	Media kerja
22	I Nyoman Kartika	-
23	Ahmad	-
24	Wage Rudolf S.	Kebersamaan
25	Aminullah	-
26	M. Arief Sugihartono	Media kerja
27	Hariyanto	-
28	Siswanto	-
29	Marhaban	Dukungan semua pihak
30	Agus Jamil	-
31	Mohamad Saleh	Media kerja
32	I Putu Wijaya	-
33	Muhamad	Media kerja
34	Abdul Hamid	Media kerja
35	Syahrudin Jibril	Media kerja
36	Ruslan Adi Toyo	Media kerja
37	Saiful Bahri	Media kerja
38	Zaenal Abidin	Media kerja
39	I Ketut Susila	Pengetahuan, pendidikan

40	Nursamin	Pengetahuan, pendidikan
41	I Made Bratha	-
42	Muhazzabul Karim	-
43	Budhi Sujarwo	-
44	Sudirman	-
45	Dewa Nym Sayang	Media kerja

UNIVERSITAS TERBUKA

**Lampiran 4. Pengalaman dalam Hubungan dengan Instansi Lain pada Babiusa di Kodim 1606 Lombok Barat**

No.	Nama	Tahap Kebijakan Publik di Desa Binaan		
		Pencarian Informasi	Implementasi	Evaluasi Kebijakan
1	Sujudi	+	+	-
2	I Wayan Ngenteg	-	+	-
3	Adul Kasim	-	+	-
4	I Ketut Wiliansa	-	+	-
5	Silahudin	+	+	-
6	Hada Umar	-	+	-
7	Suhermanto	-	+	-
8	Wiyarto	-	+	-
9	Abdilah	-	+	-
10	A l i	-	+	-
11	I Komang Diarna	-	+	-
12	Saipuddin	-	+	-
13	Muhamad Baihaqi	-	+	-
14	Samsudin	+	+	-
15	Supriyadi	-	+	-
16	Tambe	-	+	-
17	Munawar	+	+	-
18	Md Sudiartawan	-	+	-
19	Sukardi	-	+	-
20	I Ketut Arnama	-	+	-
21	Pramono	-	+	-
22	I Nyoman Kartika	-	+	-
23	Ahmad	-	+	-
24	Wage Rudolf S	-	+	-
25	Aminullah	-	+	-
26	M. Arief Sugihartono	-	+	-
27	Hariyanto	-	+	-
28	Siswanto	-	+	-
29	Marhaban	-	+	-
30	Agus Jamil	-	+	-
31	Mohamad Saleh	-	+	-
32	I Putu Wijaya	-	+	-
33	Muhamad	-	+	-
34	Abdul Hamid	-	+	-
35	Syahrudin Jibril	-	+	-
36	Ruslan Adi Toyo	-	+	-
37	Saiful Bahri	-	+	-
38	Zaenal Abidin	-	+	-
39	I Ketut Susila	-	+	-

40	Nursamin	-	+	-
41	I Made Bratha	-	+	-
42	Muhazzabul Karim	-	+	-
43	Budhi Sujarwo	-	+	-
44	Sudirman	-	+	-
45	Dewa Nym Sayang	-	+	-

UNIVERSITAS TERBUKA